

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERSELISIHAN JAKARTA DAN DEN HAAG MENGENAI
STATUS IRIAN BARAT 1961-1963**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh

SINTIKE BAHABOL

NIM: 041314021

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERSELISIHAN JAKARTA DAN DEN HAAG MENGENAI
STATUS IRIAN BARAT 1961-1963**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh

SINTIKE BAHABOL

NIM: 041314021

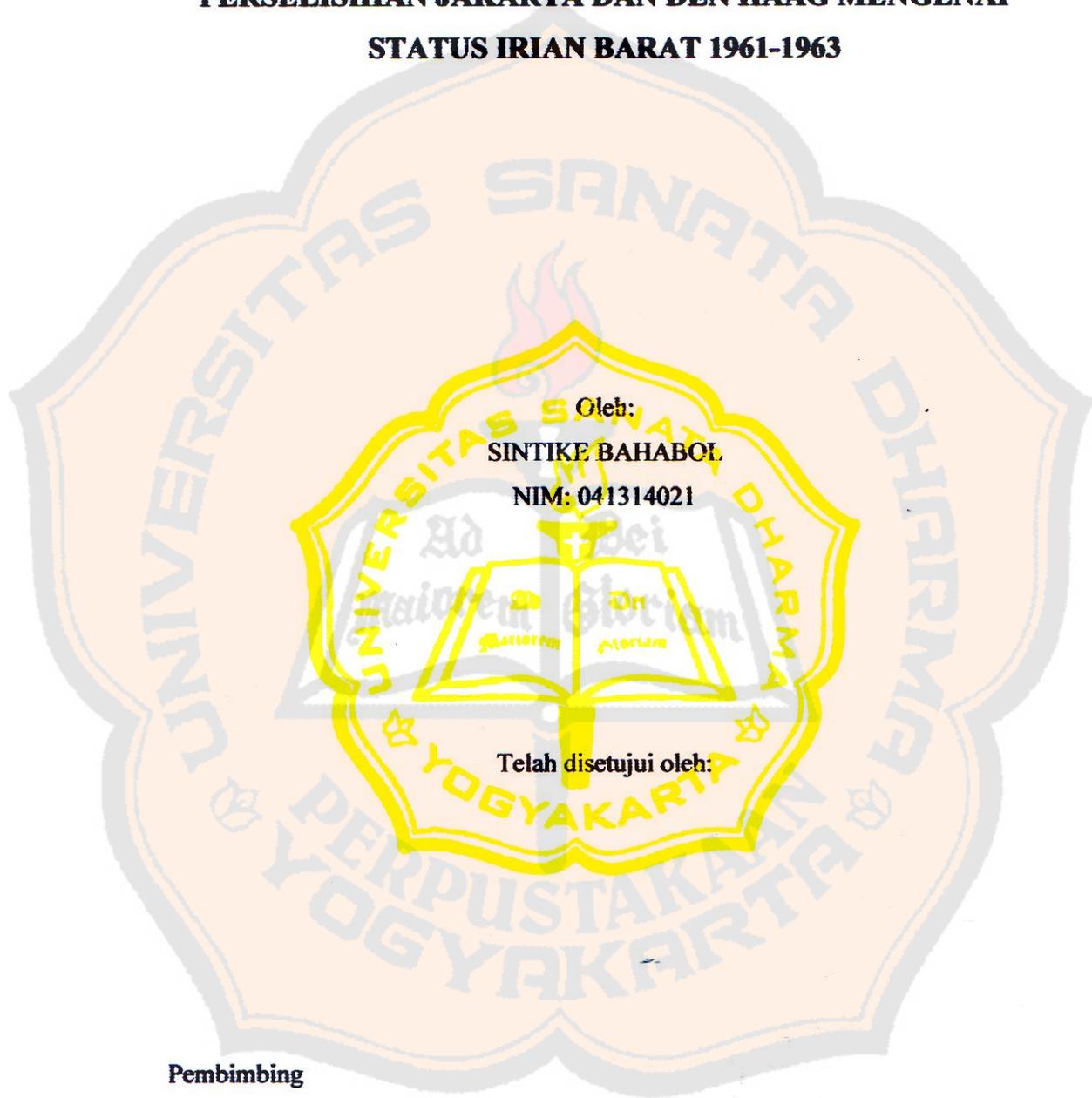
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**PERSELISIHAN JAKARTA DAN DEN HAAG MENGENAI
STATUS IRIAN BARAT 1961-1963**



Oleh:
SINTIKE BAHABOL

NIM: 041314021

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anton', is written over the printed name of the supervisor.

Dr. Anton Haryono, M.Hum.

Tanggal, 3 Agustus 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

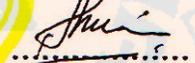
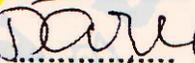
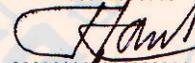
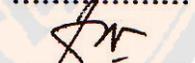
**PERSELISIHAN JAKARTA DAN DEN HAAG MENGENAI
STATUS IRIAN BARAT 1961-1963**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

SINTIKE BAHABOL
NIM: 041314021

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal, 19 Agustus 2011
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Indra Darmawan, S.E. M.Si.	
Sekretaris	: Dra. Theresia Sumini, M.Pd.	
Anggota	: Dr. Anton Haryono, M.Hum.	
Anggota	: Drs. A.K Wiharyanto,	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M. Pd.	

Yogyakarta, 19 Agustus 2011
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan




Rohandi, Ph. D.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku.

(Mazmur 62:2)

“Cinta memakai sebuah gaun panjang berenda-renda, yang dapat menyentuh tanah dan debu.

Cinta menghapuskan segala noda dari jalan-jalan besar dan lorong, dan karena cinta dapat melakukannya, maka cinta harus melakukannya”.

(Ibu Teresa)

“Pada akhirnya, persahabatan yang menyelamatkan segala sesuatu.”

(Thomas Merton)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN



Karya kecilku ini kupersembahkan teruntuk:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa
2. Keluargaku di Papua dan Yogyakarta.
3. Sahabat-sahabatku

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

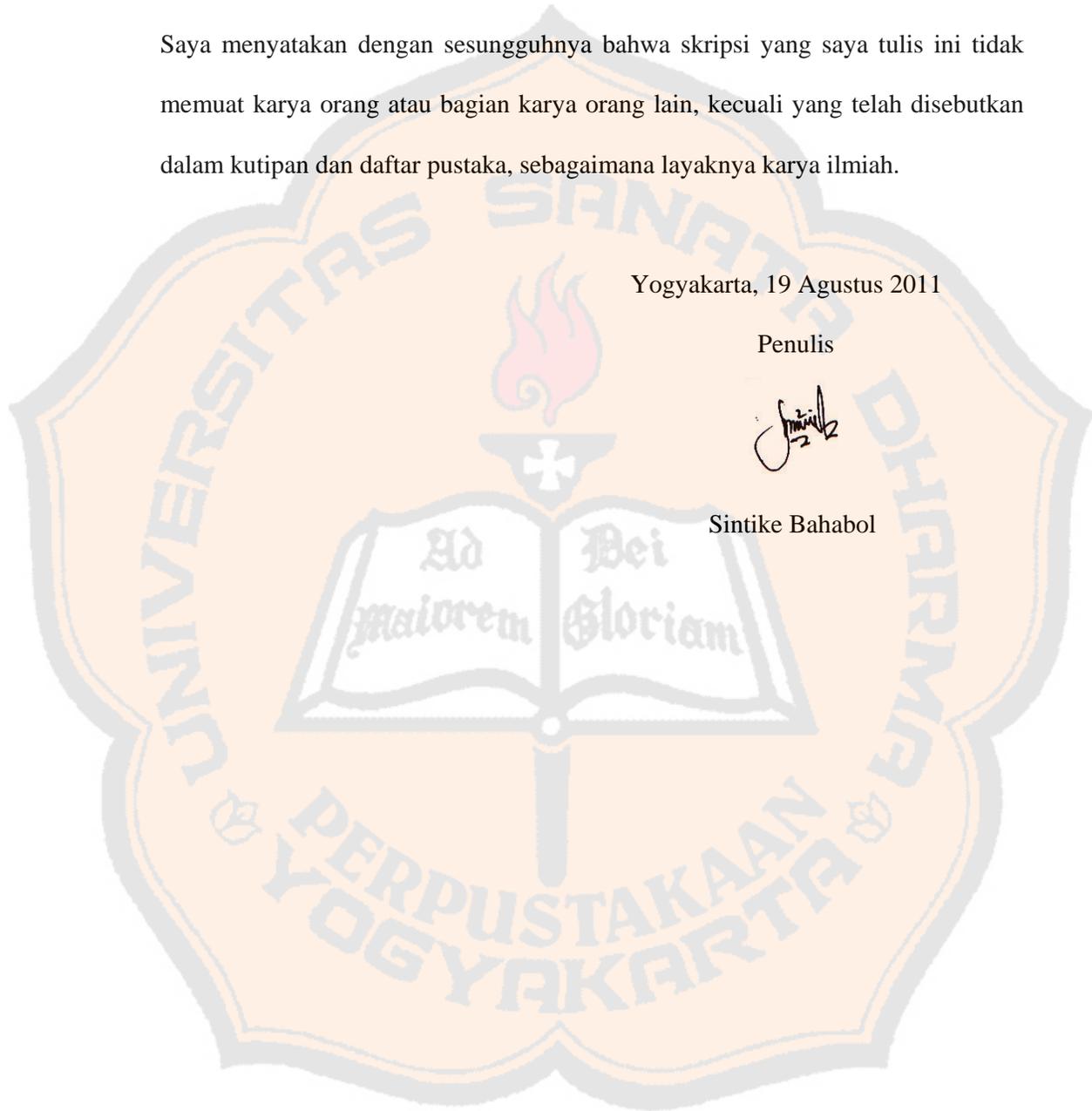
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya orang atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 19 Agustus 2011

Penulis



Sintike Bahabol



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Sintike Bahabol

Nomor Mahasiswa : 041314021

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

PERSELISIHAN JAKARTA DAN DEN HAAG MENGENAI STATUS IRIAN
BARAT 1961-1963

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Agustus 2011

Yang menyatakan


(Sintike Bahabol)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

PERSELISIHAN JAKARTA DAN DEN HAAG MENGENAI STATUS IRIAN BARAT (1961-1963)

Sintike Bahabol
Universitas Sanata Dharma
2011

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: 1) latar belakang terjadinya perselisihan antara Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat tahun 1961-1963; 2) proses terjadinya perselisihan antara Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat tahun 1961-1963; 3) dampak dari perselisihan antara Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat tahun 1961-1963.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dan ditulis secara deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan sejarah, politik, dan militer.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Latar belakang perbedaan kepentingan antara Belanda dan Jakarta menjadi penyebab perselisihan mengenai status Irian Barat. Ada beberapa kepentingan Belanda antara lain; untuk mempertahankan pengaruhnya di Pasifik dengan mempertahankan wilayah jajahannya, Irian Barat sebagai tempat penampungan orang-orang Indo-Belanda, membendung perkembangan komunis di Irian Barat dan menggali sumber daya alam di Irian Barat. Sedangkan Indonesia ingin menghapus kolonialisme dan penjajahan, dan Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Hindia-Belanda maka harus diserahkan kepada Indonesia. 2) Baik Jakarta dan Belanda sama-sama ingin menyelesaikan masalah status Irian Barat melalui jalur damai. Beberapa diantaranya adalah resolusi rencana Joseph Luns, resolusi dari negar-negara Asia-Afrika, resolusi Branzzaville dan perjanjian New York 1962, yang pada akhirnya menghasilkan pembentukan pemerintahan sementara di Irian Barat UNTEA. Dari resolusi yang dilakukan tidak pernah memberikan hasil yang memuaskan bagi kedua pihak yang bertikai. Kedua negara sama-sama berpegang pada pendiriannya masing-masing. Amerika Serikat yang takut apabila Indonesia jatuh ke tangan komunis mendesak kedua negara agar mau berunding. 3) meskipun ada diplomasi antara kedua negara tetapi selalu mengalami kegagalan, maka Indonesia mengambil sikap tegas dengan; memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, mengeluarkan Trikora dan membentuk Operasi Mandala. Perpedaan kepentingan antara kedua negara akhirnya berujung pada perang di Irian Barat. Salah satunya pertempuran di Laut Arafura. Sesuai dengan persetujuan New York, pada tanggal 1 Mei 1963 dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia di Kotabaru (Jayapura).

ABSTRACT

**DISPUTE BETWEEN JAKARTA AND DEN HAAG ABOUT
WEST PAPUA (WEST IRIAN) STATUS (1961-1963)**

Sintike Bahabol
Sanata Dharma University
2011

The purpose of this study is to describe and analyze: 1) the background of dispute between Jakarta and Den Haag about West Papua (West Irian) status 1961–1963; 2) the process of dispute between Jakarta and Den Haag about West Papua (West Irian) status 1961-1963; 3) the impact of between Jakarta and Den Haag about West Papua (West Irian) status 1961-1963.

The methods used in this study are historical method, analytical descriptive method by applying historical, politic and military approaches.

Based on this research the results are: 1) the different interest between Netherland and Jakarta caused the dispute on West Papua (West Irian) status. There are some interest regarding Netherland interest such as to retain their power in Pasific by holding their colonialism area, West Papua (West Irian) as their safeplace for Indo-Dutch people, banned communism in West Papua (West Irian) and explored natural resources of West Papua (West Irian). On the other hand Indonesia wanted to decolonize West Papua (West Irian) from Dutch and tried to get back to Indonesia. 2) Both Indonesia and Netherland wanted to finish the problem on West Papua (West Irian) status peacefully. There are some ideas such as Joseph Luns Plan resolution, Asia-Africa countries resolution, Branzzaville resolution and New York 1962 agreement that established the UNTEA Temporary Government in West Papua (West Irian). United State of America worried that Indonesia will be pro communist so push two countries to have negotiation. 3) The diplomation which happened between two countries failed, so made Indonesia take a straight position to stop diplomatic relation with the Netherland, prepared Trikora and declared Mandala Operation. At the same time the Netherland strengthened their military defense and increase number of troop/army in West Papua (West Irian). The difference of interest of two countries ended with war in West Papua (West Irian), with Arafura ocean battle. Finally the New York agreement, on 1 May 1963, was agreed and UNTEA gave West Papua (West Irian) to Indonesia in Kotabaru (Jayapura).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah atas penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai Status Irian Barat 1961-1963”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi prasyarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

Selama menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, dukungan, bantuan, doa, dan perhatian dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
4. Bapak Dr. Anton Haryono, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, dan sumbangan pemikiran yang sangat berharga bagi penulis hingga terselesaikannya penulisan ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan petugas sekretariat yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Sanata Dharma.
6. Staf UPT Perpustakaan Sanata Dharma yang banyak membantu penulis menemukan buku-buku dalam rangka penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Keluarga besarku di Yogyakarta dan Papua Bapak Enggiahap B, Mama Esta, Ibu Anti, Bapak Suwarto, Ibu Sum (alm). Semua dengan sabar mendidik saya, memberi semangat, doa, dan kebutuhan material bagi penulis. Buat Ibu Anti terima kasih banyak Ibu, karena Ibu saya bisa ada di Yogyakarta dan bisa menyelesaikan studi. Kakak, Liget, Martha, Paul, Ruthy, ka Arson kel. Adikku; Eneko, Kanaya, Cristian, Gresh, Niken, Manius, Sepi, Demi, Sipora yang telah memberikan dorongan dan bantuannya selama ini.
8. Sahabat-sahabatku, Melani, Melorin, Hesti, Cycil, Asni, Evi, Mina, Wanto, Perri, Yanto, Yono, Evi, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan pemikiran, saran maupun kritik yang bertujuan untuk menyempurnakan penulisan ini.

Penulis



Sintike Bahabol

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan dan Manfaat	4
D. Keaslian dan Tinjauan Pustaka	5
E. Landasan Teoritik	9
F. Metode dan Pendekatan	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II. LATAR BELAKANG TERJADINYA PERSELISIHAN ANTAR JAKARTA DAN DEN HAAG	
A. Letak Geografis	22
B. Perkembangan Perselisihan Jakarta dan Den Haag	23
C. Perbedaan Kepentingan	29
D. Keterlibatan Negara-Negara Asing	38

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III. PROSES TERJADINYA PERSELISIHAN ANTARA JAKARTA DAN DEN HAAG MENGENAI STATUS IRIAN BARAT (1961- 1963)

A. Diplomasi	51
B. Resolusi Penyelesain Masalah Status Irian Barat	60
C. Perjanjian New York 1962	68
D. Pemerintahan Sementara UNTEA di Irian Barat	79

BAB IV. DAMPAK PERSELISIHAN JAKARTA DAN DEN HAAG MENGENAI STATUS IRIAN BARAT (1961-1963)

A. Pemutusan Hubungan Diplomatik oleh Indonesia	86
B. Persiapan Peralatan Militer Indonesia	90
C. Trikora.....	94
D. Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat	98
E. Perang Antara Jakarta dan Belanda di Irian Barat	103

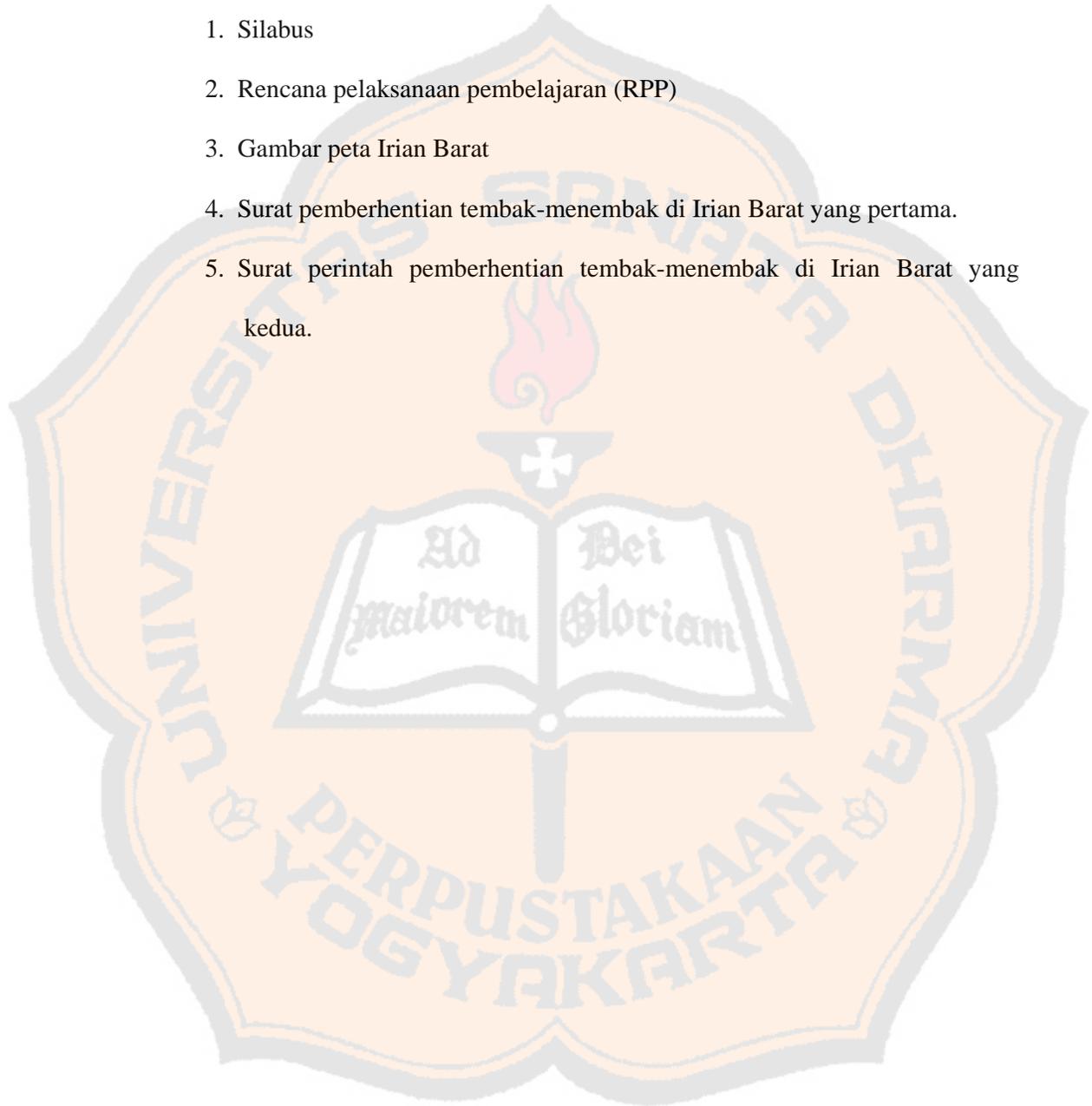
BAB V. PENUTUP

KESIMPULAN	113
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	115

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Silabus
2. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
3. Gambar peta Irian Barat
4. Surat pemberhentian tembak-menembak di Irian Barat yang pertama.
5. Surat perintah pemberhentian tembak-menembak di Irian Barat yang kedua.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia mengklaim bahwa seluruh wilayah yang termasuk dalam kekuasaan Hindia-Belanda adalah bagian dari Indonesia, dengan demikian Irian Barat juga termasuk didalamnya. Indonesia menuntut agar Den Haag mau menyerahkan kedaulatan atas Hindia-Belanda kepada negara Indonesia Serikat. Hasilnya pada tahun 1949 dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) Belanda menyerahkan kedaulatan atas Hindia-Belanda kepada Indonesia, akan tetapi dalam penyerahan tersebut Belanda tidak memasukkan Irian Barat dengan berbagai alasan. Pihak Belanda menganggap wilayah Irian Barat masih menjadi salah satu propinsi kerajaan Belanda tidak hanya itu, sebelum KMB pemerintah Belanda mengeluarkan satu undang-undang untuk tetap mempertahankan status *quo* atas tanah Papua. Dalam Konferensi Meja Bundar, ketika Belanda menandatangani penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia, Gubernur Jan Van Echout di Hollandia memproklamirkan Propinsi West New-Guinea Gulden, dan peraturan pemerintah *Bewindsregeling Niew-Guinea* untuk mengatur sistem pemerintahannya.¹ Dalam kesempatan ini Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua Barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

¹Socratez Sofyan Yoman, *Pemusnahan Etnis Melanesia*, Yogyakarta, Galang Press, 2007, hlm.138-139.

Pada tahun 1950, PBB, sebagai badan dunia memutuskan bahwa Papua Barat memiliki hak untuk merdeka, sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Dalam berbagai kesempatan Indonesia tetap pada pendapatnya bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia, oleh karena itu Belanda pernah mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, akan tetapi undangan tersebut ditolak oleh Indonesia. Indonesia yang selalu hadir dalam tiap kesempatan merasa tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti dari pihak Belanda. Dengan sikap Indonesia ini, Belanda mempercepat program pendidikan di Irian Barat untuk mempersiapkan kemerdekaan di tanah Papua.

Belanda yang sebelumnya ingin menjadikan Irian Barat sebagai tempat penampungan warga Indo-Eropa dan masih ingin memiliki pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara kini dalam ancaman dari Indonesia yang juga menginginkan wilayah Irian Barat dan menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari Indonesia Serikat. Belanda pun mulai mengambil langkah-langkah untuk menjadikan Papua sebagai sebuah wilayah yang merdeka, yang terwujud pada 1 Desember 1961 (sampai saat ini rakyat Papua masih memperingatinya sebagai hari kemerdekaan), yang dilengkapi dengan lagu kebangsaan, bendera kebangsaan, lambang negara, dan membentuk dewan daerah.

Dengan pembentukan dewan daerah oleh Belanda, maka Indonesia memberikan reaksi keras yaitu dengan menolak kemerdekaan di tanah Irian Barat dan mengeluarkan Trikora oleh Presiden Sukarno di Yogyakarta pada

tahun 1961 dan langsung membentuk Komando pembebasan Irian Barat dengan ketuanya Presiden sendiri. Tandanya bahwa Indonesia siap untuk berperang dengan Belanda kapan saja.

Untuk melawan Belanda di Irian Barat. Indonesia memintah bantuan peralatan perang kepada Amerika Serikat tetapi permintaan ini ditolak oleh Amerika dan Indonesia pun berpaling ke Moskow. Peralatan perang Indonesia banyak dibantu oleh Uni Soviet baik itu pesawat tempur maupun kapal laut serta peralatan perang lainnya. Baik Belanda maupun Indonesia sama-sama mempertahankan Irian Barat dan siap untuk berperang dengan memperkuat pertahanan dan menambah peralatan perang masing-masing, dan keduanya sama-sama menginginkan wilayah Irian Barat dengan alasan yang sederhana tetapi wilayah ini mempunyai arti penting bagi Jakarta, Den Haag maupun dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi obyek penulisan ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan antara Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat 1961-1963?
2. Bagaimana proses terjadinya perselisihan antara Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat 1961-1963?

3. Apa saja dampak dari perselisihan antara Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat 1961-1963?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Mengungkapkan latar belakang perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat, dilihat dari kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi.
- b. Menjelaskan proses terjadinya perselisihan Jakarta dan Den Haag, yang dimulai dari adanya keinginan dari kedua belah pihak yang berselisih untuk menyelesaikannya melalui jalur diplomasi.
- c. Menjelaskan dampak dari perselisihan antara Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat, karena melalui jalur diplomasi tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi pihak Indonesia maupun Den Haag, maka jalur terakhir dari perselisihan ini adalah perang.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah memiliki manfaatnya masing-masing, demikian juga dalam penulisan skripsi ini. Manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas Sanata Dharma

Untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian sejarah

b. Bagi mahasiswa sejarah

1. Untuk memperkaya dan melengkapi perbendaharaan historiografi khususnya tentang sejarah Papua, terutama mengenai proses integrasi Irian Barat (Papua) menjadi bagian dari NKRI
2. Dapat dijadikan bahan kajian bagi para penulis berikutnya dalam mengembangkan karya tulis ilmiah tentang sejarah Papua.

c. Bagi peneliti sendiri

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis terutama tentang proses perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat.
2. Sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma.

D. Tinjauan Pustaka

Dengan adanya kebebasan dalam menghasilkan karya tulis saat ini, banyak sekali karya-karya tentang sejarah Papua dapat ditemukan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sejarah integrasi Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia, baik yang ditulis oleh putra daerah Papua, para penulis luar maupun para peneliti sejarah Papua. Dalam penulisan karya ini penulis mengambil batas waktu yaitu dari tahun 1961 sampai dengan 1963, dengan memfokuskan pada perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat. Banyak sumber mengenai sejarah integrasi Papua.

Adapun sumber yang dipakai dalam menulis karya ini adalah beberapa sumber yang penulis anggap sesuai dengan judul yang ada. Beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini, antara lain;

1. *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*. Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat. Jakarta. 1986. Buku ini berisi mengenai perjuangan Indonesia dalam merebut Irian Barat dimulai dari Trikora, penyusupan pasukan di wilayah Irian Barat, pertempuran di laut Arafura, perjanjian New York dan penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia.
2. Baharuddin Lopa S.H. *Jalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*. Jakarta. Daya Upaya. Buku ini berisi tentang usaha-usaha yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan masalah Irian Barat sampai dengan perjuangan Indonesia dalam merebut Irian Barat melalui jalur perang dengan Belanda.
3. M. Cholil. 1971. *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan. Buku ini berisi tentang persiapan pemerintahan Indonesia dalam menyusun dan merencanakan aksi pembebasan Irian Barat.
4. Muhamad Yamin. 1956. *Perjuangan Irian Barat atas Dasar Proklamasi* cetakan kedua. Jakarta NV. Nusantra. Buku ini berisi mengenai uraian tentang tuntutan rakyat terhadap wilayah Irian Barat atas dasar proklamasi. Selain keempat buku di atas sebagai tambahan akan menggunakan buku antara lain:

1. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, buku ini secara umum menjelaskan mengenai sejarah Indonesia dan hanya sedikit yang menjelaskan mengenai Irian Barat terutama bantuan peralatan perang Uni Soviet kepada Indonesia.
2. Marwati Poesponegoro, dan Nugroho Natosusanto, dalam *buku Sejarah Nasional Indonesia IV*. Buku ini menjelaskan mengenai pembebasan Irian Barat, bidang diplomasi, bidang militer dan operasi-operasi pembebasan Irian Barat.
3. Baskara T. Wardaya, SJ, *Indonesia Melawan Amerika*. Buku ini menjelaskan mengenai kekhawatiran Amerika Serikat atas permasalahan yang berkembang antara Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat dan kemungkinan negara komunis untuk memanfaatkan situasi untuk mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara maka Amerika memberikan perhatian khusus dan memberikan bantuannya kepada Indonesia, dan hasilnya adalah perjanjian New York dan penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia.
4. Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri*, isinya mengenai peranan TNI dalam pengambilan kebijakan baik di tingkat nasional maupun Internasional, serta keterlibatan TNI dalam menyelesaikan permasalahan Irian Barat.
5. Soejitno Harjosoediro, *Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan*. 1987.

6. Smith, *Dekolonisasi Indonesia*, 1986, isinya mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yang mengakibatkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat Belanda, agresi militer kedua Belanda sampai pada perselisihan Indonesia dan Belanda mengenai status Irian Barat.
7. Pim Scoorl. *Belanda di Irian Jaya*, 2001, isinya mengenai situasi Irian Barat selama pendudukan Belanda di Papua.
8. Muridan S. Widjojo. Dkk, *Papua Road Map*. 2009, buku ini menjelaskan mengenai sejarah singkat tentang Irian Barat.
9. Socrates Sofyan Yoman, *Pemusnahan Etnis Melanesia*. 2007, buku ini menjelaskan mengenai sejarah Papua sampai pada penyerahan kedaulatan 1963.
10. Hendro Sobroto, *Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*, (2009). Walaupun tidak semua tentang aksi militer di Irian Barat dibahas namun, ada beberapa hal penting terdapat dalam buku ini, yang menjelaskan mengenai penerjunan tentara-tentara Indonesia untuk pertama kali di pedalaman Papua sampai dengan pengejejaran gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
11. Sendius Wonda, *Jeritan Bangsa*. 2009, buku ini menjelaskan tentang sejarah Papua.
12. John RG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta, Grasindo, 1993

E. Landasan Teori

Setiap perselisihan antara masyarakat ataupun antara negara, terjadi bukan tanpa alasan. Setiap peristiwa terjadi karena masing-masing yang berselisih mempunyai kepentingan, menjadi dasar mereka untuk mempertahankan keinginan. Berkaitan dengan penggarapan skripsi ini kajian teori yang digunakan adalah teori konflik. Teori ini terutama menjadi dasar bagaimana kedua negara merasa yang berhak untuk memiliki dan menguasai suatu wilayah dan kemudian menjadi ajang perebutan, permainan politik, dan kepentingan ekonomi membawa negara-negara lain ikut terlibat dalam konflik tersebut.

Sebagai negara yang telah merdeka, diplomasi merupakan langkah yang penting dalam usaha untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Secara umum, diplomasi berarti usaha untuk memelihara hubungan antar negara dengan perantara wakil-wakil diplomatik yang khusus, yaitu duta besar, duta atau kuasa usaha (*charge d'affaires*).²

Diplomasi dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hubungan resmi antar negara, dengan melakukan perundingan dan komunikasi informasi antara pemerintah yang akhirnya akan menghasilkan keputusan.³ Diplomasi juga dapat berarti hal-hal yang menyangkut hubungan resmi antar satu negara dengan negara lain yang dilakukan oleh wakil-wakilnya.⁴ Kata diplomasi sering digunakan dalam arti yang luas dalam percaturan politik internasional

² A.Heuken, dkk, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta, Yayasan Cipta Loka Caraka, 1973, hlm. 250.

³ W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Jakarta, Balai Pustaka, 1982, hlm. 253.

⁴ Save M Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, LPKN, hlm. 179.

yaitu membuat dan melaksanakan politik luar negeri. Dalam arti yang bersifat teknis, diplomasi berarti komunikasi antar pemerintah yang mengadakan penyelenggaraan hubungan resmi untuk kepentingan bersama.

Metode diplomatik merupakan penyelesaian secara damai dalam suatu negara yang berselisih. Upaya diplomasi terus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, untuk mendapatkan kesepakatan dan apabila kesepakatan tidak tercapai. Maka, masing-masing pihak yang berselisih akan mengambil langkah tegas dengan memperkuat angkatan bersenjata dan memperkuat pasukan. Dengan demikian konflikpun segera pecah.

Konflik dalam bahasa aslinya mempunyai arti perkelahian, peperangan atau perjuangan, yang berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak.⁵ Adapun tahapan-tahapan dalam konflik antara lain:⁶ 1). Timbulnya konflik dipicu oleh adanya intervensi militer dari kedua belah pihak yang berseberangan; 2) bidang isu dalam konflik antar pihak yang berlawanan bersumber dari suatu pembebasan wilayah tertentu yang disengketakan; 3) ketegangan ini mengacu pada serangkaian sikap dan kecenderungan seperti ketidakpercayaan dan kecurigaan antar satu pihak dengan pihak lainnya; 4) krisis ini merupakan satu tahap nyata dari konflik, tanda-tanda krisis meliputi: tindakan yang tidak diantisipasi oleh lawan, persepsi ancaman yang besar dari pihak lawan, persepsi waktu yang terbatas untuk mengambil suatu keputusan; 5) sikap merupakan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam usaha untuk mencapai tujuan kolektif; 6) tindakan merupakan keputusan yang

⁵Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 9

⁶ K.J. Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta, Erlangga, 1988, hlm. 173-174, dan 175-177.

telah diambil dan harus dilaksanakan. Adapun bentuk-bentuk tindakan itu antara lain adalah nota protes, tuduhan, memanggil pulang duta besar untuk konsultasi, penarikan duta besar, ancaman boikot atau embargo ekonomi, propaganda di dalam negeri, pemutusan hubungan diplomatik, mobilisasi kekuatan militer, dan yang terakhir perang dengan menggunakan kekuatan militer.

Konflik Indonesia dan Belanda merupakan *inter-state conflict*, konflik bersenjata diantara keduanya semakin berlarut-larut dan banyak menimbulkan korban jiwa. Konflik ini mencemaskan masyarakat internasional sehingga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) turun tangan untuk meredakan konflik. Dalam menyelesaikan PBB memiliki tiga dimensi yaitu:⁷ 1) *Peace keeping* merupakan usaha untuk mengurangi dan menghentikan konflik melalui intervensi militer; 2) *Peace building* merupakan upaya untuk mewujudkan terciptanya perdamaian dengan cara melalui perbaikan bidang sosial dan ekonomi; 3) *Peace making* merupakan aktivitas politik dan diplomatik yang ditujukan untuk merekonsiliasi perilaku politik diantara pihak yang bertikai melalui mediasi, negoisasi, dan arbitrase.

Dalam perundingan antara pihak yang bermusuhan, pihak mediator memainkan peran dan fungsi yang sangat besar dalam menyelesaikan krisis dan konflik.⁸ 1) Jasa Baik, dalam hal ini pihak mediator dapat mengusulkan tempat untuk pertemuan diplomatik resmi dan mendesak pihak-pihak yang bermusuhan untuk memulai pembicaraan resmi; 2) Sumber data, pihak

⁷Anak Agung Banyu Perwita, *Konflik Antar Etnik Dalam Masyarakat Global Dan Relevansinya Bagi Indonesia*, Jakarta, Centre For Strategic and International Studies, 1996, hlm. 156.

⁸ K.J. Holsti, *Op.cit.*, hlm. 193

mediator berperan memberikan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang bermusuhan; 3) Interposisi, tindakan pengiriman pasukan PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Belanda dari wilayah yang diperebutkan; 4) Pengawasan, jasa ini datang setelah para pihak yang terlibat konflik merundingkan gencatan senjata, menjaga ketertiban dan keamanan.

Jika konflik yang berkembang tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang bertikai maka langkah selanjutnya yang diperlukan adalah diplomasi. Diplomasi yang dimaksudkan disini biasanya berupa negosiasi terhadap pembuatan suatu perjanjian atau persetujuan eksekutif atau tawar-menawar dengan negara lain dalam persetujuan yang ingin dicapai sesuai kepentingannya masing-masing.

Menurut Lester Pearson “diplomasi tidak merumuskan kebijaksanaan, tetapi menyampaikan dan menjelaskan kebijaksanaan itu dan mencoba merundingkan peraturan-peraturan baru”.⁹ Sementara itu menurut A.M. Taylor. Diplomasi mencerminkan suatu upaya “membuat kebijakan dari suatu keterpaksaan”.¹⁰

Harold Nicholson, mengembangkan diplomasi menjadi dua bagian yakni; teori *worrior* dan teori *shop keeper*. teori *worrior* yang artinya mengembangkan politik kekuatan, sangat memperhatikan prestise nasional dan status negara itu untuk mencapai kemenangan. Sedangkan *shop keeper* lebih mengedepankan negosiasi yang bersifat menguntungkan secara politis

⁹Bantarto Bandoro, *Diplomasi Indonesia, Dahulu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta, CSIS, 1994, hlm. 46.

¹⁰Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1989, hlm. 72.

dan bersifat memuaskan dengan cara konsolidasi dan kompromi. Teori ini menganggap diplomasi sebagai usaha untuk menciptakan hubungan atau kontak langsung secara bersahabat yang saling pengertian melalui konsumsi timbal balik.

Ada beberapa bentuk diplomasi diantaranya; diplomasi pribadi (*personal diplomacy*), diplomasi tingkat tinggi (*summit diplomacy*), diplomasi konferensi (*conference diplomacy*).

1. Diplomasi pribadi biasanya dilakukan oleh seorang menteri luar negeri. sehingga terkesan mengurangi efektivitas kerja seorang duta besar.
2. Diplomasi tingkat tinggi biasanya dapat dilakukan oleh kepala-kepala negara atau kepala-kepala pemerintahan.
3. Diplomasi konferensi merupakan diplomasi yang terjadi dalam forum-forum multilateral alasannya adalah karena banyaknya masalah-masalah yang dihadapi negara-negara di dunia, serta keinginan negara-negara baru untuk berpartisipasi secara global dan saling ketergantungan antar negara.

Ada tiga macam bentuk diplomasi antara lain:

1. Persuasi dan kompromi biasanya dilakukan untuk membujuk lawan berunding dengan cara menghimbau mereka bersedia mencapai hasil yang lebih baik. Kompromi ini dilakukan untuk memuaskan semua pihak.
2. Kompromi gaya bujukan dan tekanan (*pressure*), cara ini lazim disebut diplomasi koersif yang menggunakan kekuatan militer untuk mendukung kebijaksanaan yang diambil. Kebijakan diplomasi ini hanya dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dan kredibilitas suatu negara yang

jauh lebih besar di atas negara lain. Ancaman yang digunakan dalam diplomasi koersif ini biasanya hanya berupa bujukan dan perkataan.

3. Menggunakan media (pihak ketiga) apabila suatu sengketa antara dua negara tidak dapat lagi mencapai kata sepakat atau tidak tercapainya persetujuan antara dua pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi adanya mediator ini intervensi dari pihak ketiga harus diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Salah satu jenis diplomasi yaitu diplomasi preventif yang artinya; suatu tindakan yang ditunjukkan untuk mencegah perselisihan antar pihak-pihak yang bertikai yang lebih luas menjadi konflik dan jika sudah menjadi konflik, harus dibatasi penyebarannya. Diplomasi preventif lebih dari sekedar untuk menyelamatkan dunia tetapi untuk mencegah agar tidak terisolasi dari masyarakat internasional. Adapun tujuan diplomasi preventif adalah:

1. Untuk mencegah konflik antar negara atau antar pemerintahan dengan kelompok minoritas didalam negara.
2. Untuk mencegah perselisihan menjadi konflik terbuka.
3. Memperkecil penyebaran konflik.

Syarat untuk keberhasilan diplomasi preventif terdiri atas:

1. Diplomasi preventif harus dilaksanakan sebelum ketegangan menjadi buruk, bahkan sampai terjadi konflik. Untuk melakukan diplomasi preventif secepatnya dan situasi ketegangan harus diketahui.

2. Negara yang menerima diplomasi preventif harus setuju dengan adanya intervensi .
3. Negara-negara besar diperlukan untuk mendukung diplomasi preventif. Biasanya dilaksanakan sesuai dengan sanksi ekonomi atau bantuan ekonomi sebagai alat untuk menyuksekkannya

PBB berhasil membujuk pihak Indonesia maupun pihak Belanda untuk mengakhiri konflik bersenjata dan kembali ke meja perundingan. Adapun prosedur pokok yang harus dipenuhi dalam perundingan antara lain: perundingan bilateral atau multilateral di antara pihak yang terlibat langsung, adanya campur tangan pihak ketiga dalam perundingan tanpa kepentingan langsung dalam bidang isu yang sedang dipertikaikan, keputusan, di mana pihak independen memutuskan penyelesaian melalui jenis imbalan tertentu. Dalam konteks masalah Irian Barat yang diperebutkan antar pihak Belanda dan Indonesia, PBB membentuk Badan Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA).

F. Metodologi Penelitian dan Pendekatan

1) Metodologi Penelitian

Metode penelitian sejarah menurut Gilbert J. Garrghan (1957:33), adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.¹¹

Metode yang digunakan dalam penggarapan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan: meringkas, mengutip dan melaporkan kembali ide-ide pokok perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Agar dalam penulisannya lebih fokus, maka diperlukan ketegasan oleh seorang penulis sebelum masuk dalam isi antara lain; perumusan judul, pengumpulan sumber, kritik sejarah, interpretasi dan historiografi.

a. Perumusan Judul

Penulisan skripsi ini merupakan keprihatinan atas penulisan sejarah Papua yang sampai saat ini masih kontroversi, terutama yang berkaitan dengan perselisihan Jakarta dan Den Haag sampai dengan proses penentuan status Irian Barat. Penulis memfokuskan penulisan skripsi ini pada; “perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat dalam periode 1961-1963.”

¹¹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta, Ar_Ruzz, 2007, hlm. 53.

b. Pengumpulan Sumber

Dalam penulisan sebuah karya tulis sumber sangat dibutuhkan terutama sebagai pedoman bagi penulis untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber-sumber yang relevan atau sesuai dengan judul dan juga sumber tersebut dapat dipercaya. Dalam penggarapan penulis menggunakan sumber dari buku-buku sejarah, dengan meringkas dan menuliskannya kembali untuk dilaporkan dalam bentuk tulisan. Adapun sumber yang digunakan diambil dari literatur yang ada di perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Daerah dan beberapa tempat lainnya yang ada di Yogyakarta.

c. Kritik Sejarah

Apabila semua sumber yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah kritik sumber dari yang sudah diambil. Kritik sumber atau verifikasi adalah pengujian terhadap sumber-sumber sejarah, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas (dapat dipercaya) dari sumber tersebut.¹²

Setiap penulis mempunyai pandangannya masing-masing tentang apa yang menjadi topik yang ingin dituliskannya. Sehingga dalam penulisannya walaupun topiknya sama tetapi pola berfikir dan pandangannya akan selalu berbeda. Begitu juga dengan penulisan

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 1995, hlm. 72.

sejarah Papua saat ini. Banyak sekali karya yang dihasilkan dalam masyarakat, baik itu yang ditulis oleh putra daerah Papua, orang Eropa, dan penulis Indonesia. Semuanya mempunyai pandangan yang berbeda mengenai Sejarah Papua.

Misalnya dalam buku; *Jalannya Revolusi Indonesia membebaskan Irian Barat* dan *Jeritan Bangsa*. Kedua buku ini sama-sama menulis tentang sejarah Papua. Akan tetapi penulis kedua buku ini berbeda, yang satu putra daerah Papua sedangkan yang satu lagi bukan orang Papua. Dalam sebuah kutipan dalam kedua buku ini misalnya, mengenai Trikora. Dalam buku *Jeritan Bangsa* menuliskan, “Trikora bukan untuk rakyat Papua Barat tetapi menciderai rakyat Papua dengan menghancurkan harapan dan masa depan orang Papua Barat”,¹³ sedangkan dalam buku *Jalannya Revolusi Indonesia membebaskan Irian Barat* mengatakan bahwa, “Trikora sebagai sebuah sikap untuk berjuang dalam rangka membebaskan Irian Barat”. Kedua buku ini merupakan contoh dari sekian banyak buku, dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda-beda mengenai sejarah Papua.

d. Interpretasi

Interpretasi adalah langka yang perlu dilakukan yaitu dengan menganalisis sumber yang bertujuan untuk mengurangi subyektivitas dalam penulisan sejarah, yang bisa muncul karena dipengaruhi jiwa

¹³ Sendius Wonda, *Jeritan Bangsa*, Yogyakarta, Galang Press, 2009, hlm. 46.

jaman, pendidikan, kebudayaan, lingkungan sosial, dan hal lain yang melingkupi penulisnya.¹⁴

Contoh dalam penulisan skripsi ini terdapat pada bab II, dimana dalam bab ini penulis mencoba untuk menganalisis latar belakang kepentingan Belanda, Jakarta, Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan wilayah Irian Barat. Dalam mengkaji masalah ini penulis harus melakukan penafsiran terhadap beberapa sumber, karena sumber yang digunakan oleh penulis tidak memberikan penjelasan yang terinci. Oleh karena itu penulis melakukan analisis dengan mencari keterkaitan antara masalah yang ada dengan teori-teori dan pendekatan pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

e. Historiografi

Selanjutnya yang terakhir adalah historiografi. Setelah melalui proses verifikasi dan interpretasi, maka data yang valid ditulis dalam suatu tulisan sejarah. Historiografi adalah suatu proses rekonstruksi dari rentetan peristiwa masa lampau.¹⁵

Dalam penulisan skripsi ini penulis memamparkan dengan metode deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat dalam periode 1961-1963.

¹⁴ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, hlm. 60-61

¹⁵ Sartono, *Op.cit.*, hlm. 61.

2) Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dilakukan dengan menghimpun data dari literatur-literatur yang ada di perpustakaan. Literatur tidak hanya terbatas pada buku tetapi juga jurnal, majalah, koran, internet dan dari bahan tertulis lainnya. Manfaat penelitian melalui penelusuran perpustakaan dan telaah perpustakaan adalah dapat mengungkapkan pikiran secara sistematis, kritis, dan efisien bagi peneliti.

Untuk melakukan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner, yakni menggunakan pendekatan dua atau lebih disiplin ilmu yang saling berhubungan berdasarkan interaksi masing-masing. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis digunakan untuk melihat usaha-usaha perjuangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan Negara Indonesia yang utuh dari semua bekas jajahan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
- b. Pendekatan politik digunakan untuk melihat peranan pemerintah Indonesia, mengkaji berbagai aspek yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan antar pemerintah Indonesia dengan Belanda mengenai status Irian Barat.
- c. Pendekatan militer, digunakan untuk mengkaji situasi teritorial Irian Barat yang dikuasai oleh pihak kolonial Belanda, dan mereka terus memperkuat armada militernya, untuk itu pemerintah Indonesia harus mengimbangi dengan kekuatan militer untuk merebut Irian Barat.

- d. Pendekatan ekonomi dipakai untuk mengkaji situasi sumber ekonomi di Irian Barat. Secara ekonomi Irian Barat mempunyai arti yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia maupun Belanda, hal ini disebabkan wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam.

3. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul Perselisihan Jakarta dan Den Haag Mengenai Status Irian Barat 1961-1963 ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Bab ini akan menguraikan tentang, latar belakang terjadinya perselisihan antara Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat, yang menjadi dasar bahwa kedua negara ini merasa berhak untuk memiliki wilayah tersebut.
- Bab III Bab ini akan menjelaskan mengenai proses terjadinya perselisihan antar Jakarta dan Den Haag, yang berisikan perjanjian maupun perdebatan mereka mengenai status Irian Barat.
- Bab IV Bab ini akan menguraikan mengenai, dampak perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

LATAR BELAKANG PERSELISIHAN JAKARTA DAN DEN HAAG

A. Letak Geografis

Menurut John RG Djopari (1995:23) letak geografis Irian Barat, sebelah selatan berbatasan dengan laut Arafura, propinsi Maluku, di sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Gunea, dan sebelah barat berbatasan dengan Lautan Pasifik dan sebagian propinsi Maluku. Luas wilayah Papua secara keseluruhan kurang lebih 410.600 kilo meter persegi atau dua lebih luas dari luas pulau Jawa.¹⁶

Irian Barat atau yang saat ini lebih dikenal dengan Papua adalah salah satu pulau bagian dari Indonesia. Istilah Papua mengacu pada pengertian tanah Papua yang secara administratif terdiri atas propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. Papua Bagian Utara, Barat dan Selatan berada di bawah pengaruh kekuasaan kesultanan Tidore pada periode 1453-1890 (Alua 2006:8).¹⁷ Kesultanan Ternate mengakui kekuasaan kesultanan Tidore atas Papua pada abad ke-16 (Kamma 1981:6). Secara resmi Belanda menguasai tanah Papua sejak Traktat London tahun 1824 dan pendirian Fort du Bus di Teluk Triton pada 24 Agustus 1828.¹⁸

Walaupun sebagian besar catatan di Departemen Luar Negeri A.S. menyebut bagian Barat Pulau Papua sebagai “West New Guinea” wilayah

¹⁶ *Ibid.* Sendius Wonda, hlm. 30-31.

¹⁷ Muridan S. Widjojo, dkk. *Papua Road Map*, Jakarta, yayasan obor Indonesia, 2005, hlm. 3.

¹⁸ Muridan .dkk, *Op.cit.*, hlm. 3.

tersebut juga dikenal dengan nama-nama lain. Belanda menyebutnya “Nugini Belanda”. Tidak lama setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menyebutnya sebagai “Irian Barat”, dan kemudian “Irian Jaya”.¹⁹ Sebagaimana kita tahu, berbeda dari kebanyakan penduduk Indonesia yang berasal dari ras mongoloid, penduduk asli Irian Barat adalah orang Papua suatu ras Negro-Melanesia yang datang ke pulau tersebut pada periode awal perpindahan bangsa-bangsa. Mengingat kecilnya persinggungan dengan dunia luar pertengahan abad keduapuluh, banyak penduduk asli Papua masih hidup dalam kondisi yang relatif sederhana.²⁰

B. Perkembangan Perselisihan Jakarta dan Den Haag

Pada tahun 1883, Pulau Papua Nugini dibagi menjadi tiga bagian. Belanda menuntut bagian baratnya, sementara bagian timurnya menjadi Papua Nugini Jerman, di bagian utara Inggris dan juga bagian selatan. Tidak lama kemudian pada tahun 1884, Jerman mengambil alih Nugini-Belanda bagian utara (lihat lampiran 1). Jadi, dengan besarnya perhatian pihak lain telah mendorong Belanda agar lebih memperhatikan wilayah koloninya ini.²¹ Belanda mulai melakukan eksplorasi besar-besaran pada tahun 1898.²²

Perselisihan antara Belanda dan Indonesia mengenai kepemilikan Irian Barat berlangsung terus sampai Belanda menyerahkan daerah

¹⁹*Op.cit.*, hlm.4.

²⁰Baskara T. Wardaya, *Indonesia Melawan Amerika*, Yogyakarta, Galang Press, 2008, hlm. 236.

²¹Pim Schoorl, *Belanda di Irian Jaya*, Jakarta, Garba Budaya, 2001, hlm. 3.

²²Informasi pertama tentang Nugini-Belanda dalam beberapa sumber terdapat dalam kitab Negara Kartagama. Sewaktu VOC datang ke Maluku ternyata disana sudah dikuasai oleh Sultan Tidore atas sebagian wilayah Papua. (*Ibid.*Pim Schoorl, hlm.1).

jajahannya itu pada tahun 1963. Meskipun Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945, mereka tidak berhasil menuntut Irian Jaya sampai referendum yang disponsori oleh PBB dilaksanakan pada tahun 1969.²³ (lihat gambar peta pada lampiran 3)

Konferensi Meja Bundar 1949 merupakan awal perkembangan perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat. Konferensi Meja Bundar sendiri diadakan untuk pengalihan kekuasaan Hindia-Belanda kepada Indonesia Serikat. Namun dalam pengalihan itu Belanda tidak menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Indonesia, dengan alasan penduduk Irian Barat dianggap berbeda dengan penduduk Indonesia lainnya. Indonesia yang dari awal mengharapkan agar dalam penyerahan itu Belanda menyerahkan seluruh wilayah Hindia-Belanda, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Masalah inipun terus berlanjut. Indonesia menuntut agar Belanda mau menyerahkan Irian Barat tanpa syarat apapun.²⁴ Perselisihan mereka yang awalnya internal kemudian berkembang sampai ke tingkat internasional.

Perselisihan mengenai status Irian Barat terus berlanjut sejak Konferensi Meja Bundar tahun 1949 sampai dengan perjanjian New York tahun 1962. Dalam beberapa dekade Indonesia maupun Belanda memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah status politik Irian Barat. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Indonesia untuk membawa masalah ini ke tingkat internasional sejak awal tahun 1950.

²³ Sabine Kuegler, *Jungle Child Rinduku pada Rimba Papua*, Jakarta, Erlangga, 2006, hlm. 380.

²⁴ Sebab dalam kenyataannya bahwa Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, Sukarno segera menemukan suatu landasan untuk melanjutkan kampanye lamanya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Untuk membebaskan Irian Barat yang juga untuk kepentingan negara Indonesia. (Bernhard Dahm. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta, LP3ES, 1966, hlm. 402).

1) Usaha kabinet Natsir 1950

kabinet Natsir membuka perundingan dengan Belanda pada bulan Desember 1950. Namun tidak berhasil hal ini terjadi karena Belanda masih tetap pada pendiriannya dan bahkan Belanda mengadakan provokasi dengan memperkuat pertahanannya di Irian Barat. Dengan kegagalan ini Kabinet Natsir memberikan penjelasan yang isinya:

- a. Republik Indonesia tetap mempertahankan tuntutan atas Irian Barat sebagai bagian dari pada daerah wilayah Irndonesia
- b. Status Irian Barat yang menurut KMB seharusnya dilangsungkan dengan persetujuan Indonesia, ternyata dilangsungkan tanpa persetujuan Indonesia.

Pada pertengahan bulan Agustus 1952 Belanda dengan persetujuan parlemennya secara unilateral memasukkan dengan resmi wilayah Irian Barat ke dalam wilayah kerajaannya dengan cara merubah konstitusinya. Ini dilakukan tanpa pemberitahuan dan perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia.

2) Usaha Kabinet Ali I 1954

Dalam usaha kedua ini Indonesia tetap menggunakan jalur diplomasi dengan berusaha menarik perhatian pihak internasional terhadap masalah status Irian Barat yang oleh Belanda dianggapnya sebagai Internal-question. Untuk pertama kalinya masalah status Irian Barat di bawah ke sidang umum PBB ke-IX. Dalam pertemuan ini diadakan pemungutan suara mengenai Irian Barat. Hasilnya Indonesia tidak berhasil

memperoleh suara mayoritas. Indonesia mengalami kegagalan dalam kesempatan ini, walaupun demikian setidaknya Indonesia telah mendapatkan dukungan dari beberapa negara yang hadir dalam sidang umum PBB.

3) Usaha Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956

Untuk kedua kalinya masalah status Irian Barat dibawa dalam sidang Umum PBB yang ke-X dan hasilnya pun tidak memuaskan, karena persidangan itu hanya sekedar memberi harapan agar perundingan Indonesia-Belanda yang akan dilangsungkan di Jenewa berhasil.

Dalam kesempatan itu pihak Belanda bersedia untuk berunding dengan Indonesia dengan syarat “pembicaraan tentang beberapa masalah mengenai status Irian Barat, dengan pengertian bahwa perihal kedaulatan, masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya”. Dari pernyataan Belanda ini jelas bahwa Belanda hanya bersedia untuk membahas masalah lain selain penyerahan atas kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia.

4) Usaha Kabinet Ali II 1956

Pada tanggal 3 Mei 1956 Kabinet Ali II mengambil sikap yang lebih tegas dari kabinet-kabinet sebelumnya, yaitu dengan membubarkan keseluruhan perjanjian KMB. Dengan sikap yang diambil oleh Indonesia ini maka Belanda mulai merasa terancam dan mulai mencari dukungan dari negara-negara Eropa, akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena

beberapa negara memilih diam dan bersikap netral²⁵. Pihak Belanda menganggap Indonesia telah melanggar perjanjian dan hukum internasional dari tindakannya ini, karena Indonesia secara unilateral telah membatalkan perjanjian KMB.²⁶

Pihak Indonesia harus memberikan konsensi-konsensi pula dalam dua masalah yang paling sulit. Belanda tetap mempertahankan kedaulatan atas Papua sampai pada perundingan-perundingan lebih lanjut mengenai status wilayah tersebut. RIS memikul tanggung jawab atas hutang Hindia Timur Belanda, yang setelah terjadi banyak tawar-menawar, ditetapkan sebesar 4,3 milyar gulden. Sebagian besar dari jumlah ini sebenarnya merupakan biaya yang dipakai oleh pihak Belanda dalam usahanya menumpas revolusi.²⁷

Indonesia yang mulai jenuh dengan sikap Belanda pun mulai mengambil langkah tegas yaitu; 1) memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan mempersiapkan pasukan untuk menyelesaikannya melalui jalur konfrontasi militer; 2) mengesahkan undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tahun 1958; 3) menghapus hutang, yang sebelumnya tanggal 4 Agustus 1956 Indonesia telah membatalkan hutang-hutang kepada Belanda sebesar 3,661 milyar

²⁵Baharuddin Lopa, *Jalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*, Jakarta, Daja Upaja, 1962, hlm. 56-63.

²⁶<http://sejarah-indonesia.co.cc/home/daftar-isi/demokrasi-terpimpin/perjuangan-pembebasan-irian-barat>. diakses pada tanggal 12 November 2010.

²⁷M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Serambi, 2008, hlm. 466.

gulden;²⁸ dan 4) Indonesia kemudian membentuk organisasi massa yaitu; Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada tahun 1949.²⁹

Para pendiri Indonesia memang telah mengambil langkah tegas dalam mengakhiri imperialisme di Indonesia. Namun hal ini telah menimbulkan perbedaan paham di kalangan pemimpin-pemimpin rakyat yang mengalami puncak krisisnya di dewan konstituante yang tidak membawa hasil dalam menentukan haluan negara. Dalam situasi seperti ini Belanda dapat secara mudah memanfaatkan situasi. Selain itu keadaan ini juga membahayakan kesatuan dan tujuan bersama untuk menjadi negara yang merdeka bebas dari penjajahan. Sehingga kemudian dicetuskan dekrit Presiden dengan kembali ke Undang-undang 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini disusul dengan penegasan haluan negara pada tanggal 17 Agustus 1959. Dengan demikian pemerintahan dan pemimpin negara kembali langsung dipegang oleh Presiden sebagai Perdana Menteri.³⁰

²⁸ Hubungan dengan negeri Belanda terus memburuk, terutama karena penolakan pihak Belanda untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia. Pada tanggal 4 Agustus 1956, kabinet Ali secara sepihak menolak mengakui hutang sebesar 3.661 milyar gulden di bawah perjanjian Meja Bundar, 85% dari jumlah yang disepakati pada tahun 1949, atas dasar pemikiran bahwa pembayaran hutang tersebut merupakan biaya perang Belanda untuk melawan revolusi. (*Ibid*, Ricklefs, hlm. 498).

²⁹ <http://www.tempo.co.id/harian/fokus/23/2,1,5,id.html>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2010.

³⁰ *Ibid*. Baharuddin Lopa, hlm. 56-75.

C. Perbedaan Kepentingan Penyebab Perselihan Jakarta dan Den Haag

1. Kepentingan Belanda di Irian Barat

Berbeda dengan pulau lain yang ada di Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda, Irian Barat termasuk wilayah yang terakhir dari masanya di Asia Tenggara. Wilayah ini termasuk yang terakhir dikuasai Belanda sebab selama masa penjajahan di Indonesia, Belanda hanya fokus di Jawa Irian Barat tidak mendapat perhatian khusus dari Belanda seperti halnya Jawa, karena hutannya yang begitu luas dan jalur transportasi yang sulit untuk dijangkau, Belanda lebih fokus di pulau Jawa baik dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan bidang lainnya.

Dalam periode 1944 hingga 1949 dengan taruhan besar diusahakan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Kekacauan akibat perang dan keterbatasan sarana menyebabkan yang dapat dikerjakan terbatas pada meletakkan dasar pemerintahan dan membangun prasarana yang mutlak, “pembangunan seadanya”. Mengenai periode Van Eechoud, Lagerberg menyatakan, “..., jasanya terutama menyadarkan orang Papua akan kemampuan sendiri, dan usahanya mengarahkan kebijakan pemerintahan agar bertolak dari orang Papua sendiri” (Lagerberg 1962:51). Dalam periode berikutnya (1950-1962), ternyata Belanda semakin banyak mengeluarkan dana untuk pembangunan Nugini-Belanda. Kesanggupan ini jelas berhubungan dengan konflik tentang kedaulatan Nugini-Belanda dengan pihak Indonesia dan menginternasionalnya konflik tersebut.

Berikut adalah mengenai angka pengeluaran, sarana dan subsidi Belanda untuk Nugini-Belanda:³¹

Tahun	Pengeluaran	Sarana	Bantuan Negara
1950	f 36.224.461	f 20.652.362	f 15.572.099
1961	f 156.114.400	f 64.591.400	f 91.523.000

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Belanda tidak begitu saja menerima dan mengakui kemerdekaan Indonesia, karena menganggap Indonesia masih berada di bawah kekuasaannya dan tidak ingin melepaskan Indonesia begitu saja. Salah satu bentuk ketidakrelaannya adalah serangan kedua Belanda pada tahun 1949. Bukti ini menunjukkan bahwa Belanda tidak ingin Indonesia merdeka, karena dari segi ekonomi Belanda masih tergantung kepada Indonesia. Selain itu, Belanda juga ingin mempertahankan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara.

Dalam Konferensi Meja Bundar 1949, Irian Barat tidak dimasukkan dalam penyerahan kedaulatan kepada Indonesia dengan alasan; karena secara etnis, kultur maupun religius Irian Barat sama sekali berbeda dari wilayah-wilayah lain dari kepulauan Indonesia.³² Dengan

³¹ Pim Schoorl, *Op.cit.*, hlm. 4-5.

³² Belanda tetap mempertahankan Irian Barat, dengan pandangan bahwa perbedaan antropologis antara orang Papua dengan suku-suku bangsa lainnya di kawasan Nusantara; tugas Belanda sebagai pendidik yang harus mengantar suku Papua keluar dari “zaman batu” menurut mereka potensi daerah itu untuk dijadikan tempat pemukiman orang-orang Indo-Belanda; kepentingan-kepentingan misi dan zending—sebenarnya hanya menutupi kenyataan bahwa inti persoalan—sebenarnya hanya kepentingan politis. Tidak hanya itu Belanda juga mempertahankan Irian Barat karena kepentingan ekonomi, dikatakan bahwa di Irian Barat orang Jepang telah

mengutip perjanjian Linggarjati dan Renville, delegasi Indonesia menegaskan bahwa tuntutan Belanda itu tidak dapat diterima. Ketika pihak-pihak yang bersengketa hampir mencapai jalan buntu terkait masalah ini, Cochran (kemudian diangkat menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk RIS) mengajukan sebuah rumusan di mana Irian Barat akan tetap berada di bawah wewenang Belanda, tetapi dalam kurun waktu satu tahun setelah peralihan kekuasaan, akan diadakan perundingan lagi untuk menentukan status final wilayah tersebut. Delegasi Indonesia terpaksa menerimanya, sekali lagi karena takut bahwa menolak usulan Cochran akan berarti hilangnya harapan untuk memperoleh bantuan ekonomi Amerika Serikat di masa mendatang.³³

Sebelumnya pada pertengahan tahun 1952, Belanda sudah lebih dulu memasukkan secara resmi wilayah Irian Barat ke dalam wilayah kerajaannya dengan cara merubah konstitusinya.

Beberapa hal yang menjadi dasar bagi Belanda untuk mempertahankan wilayah Irian Barat adalah sebagai berikut:

1. Belanda ingin tetap mempunyai pengaruh di Pasifik dengan cara mempertahankan wilayah jajahannya

menemukan tambang-tambang emas yang kaya, dan di daerah sekitar Sorong, mereka telah mendapatkan minyak yang kualitasnya sedemikian tinggi tidak perlu dikilang lagi. (Lambert Giebels, *Soekarno Biografi 1901-1950*, Jakarta, Grasindo, 2001, hlm. 484).

³³ *Ibid*, Baskara, hlm. 76.

2. Belanda ingin menjadikan wilayah Irian Barat sebagai tempat penampungan orang-orang Indonesia keturunan Belanda atau Indo-Eropa³⁴
3. Belanda ingin mengembalikan kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia
4. Belanda ingin menjadikan wilayah Irian Barat sebagai tempat untuk meneruskan tindakan subversifnya dengan tujuan untuk menghalangi revolusi Indonesia.
5. Belanda ingin membendung perkembangan komunis di Irian Barat terutama wilayah Asia Tenggara.³⁵
6. Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai simbol status Belanda sebagai negara yang masih mampu memiliki jajahan, dan
7. Untuk menggali sumber-sumber alam yang besar potensinya di wilayah tersebut³⁶

Dari segi ekonomi, Belanda melihat bahwa kekayaan bumi Irian Barat merupakan suatu modal yang tidak dapat ternilai harganya. Terutama untuk mengsucceskan penanaman modal di Irian Barat sehingga usaha eksplorasi nantinya dapat terwujud.³⁷

Di Den Haag, berlawanan dengan harapan Jakarta, pemilihan umum pada bulan Maret 1959 berakhir dengan kemenangan sebuah

³⁴Papua Barat bahkan tidak Cuma dicita-citakan sebagai tempat pemukiman kembali kaum Indo, tapi juga bagi para imigran Belanda totok dari kampung halaman mereka yang sudah terancam peledakan penduduk. (*Ibid*, Pim Schooorl, hlm. Xvii).

³⁵*Ibid*. Baharudin Lopa, hlm. 59.

³⁶*Ibid*. Baskara, hlm. 235.

³⁷Rob Agus Supriaji, *Seri Pembinaan Pengajaran Sejarah*, Yogyakarta, IkIP Sanata Dharma, Seri VIII Juli No.1. 1979, hlm. 15.

pemerintahan konservatif dibawah perdana Menteri J.E. De Quay. Kabinet ini terdiri dari koalisi partai-partai politik yang semuanya menentang perubahan kebijaksanaan Belanda, ataupun pemberian konsesi terhadap tuntutan-tuntutan Indonesia.

Dengan perkembangan situasi politik Jakarta dan Den Haag yang tidak menentu Den Haag yakin bahwa wilayah tersebut tidak akan menjadi bagian dari kekuasaannya dan semua keinginan terhadap wilayah tersebut tidak akan terwujud, maka berbagai carapun dilakukan oleh Belanda di bawah pemerintahan yang baru terbentuk.

Tujuan Belanda segera menjadi jelas. Pertama, adalah penting sekali untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dalam mempersiapkan kemerdekaan bagi Irian Barat. Prinsip menentukan nasib sendiri, yang telah dinyatakan dalam deklarasi bersama pada tahun 1957, kini merupakan prioritas yang mendesak. Percepatan proses ini didesak oleh tiga faktor, pertama, beban keuangan yang berat yang ditanggungkan Belanda dalam membiayai kawasan ini, kedua, kegagalan kawasan ini untuk menyerap imigrasi kaum Indo-Eropa, dan ketiga, keengganan Amerika Serikat untuk melihat Irian Barat sebagai unsur yang sangat penting dalam struktur pertahanannya di Asia Tenggara.³⁸

Untuk mempersiapkan kemerdekaan Irian Barat, Belanda membutuhkan peningkatan kekuatan di sana. Untuk tujuan tersebut perlu sebuah perubahan berkenaan dengan undang-undang dinas militer

³⁸ Hilman Adil, *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962*, Jakarta, Djambatan, 1993, hlm. 190.

Belanda. Kabinet De Quai mampu mendapatkan persetujuan Parlemen untuk perubahan itu, dan diluncurkan sebuah Rancangan Undang-Undang yang memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk menggunakan wajib militer demi pembangunan angkatan bersenjata. Pelaksanaan kebijakan baru ini dinyatakan dengan tibanya kapal induk *Karel Doorman* dan pasukan bala bantuan pada bulan Mei 1960.³⁹

Di bidang politik, kebijaksanaan baru itu dilanjutkan dengan terbentuknya “New Guinea Read” (Dewan New Guinea) pada awal 1961. Dewan ini merupakan bagian dari program “papuanisasi” yang dilancarkan Belanda. Pendirian sebuah partai, yaitu Partai Nasional (P.A.R.N.A), juga merupakan bagian dari skema ini. Dewan New Guinea terdiri dari enam belas anggota yang dipilih (tiga belas diantaranya orang Irian Barat), dan dua belas anggota yang ditunjuk (sepuluh diantaranya orang Irian Barat).⁴⁰

2. Kepentingan Indonesia atas Irian Barat

Apabila berbicara tentang kebudayaan, ras, religi dan letak geografis, penduduk Irian Barat memang berbeda dari penduduk Indonesia lainnya. Akan tetapi hal ini tidak menjadi alasan mendasar bagi para pendiri Indonesia untuk mundur dari perselisihan dengan Den Haag.

Menurut hukum tatanegara, suatu organisasi masyarakat dapat disebut negara bila ia telah memiliki syarat-syarat; 1) wilayah yang jelas

³⁹ Hilman, *Loc.cit.*, hlm. 190.

⁴⁰ *Ibid.* Hilman, hlm. 191.

batasnya; 2) rakyat yang menjadi pendukungnya; 3) memiliki pemerintahan nasional yang berkedaulat.

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, memang masalah batas wilayah belum jelas, sehingga di kalangan para pendiri Indonesia sendiri muncul perbedaan pandangan mengenai batas wilayah Indonesia. Mereka terbagi dalam empat golongan. Golongan pertama, dipelopori oleh Muh. Yamin-Sukarno. Golongan ini menghendaki wilayah Indonesia meliputi bekas Hindia-Belanda, Malaya, Kalimantan Utara, Timor-Timor (Timor Portugis), seluruh Irian dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Golongan kedua adalah pro-bekas Hindia-Belanda, dipelopori oleh Sumitro Kolopaking dan Agus Salim. Golongan ini menghendaki agar wilayah Indonesia adalah bekas Hindia Belanda saja. Golongan ketiga; dipelopori oleh Hatta, menghendaki wilayah Indonesia adalah bekas Hindia-Belanda ditambah Malaya dan dikurangi Irian, dengan dasar pertimbangannya penduduk dari wilayah tersebut memang dari ras dan kebudayaan yang sama dan penduduk Malaya memang berkeinginan bersatu dalam Indonesia. Bung Hatta belum yakin betul bahwa penduduk Irian sekeluarga dengan penduduk Indonesia lainnya. Sementara golongan terakhir adalah golongan bebas dengan pelopornya Sanusi, menghendaki penentuan batas wilayah dipecahkan kemudian. Biarkan rakyat dari berbagai daerah menyatakan keinginannya dalam suatu plebisit nanti setelah keadaan tenang. Untuk menentukan mana yang harus diambil,

maka diadakan pemungutan suara dan dari 66 anggota yang hadir, golongan Soekarno yang menang dengan 39 suara.⁴¹

Dengan demikian golongan Soekarno yang menang, dan oleh karena itu salah satu agenda penting selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk merebut wilayah-wilayah bekas jajahan Hindia-Belanda yang masih dikuasai oleh Belanda untuk menjadi bagian dari Indonesia Serikat pada saat itu. Pertama dengan mencari dukungan dari rakyat Indonesia dan para pendiri Indonesia lainnya agar keinginan mereka untuk merebut wilayah-wilayah yang dimaksud dapat tercapai. Salah satu wilayahnya adalah Irian Barat, menjadi agenda pertama sebelum Malaya.

Pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda memberikan pengakuannya atas kemerdekaan Indonesia dengan mengalihkan kekuasaan kolonialnya atas Hindia Belanda kepada pemerintahan baru Republik Indonesia Serikat. Namun pengalihan kekuasaan ini tidak mencakup Irian Barat, yakni paro Barat pulau Papua.⁴²

Menurut pemerintahan Belanda waktu itu, walaupun wilayah ini adalah bagian dari Hindia-Belanda, secara etnis, budaya dan religius masyarakatnya berbeda dari penduduk Indonesia lainnya. Indonesia menganggap keputusan Belanda ini berarti menempatkan wilayah itu di bawah kekuasaan ekspansionis pemerintah Indonesia, yang tidak disebutkan oleh pemerintah Belanda tentu saja adalah keinginan untuk

⁴¹ G. Moejanto, *Dari Pembentukan Pax Neerlandica Sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 280-282.

⁴² ... *Api Pembebasan Irian Barat*, Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Jakarta 1986, hlm. 131.

menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat untuk menampung warga Belanda atau Indo-Eropa yang akan segera kehilangan tempat mereka di daerah-daerah yang kini dikuasai oleh Indonesia. Tak disebutkan pula maksud untuk menjadikan Irian Barat simbol status Belanda sebagai negara yang masih mampu memiliki jajahan, berikut hendak untuk menggali sumber-sumber alam yang besar potensinya di wilayah tersebut.

Indonesia menerima pengalihan kekuasaan yang parsial tersebut, namun dengan pengertian bahwa administrasi atas wilayah tersebut akan dibahas di PBB dan bahwa Irian Barat nantinya akan “dikembalikan” kepada Indonesia sebagai bagian integral dari Indonesia Serikat. Pihak Indonesia bersikukuh bahwa sejak jaman kolonial secara konstitusional Irian Barat selalu berada di bawah kekuasaan Hindia-Belanda dan oleh karena itu, Indonesia menuntut supaya wilayah tersebut tidak dipisahkan dari Indonesia merdeka. Ketika mempertahankan tuntutannya, Belanda mengusulkan supaya rakyat Irian Barat nantinya diperbolehkan menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri. Di balik usulan itu Belanda berharap bahwa rakyat Irian Barat akan menolak untuk disatukan dengan bagian-bagian lain dari bekas koloninya.⁴³ Dari segi ekonomi ikut memperkuat tuntutan Indonesia atas Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia sebab perekonomian Indonesia pada saat itu sedang mengalami krisis.

⁴³ *Ibid.* Baskara, hlm. 235-236.

D. Keterlibatan Negara Asing dalam Perselisihan Jakarta-Den Haag

1. Amerika Serikat

Dunia bebas! Itulah semboyan Amerika Serikat. “*men are created equal*”! manusia diciptakan dengan derajat yang sama! Begitulah ajaran Thomas Jefferson dalam deklarasi kemerdekaan Amerika. Dengan dalih itu Amerika Serikat melibatkan diri di berbagai dunia.

Sampai dengan tahun 1949 Amerika masih berpendapat, bangsa Indonesia masih belum siap untuk merdeka. Perkembangan seperti yang dipikirkan A.S, yaitu negara Indonesia yang siap berpartisipasi dalam pengembangan hubungan internasional, khususnya perniagaan belum terlihat.

Amerika juga tidak ingin menyakiti negara-negara Barat, sehingga tidak mau mencampuri urusan negara-negara Barat di tanah jajahan mereka. Amerika tetap mementingkan ikatan persekutuannya dengan negara-negara Barat. Namun Amerika juga tidak ingin keyakinannya akan prinsip kebebasan untuk menuju dunia bebas yang damai diingkari. Karena itu, sesudah Perang Dunia pertama, dengan Liga Bangsa-Bangsa Amerika memprakarsai berdirinya lembaga mandat dan sesudah perang dunia kedua, PBB dan Amerika Serikat memprakarsai lembaga perwalian.⁴⁴

⁴⁴ Keterlibatan Amerika Serikat dalam politik internal Indonesia sebenarnya sudah dimulai tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keterlibatannya itu khususnya berlangsung ketika pihak Indonesia dan Belanda sedang melakukan berbagai bentuk negosiasi berkaitan dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan serta penetapan batas-batas wilayah negara baru Indonesia. (Baskara T. Wardaya, *Bung Karno Menggugat*, Yogyakarta, Halangpress, 2008, hlm. 78).

Amerika juga memandang pemberian kemerdekaan oleh negara penjajah makin dipandang tepat dan penting setelah jelas dunia terbagi dalam dua blok yaitu; Blok Barat (Amerika) dan Blok Timur (Rusia) yang ternyata diwarnai dengan ketegangan dalam Perang Dingin. Dengan pemberian kemerdekaan yang sengaja dipersiapkan, negara-negara bekas jajahan akan tetap memelihara hubungan baik dengan negara-negara Barat. Jadi, pelepasan jajahan justru memperkuat Blok Barat sendiri.

Sesuai dengan kerangka berfikir di atas, maka ketika hubungan Indonesia dan Belanda tidak dapat dipecahkan dan adu kekuatan antara Indonesia dan Belanda tidak dapat dihindari, Amerika berada persimpangan jalan. Kepada pihak Belanda Amerika ingin mempertahankan kesetiakawannya, tetapi kepada pihak Indonesia Amerika juga ingin memperlihatkan diri sebagai negara yang berpegang pada prinsip kebebasan. Dalam rumusan sederhana dapatlah dikatakan bahwa Amerika Serikat mencoba untuk bersikap netral! Karena itu ketika PBB turun tangan untuk meleraikan pertikaian Belanda-Indonesia, hanya karena diminta oleh dua negara yang telah dipilih dengan baik. Dalam anggota ini wakil Amerika tetap bersikap netral. Walaupun bersikap netral terhadap dua negara yang berselisih Amerika ingin sungguh-sungguh menjadi penengah yang baik. Tetapi justru karena itu dari sudut pandang Indonesia, Amerika dinilai memihak Belanda. Sebaliknya, dari sudut

pandang Belanda menganggap bahwa Amerika berpihak kepada Indonesia.⁴⁵

Ketika KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949, Amerika Serikat sangat berharap bahwa Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag akan menghasilkan penyelesaian yang tuntas atas konflik Indonesia-Belanda. “A.S. sangat berkepentingan dengan hasil akhir dari kontroversi ini dan pada kesepakatan damai yang dicapai di Den Haag,” ungkap Menteri Luar Negeri A.S. Dean Acheson kepada delegasi Amerika dalam konferensi itu. Acheson melanjutkan, sebaliknya gagalnya konferensi itu akan membahayakan kebijakan Perang Dingin A.S. Katanya: “kecuali bahwa suatu penyelesaian damai yang baik, yang hingga batas-batas tertentu memberi ruang bagi aspirasi Indonesia, disepakati oleh kedua pihak (yang berseteru), Asia Tenggara dan Indonesia akan menjadi lebih rentan terhadap ekspansi komunis.” Di luar itu semua tampak bahwa Menteri Luar Negeri A.S. tersebut benar-benar ingin mendukung perjuangan Indonesia, sekaligus berharap bahwa sebuah negara Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka akan lahir dari Konferensi Den Haag. Dia juga mengharapkan bahwa struktur dan jalannya roda pemerintahan Indonesia nantinya akan ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri, dan bukan oleh pihak lain.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.* G. Moejanto, hlm. 404-405.

⁴⁶ Ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dengan cepat menyeruak masuk kedalam “rumah” Indonesia dan turut membuat dinamika politik di Indonesia menjadi centang-perentang. (*Ibid.* Baskara Bung Karno Menggugat, hlm. 16).

Dalam kaitannya dengan soal kehadiran A.S. dalam KMB, Menteri Acheson menetapkan sebuah pedoman yang mengatur bahwa perhatian utama Amerika adalah “membantu memastikan bahwa tidak ada sesuatupun yang menghalangi terlaksananya negosiasi yang cepat,” yang tujuannya adalah peralihan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia. Namun demikian, dalam kenyataannya selama konferensi berlangsung, perwakilan Amerika Merle Cochran melangkah lebih jauh dari pedoman tersebut dengan maksud melindungi posisi Belanda. Tindakan ini menjadi sangat kentara ketika konferensi tersebut nyaris menemui jalan buntu soal pengalihan tanggung jawab hutang kolonial, bentuk Uni-Indonesia Belanda, dan status Irian Barat.

Mengenai masalah status Irian Barat, Belanda bersikeras supaya wilayah ini tidak diikutsertakan didalam proses peralihan kekuasaan. Alasannya, karena secara etnis, kultur maupun religius Irian Barat sama sekali berbeda dari wilayah-wilayah lain dari kepulauan Indonesia. Dengan mengutip perjanjian Linggarjati dan Renville, delegasi Indonesia menegaskan bahwa tuntutan Belanda itu tidak dapat diterima. Ketika pihak-pihak yang bersengketa hampir mencapai jalan buntu terkait masalah ini, Cochran mengajukan sebuah rumusan di mana Irian Barat akan tetap berada di bawah wewenang Belanda, tetapi dalam kurun waktu satu tahun setelah peralihan kekuasaan akan diadakan perundingan lagi untuk menentukan status final wilayah tersebut. Delegasi Indonesia terpaksa menerimanya, sekali lagi karena takut bahwa menolak usul Cochran

akan berarti hilangnya harapan untuk memperoleh bantuan Amerika di masa mendatang.

Setelah diambil kesepakatan diatas, pada tanggal 2 November 1949 delegasi Belanda, Republik Indonesia, dan negara-negara boneka buatan Belanda (BFO) menandatangani perjanjian Den Haag yang menetapkan bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan atas bekas koloninya (kecuali Irian Barat) kepada Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 27 Desember 1949, dalam sebuah upacara bersamaan dilaksanakan di Jakarta dan Den Haag, dilakukan peralihan kekuasaan secara resmi dari Belanda kepada Indonesia.⁴⁷

Ketika Dwight D. Eisenhower mengawali masa tugasnya, pemerintahannya melanjutkan kebijakan Perang Dingin melawan Kubu Komunis Sino-Soviet warisan pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan presiden Truman. Upaya membendung laju penyebaran komunis di dunia tetap menjadi prioritas kebijakan Luar Negeri Amerika di bawah Prsiden Eisenhower. Namun demikian, berbeda dengan pemerintahan Truman, pemerintahan Eisenhower dengan tegas memandang sikap netral dalam percaturan internasional tidak dapat diterima. Kebijakan yang ditempuh pemerintahan Eisenhower ingin mencakup kekuatan militer. Lebih dari itu, Eisenhower dan pemerintahannya ingin secara eksplisit memperluas jangkauan geografis

⁴⁷ *Ibid.* Baskara, hlm. 73-28.

kebijakan Amerika hingga menjangkau kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

Tidak ingin mengulangi kegagalan pemerintahan Truman pada tahun 1952 dalam upayanya untuk menarik Indonesia ke pihak Amerika, pemerintahan Eisenhower berusaha menghindari campur tangan yang tidak perlu atas politik dalam negeri Indonesia.⁴⁸ Para pejabat pemerintahan Eisenhower lebih ingin mengikuti dengan saksama rekomendasi Duta Besar Amerika untuk Indonesia dari masa pemerintahan sebelumnya, yakni Merle Cochran, yang sesaat sebelum mengakhiri tugasnya sempat berpesan:

“Kita perlu menunjukkan sikap sabar penuh pengertian, meskipun memang perlu juga sikap tegas. Itu semua penting, kalau kita memang ingin ... membantu Indo(nesia) yakni kini sedang berusaha sungguh-sungguh untuk memahami posisi kita sebagai Negara adi kuasa. Kita tidak boleh terlalu memaksa Indonesia agar masuk ke kubu kita. Terhadap keinginan macam itu kita mesti selalu mempertimbangkan untung/ruginya”.⁴⁹

Berdasarkan peringatan macam itu pemerintahan Eisenhower menganut garis politik non-intervensi terhadap Indonesia. Eisenhower dan orang-orangnya percaya bahwa selama masih mengandalkan negara-negara Barat sebagai patner dagang utamanya, Indonesia tidak akan gampang terbuju untuk mengikuti kubu Soviet. Garis politik non-intervensi itu tercermin dalam sikap pemerintahan Eisenhower terhadap masalah Irian Barat. Sebagaimana diketahui, pemerintahan RI menentang

⁴⁸ Motivasi utama Amerika Serikat adalah untuk mengusahakan agar Belanda tetap menguasai Indonesia untuk menjamin kepentingan barat dan membendung laju perkembangan pengaruh Uni Soviet dan Cina yang komunis. (*Ibid.* Baskara *Bung Karno Menggugat*, hlm. 136).

⁴⁹ Baskara, *Op.cit.*, hlm. 97.

ketetapan Konferensi Meja Bundar Den Haag bahwa Belanda memiliki hak untuk menguasai wilayah tersebut. Indonesia mengklaim bahwa Irian Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Republik dan oleh karena itu Irian Barat harus “kembali ke pangkuan Pertiwi”. Ketika bung Karno meminta dukungan Amerika untuk klaim tersebut, pemerintahan Eisenhower menolak. Amerika mengambil posisi resmi netral. Demikian juga ketika pemerintah Indonesia membawa kasus tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintahan Eisenhower memilih untuk bersikap abstain dalam pemungutan suara untuk menentukan apakah kasus Irian Barat akan dimasukkan dalam agenda Majelis Umum PBB atau tidak.⁵⁰

Sikap netral tidak bertahan lama, ketika pemerintahan Kennedy mengawali masa tugasnya pada bulan Januari 1961, perselisihan Jakarta dan Den Haag atas Irian Barat sudah berkembang menjadi sebuah krisis internasional. Pemutusan hubungan diplomatik Indonesia-Belanda secara sepihak yang dilakukan Presiden Sukarno pada tahun 1960 mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan menggunakan kekuatan militer. Bagi pemerintahan Kennedy peningkatan ketegangan politik dan militer itu menghadirkan sebuah dilema.⁵¹ Pada satu sisi, Washington ingin menerapkan politik anti-kolonial dan menunjukkan rasa simpati kepada bangsa-bangsa Non-Blok yang baru

⁵⁰ Baskara, *Op. cit.*, hlm. 95-98.

⁵¹ Proyek Kennedy melancarkan suatu proyek yang dikenal dengan *peace corps* (korps perdamaian), untuk memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang untuk perdamaian dunia, anggotanya terdiri dari tenaga sukarelawan yang berasal dari negara-negara berkembang maupun maju. (____ *Garis-garis Besar Sejarah Amerika*, Jakarta, PT. Gunung Agung, hlm. 199).

merdeka seperti Indonesia. Pada sisi lain, Amerika tidak ingin merusak hubungan baik antara Amerika dan Belanda yang merupakan salah satu sekutu penting Amerika dalam pakta pertahanan NATO guna mempertahankan Eropa Barat.⁵²

Pemerintahan Kennedy ini menjadi awal perubahan mengenai kebijakan politik Amerika Serikat terhadap negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia yang sebelumnya selalu mengambil sikap netral mulai terbuka dan melihat masalah Irian Barat dengan sudut pandang yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.⁵³

Perubahan politik Amerika Serikat dapat di lihat dalam dua tahap. Pertama, pada waktu kemerdekaan Indonesia, mula-mula Amerika Serikat mendukung Belanda. Kedua, mengenai status Irian Barat, Amerika Serikat nampaknya mendukung Indonesia.

2. Australia

New Guinea adalah fokus besar pertama antara Australia-Indonesia. Pada tahun 1950 pemerintah Menzies menegaskan bahwa Australia memiliki kepentingan strategis yang penting pada masa depan administrasi New Guinea Barat.⁵⁴ Secara geografis negara ini terletak berdekatan dengan Asia Tenggara. Dengan keadaan seperti ini maka Australia sangat peduli dengan persoalan yang terjadi, maka tidak heran

⁵² *Ibid.* Baskara, hlm. 237.

⁵³ Amerika mulai takut apabila Komunis berkembang di Indonesia. Sebab antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terjadi persaingan ideologi. (A.K. wiharyanto. *Sejarah Kerja Sama Asia Tenggara*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 2.

⁵⁴ Richard Chauvel, dkk. *Indonesia–Australia Tantangan dan Kesempatan Dalam Hubungan Politik Bilateral*, Jakarta, Granit, 2005, hlm. 62.

apabila Australia mencoba untuk mendukung Belanda ataupun Indonesia, ini dilakukan demi kepentingan keamanan dalam negerinya.

Keterlibatan Australia dalam masalah Irian Barat baik di pihak Belanda maupun Indonesia, bisa dikatakan tidak tetap. Australia sebelumnya mendukung dan menjadi mitra yang baik dengan Hindia-Belanda karena memang Inggris juga mempunyai hubungan yang erat dengan Belanda pada saat itu. Hal ini tidak lepas dari sikap netral Belanda dalam politik luar negerinya, serta kedudukan Inggris yang pada saat itu masih kuat di Malaysia, sehingga Australia tidak perlu khawatir akan serangan dari luar. Dengan sikap seperti ini Australia kurang memperhatikan situasi politik yang berkembang di Indonesia dan hanya memperhatikan keberadaan Belanda.

Pandangan Australia di atas kemudian berubah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan berjuang untuk mempertahankannya. Rakyat Australia memberikan rasa simpati dan dukungan terhadap rakyat Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan moral yang sangat berarti bagi Indonesia. Tidak hanya itu, ketika Belanda melakukan agresi militernya yang kedua di Indonesia, Australia tetap memberikan dukungan kepada Indonesia, hingga tahun 1949 Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Salah satu negara yang memberikan penghargaan yang besar adalah Australia.⁵⁵

⁵⁵ Awal 1959 dan 1961, pemerintah Australia melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan hubungannya dengan Indonesia. Langkah-langkah kearah ini adalah: mengundang Menteri Luar Negeri Subandrio untuk mengunjungi Australia pada bulan Februari 1959, kunjungan

Sementara itu pemerintah Australia bersama pemerintah India pada tanggal 31 Juli membawa persoalan Indonesia (masalah status Irian Barat) ke Dewan Keamanan. Berdasarkan keadaan internasional dan juga untuk mengatasi keengganan Republik untuk melakukan perundingan-perundingan baru maka pemerintah Belanda memutuskan mengikuti seruan Dewan untuk menghentikan tembak-menembak dan mengusahakan sesuatu pengaturan secara damai. Aksi militer itupun dihentikan pada tanggal 4 Agustus 1949. Dengan adanya dukungan dewan, maka Indonesia merasa dirinya diperkuat dan dari pihaknya taktik gerilyanya diteruskan.⁵⁶

Pandangan Australia terhadap Indonesia ini tidak bertahan lama. Pada 1950, ketika Menzies dari partai liberal mengambil alih pemerintahan terjadi perubahan pandangan Australia terhadap Indonesia. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa Indonesia negara yang agresif dan ekspansionis mengenai Irian Barat.⁵⁷

Pada tanggal 16 Februari 1949, Menteri Luar Negeri Australia Spender, pernah berbicara panjang tentang sikap pemerintah Cliley terhadap Indonesia. Ia mengatakan bahwa langkah yang ditempuh pemerintah dapat membahayakan *white Australia policy*. Ia juga menuduh bahwa Republik Indonesia adalah hasil kolaborasi politik dengan Jepang, yang kemudian ingin menjatuhkan kekuasaan kulit putih di Indonesia.

Perdana menteri Menzies ke Jakarta pada bulan Oktober 1959; dan Muhibah Jendral A.H. Nasution ke Australia pada bulan April 1961. (*Ibid.* Hilman Adil, hlm. 181).

⁵⁶C. Smit, *Dekolonisasi Indonesia*, Jakarta, Daya Sarana, 1986, hlm. 26.

⁵⁷ Hubungan yang baik antara Australia dengan Indonesia yang telah dibina dari tahun 1947-1049 nampaknya mengalami perubahan pada awal tahun 1950-an karena masalah Irian Barat. (Hadi Soebadio. *Keterlibatan Australia dalam pemberontakan PRRI/Permesta*, Jakarta, TP Gramedia, hlm. 163).

Sedangkan masalah Irian Barat Spender berusaha untuk membatalkan usaha-usaha penyelesaiannya.

Pada tahun 1950, Spender mengatakan bahwa; wilayah kepulauan yang paling berdekatan dengan Australia (maksudnya adalah Irian Barat), merupakan lingkaran pertahanan terakhir Australia, terhadap kemungkinan-kemungkinan serangan dari luar. Karena itu Australia sangat berkepentingan dengan wilayah Irian Barat dan segala perubahan yang terjadi di sana.

Australia mengajukan empat alasan menentang tuntutan Indonesia atas Irian Barat antara lain sebagai berikut:⁵⁸

1. Secara geografis, Irian Barat tidak dapat dikatakan bagian dari wilayah Indonesia, karena wilayah ini berdekatan dengan Australia.
2. Segi ras dan kebudayaan, orang Irian Barat bukan merupakan bagian dari suku bangsa Indonesia. Mereka lebih mempunyai kesamaan dengan penduduk Irian Timur.
3. Segi pembangunan sosial ekonomi, penduduk Irian Barat lebih rendah daripada penduduk Indonesia umumnya, secara historis tidak ada hubungannya dengan kepulauan lain di Indonesia.
4. Secara yuridis pemerintahan Australia menyatakan bahwa status Irian Barat belum dapat ditentukan, sejak KMB gagal memecahkan masalah.

⁵⁸ Hadi Soebadio, *Op. cit.*, hlm. 166.

Di Belanda (1950), Spender kembali mengatakan bahwa wilayah Irian Barat mempunyai arti yang sangat penting bagi Australia, sehingga Indonesia tidak memiliki tuntutan yang sah terhadap Irian Barat. Selain arti penting bagi Australia Irian Barat juga strategis bagi Australia.⁵⁹ Spender berkampanye di depan Sidang Umum tentang Irian Barat, dengan harapan agar Belanda menutup segala kemungkinan perundingan dengan pihak Indonesia.

Irian Barat adalah satu-satunya teritori asing yang berbatasan dengan wilayah Australia (Papua Nugini). Australia juga menganggap bahwa Irian Barat mempunyai posisi yang strategis dalam hubungannya dengan Selat Torres dan pantai utara Australia. Lebih dari itu, kesejahteraan penduduk Irian Barat akan lebih terjamin, jika Irian Barat digabungkan dengan Papua Nugini, dan bagian Melanesia yang lain, dari pada bergabung dengan Indonesia dan kawasan Asia yang lain.⁶⁰

Kini hubungan Indonesia-Australia yang sudah terjalin dengan baik menjadi renggang, yang dimulai sejak tahun 1950 sampai dengan 1960-an. Witalam mengatakan bahwa wilayah Irian Barat belum dikuasai oleh Indonesia. Di atas semua pernyataan itu Australia sebenarnya menginginkan wilayah ini untuk mempertahankan pendapatnya, yang didasarkan pada keselamatan negerinya dalam membendung pengaruh komunis dan serangan dari luar, terutama dari arah Utara.

⁵⁹Pada tanggal 28 Juli 1949 Departemen Luar negeri Australia memberitahu Batavia Irian Barat mempunyai kedudukan khusus secara geografis, etnologi, dan politik.

⁶⁰ Margaret George, *Australia dan revolusi Indonesia*, Jakarta, PT pantja Simpati, 1986 (terjemahan), hlm. 222.

Australia sebagai negara sekutu Amerika di Pasifik yang penting. Pada akhir tahun 1961, Perdana Menteri Australia Robert G. Menzies mendesak Kennedy mendukung Belanda agar tetap mempertahankan kekuasaannya atas Irian Barat. Menzies takut bahwa tanpa Belanda wilayah tersebut akan jatuh ke tangan Indonesia yang didominasi kelompok komunis dan dengan demikian menjadi ancaman langsung bagi keamanan Australia.⁶¹

Ketika Trikora di keluarkan pada tahun 1961, Australia mengambil posisi melawan Indonesia. Sikap ini diambil selain alasan keamanan, Australia juga mengetahui dominasi partai komunis di Indonesia. Oleh karena itu Australia tidak menginginkan pengaruh komunis masuk ke wilayah Australia.⁶²

⁶¹ *Ibid.* Baskara, hlm. 240.

⁶² J. Siboro, *Sejarah Australia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, hlm. 169.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

PROSES PERSELISIHAN JAKARTA DAN DEN HAAG

A. Jalur Diplomasi

Pada tanggal 27 Desember 1949 di istana “de Dam” wakil Presiden Indonesia Hatta menerima kedaulatan atas bekas wilayah Hindia-Belanda dari tangan Ratu Juliana.⁶³ Penyerahan tersebut menyisakan masalah baru sebab Irian Barat tidak diikuti sertakan dalam penyerahan kedaulatan Indonesia dari Hindia-Belanda kepada negara Indonesia Serikat. (lihat lampiran 4).

Perselisihan Jakarta dan Den Haag mendapat perhatian dari luar, terutama Amerika dan negara-negara Asia. Mereka khawatir apabila perselisihan Jakarta dan Den Haag berkembang menjadi perang lokal yang kemudian situasi ini dimanfaatkan oleh Uni Soviet yang sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan kepada Indonesia dengan memberikan perlengkapan militer modern.⁶⁴ Dengan adanya pernyataan seperti ini maka Amerika Serikat, Australia dan negara-negara Asia mengusulkan agar masalah Irian Barat dapat segera diselesaikan melalui jalur damai.⁶⁵

⁶³Lambert Giebels, *Soekarno biografi 1901-1950*, Jakarta, Grasindo, 2001, hlm. 486.

⁶⁴Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. (http://wapedia.mobi/id/Operasi_Trikora. diakses pada tanggal 20 November 2010).

⁶⁵Sebelumnya beberapa kali Australia juga mengusulkan agar Irian Barat diserahkan kepada satu badan perwalian; usul tentang ini terakhir diajukan pada bulan Desember 1948. Hal ini bisa dianggap sebagai perubahan sikap Australia yang menginginkan agar Irian Barat diserahkan kepada perwalian PBB. Kenyataan bahwa Australia mengundang Belanda untuk berperan serta dalam Komisi Pasifik Selatan atas nama Irian Barat, Australia telah menunjukkan bahwa Australia mengakui kekuasaan Belanda atas Irian Barat, dan mengakui hubungannya dengan Papua Nugini; Australia tidak melihat Irian Barat ada hubungannya dengan bagian Indonesia yang lain. (*Ibid.* Margaret George, hlm. 223).

Sejak tahun 1961 masalah Irian Barat mulai mendapat perhatian serius dari para anggota PBB, terutama setelah adanya rencana Menteri Luar Negeri Belanda Joseps Luns untuk menyerahkan masalah tersebut ke Majelis Umum PBB pada bulan Oktober 1961. Rencana Luns, bermaksud mengalihkan kekuasaan atas wilayah Irian Barat kepada PBB, yang diikuti dengan pengiriman komisi PBB untuk mengawasi plebisit atau pemungutan suara sebagai cara untuk memastikan dijalankannya prinsip menentukan nasib sendiri oleh rakyat Papua. Yakin bahwa rakyat Papua tidak akan memilih untuk berintegrasi dengan Indonesia, Belanda merasa bahwa plebisit macam itu akan menjadi “balas dendam” terbaik mereka terhadap bekas koloninya yang menentang setiap bentuk kehadirannya di wilayah tersebut. Irian Barat mungkin tidak akan lagi berada di bawah kekuasaan mereka, tetapi juga tidak akan jatuh ke tangan Indonesia.

Di dalam perdebatan Majelis Umum PBB berikutnya rencana tersebut mendapat dukungan luas, walaupun tidak memperoleh suara mayoritas 2/3 yang dipersyaratkan. Sebagian besar dukungan datang dari negara-negara yang pro Belanda, termasuk Amerika Serikat. Dalam perdebatan itu perwakilan Amerika Serikat untuk PBB Jonathan B. Bingham mendukung Belanda dengan menekankan pentingnya rakyat Papua menggunakan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ketika India dan negara-negara Asia lainnya mengusulkan suatu resolusi yang menyerukan negosiasi langsung antara Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan ketua Majelis Umum PBB, Bingham memilih Abstain. Belanda sangat senang dengan kemajuan

perdebatan tersebut. Sebaliknya Indonesia merasa kecewa dan mulai serius memikirkan pemakaian kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan sengketa itu. Para pendukung Indonesia di Washington sama kecewanya oleh sikap Amerika yang pro-Belanda di PBB. Mereka mengkritik Departemen Luar Negeri Amerika karena telah membuat A.S berubah dari “pialang yang jujur” menjadi pendukung “pihak yang salah”⁶⁶

Masalah status Irian Barat kembali dibicarakan dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1961. Sekretaris Jendral PBB, U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk mengajukan suatu usul penyelesaian masalah Irian Barat kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Pokok usul Bunker secara singkat adalah: “agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun”.⁶⁷

Pemerintah Indonesia pada prinsipnya dapat menyetujui usul tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Pemerintah Belanda mempunyai pendapat sebaliknya: “pihak Belanda akan mau melepaskan Irian Barat dengan membentuk dulu perwakilan di bawah PBB untuk kemudian membentuk Negara Papua.” Sikap kerajaan Belanda itu disambut oleh Indonesia dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan bersahabat, yang oleh Presiden Sukarno diformulasikan sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid.* Baskara, hlm. 251-252.

⁶⁷ Marwati djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm. 333.

“politik konfrontasi disertai dengan uluran tangan. Palu godam disertai dengan ajakan bersahabat.”⁶⁸

Suara pendukung Indonesia masalah Irian Barat termasuk lemah terutama dalam pemutusan kebijakan mereka mengenai Irian Barat. Di lain pihak Indonesia yang dari awal mengharapkan dukungan dari Amerika Serikat ternyata harus kecewa, sehingga Indonesia pun mulai mengambil tindakan tegas. Dalam perkembangan selanjutnya Indonesia mulai mendapat lampu hijau dengan diangkatnya Averell Hariman sebagai Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Timur Jauh pada tanggal 29 November 1961. Dengan ini sikap Amerika pun mulai berubah, yang tadinya memilih untuk bersikap netral mulai berubah mendukung Indonesia. Dengan adanya dukungan ini maka masalah Irian Barat masuk dalam babak baru. Bagi Amerika masalah Irian Barat menjadi begitu penting dalam kaitannya dengan kepentingan dan menghalangi perkembangan komunis di Indonesia. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Amerika agar masalah status Irian Barat dapat diselesaikan secara damai, antara lain sebagai berikut:

a) Melalui Mc George Bundy

Menyadari adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut, pada tanggal 1 Desember 1961 Penasehat Keamanan Nasional Presiden Kennedy, Mc George Bundy, menyatakan dukungannya terhadap Indonesia.⁶⁹ Bundy mengatakan kepada Kennedy, banyak ahli

⁶⁸ *Loc.cit.* Marwati & Nugroho, hlm. 333.

⁶⁹ Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena *Bureau of European Affairs di Washington DC*, menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat". Tapi pada bulan April 1961, Robert

berpandangan bahwa sikap resmi Amerika Serikat menyangkut masalah Irian di PBB selama ini sebagian merupakan akibat dari rasa dekat Dean Rusk pada Australia dan rasa senangnya pada Presiden Sukarno, dan bahwa sekarang ini posisi Amerika Serikat mempertahankan sikap pro-Belandanya, justru kelompok komunislah yang akan diuntungkan. Lebih jauh dia mengatakan kepada Kennedy, dia mengerti bahwa “Sukarno ... bukanlah negarawan yang disukainya ...” Namun demikian, katanya, “untuk sekarang ini yang penting adalah bahwa kita tidak melawan kepentingan kelompok moderat Indonesia satu-satunya kelompok yang bisa dipercaya untuk mencegah pengambil alihan kekuasaan oleh pihak komunis.”

Campur tangan Bundy benar-benar berubah sikap Washington. Satu minggu setelah Bundy menyampaikan pandangannya kepada Presiden Kennedy, Departemen Luar Negeri A.S. memerintahkan Duta Besar Jones untuk memberitahu Bung Karno bahwa A.S. kini siap membantu menemukan solusi yang terbaik atas masalah Irian Barat. Menanggapi laporan bahwa Bung Karno terlanjur merasa “hancur” oleh sikap A.S yang mendukung Belanda dalam Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Kennedy mengirimkan sebuah surat untuk menenangkan

Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS. (http://wapedia.mobi/id/Operasi_Trikora. diakses pada tanggal 20 November 2010).

pemimpin RI tersebut. Dalam suratnya Kennedy menyatakan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan A.S di PBB untuk membantu mencari solusi atas persoalan Irian Barat telah disalahmengerti dan bahwa hal ini telah membuat Indonesia marah. Meskipun demikian, Presiden Kennedy berharap bahwa Bung Karno tidak akan pernah menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. “Penggunaan kekerasan,” tulis Kennedy, “akan sangat mempersulit saya untuk sebisa mungkin membantu mencari penyelesaian yang memuaskan atas masalah ini.”

Akan tetapi Bung Karno tidak berhasil diyakinkan oleh surat tersebut. Sukarno tengah sungguh-sungguh mempertimbangkan penggunaan kekuatan bersenjata di Irian Barat.⁷⁰ Tiga hari kemudian, pada tanggal 19 Desember 1962, secara terbuka ia mengumumkan apa yang disebut “Trikorā” (Tri Komando Rakyat). Melalui Trikorā Bung Karno menyuruhkan kepada rakyat Indonesia untuk: pertama, mengerahkan kekuatan guna membubarkan dewan daerah yang telah dibentuk oleh Belanda untuk rakyat Papua; kedua, pengibaran Sang Saka Merah-Putih di Irian Barat; dan ketiga, persiapan mobilisasi nasional untuk merebut kedaulatan atas wilayah tersebut dari tangan Belanda.⁷¹ Hari pengumuman Trikorā secara sengaja dipilih tanggal 19 Desember, dengan maksud untuk

⁷⁰Pada tanggal 21 Desember 1961, dalam sepucuk surat kepada Kennedy, Sukarno memperingatkan bahwa Indonesia akan menempuh jalan kekerasan bila diperlukan. (*Ibid.* Hilman Adil, hlm. 206).

⁷¹[http://wapedia.mobi/id/Sejarah_Nusantara_\(1800-1940\)](http://wapedia.mobi/id/Sejarah_Nusantara_(1800-1940)). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2010.

mengingatkan rakyat Indonesia akan kebrutalan Belanda dalam Agresi Militer Kedua tahun 1947.

Pengumuman Trikora itu menciptakan suasana kritis di antara para pembuat kebijakan Luar Negeri A.S. yang merasa takut bahwa konflik militer langsung antara Belanda dan Indonesia hanyalah masalah waktu saja. Mereka berusaha keras untuk mencegah terjadinya konflik itu dan mendesak keduanya untuk mencari solusi damai. Amerika kemudian mendesak Belanda dan Indonesia agar mengadakan pembicaraan bilateral dengan Pejabat Sekretaris Jendral PBB, U Thant, sebagai moderator. Robert Komer menggarisbawahi pentingnya peran Amerika dalam pembicaraan bilateral semacam itu, sambil menekankan bahwa kelompok yang mendukung sikap Indonesia “harus terus menekan Belanda,” kalau tidak, katanya “kita akan benar-benar menghadapi krisis besar.” Hal ini penting menurut Komer, mengingat bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pasti tidak akan mau menekan Belanda.

b) Melalui Robert Kennedy

Walaupun Amerika sudah memberikan dukungan kepada Indonesia, suasana krisis semakin terasa. Baik Belanda maupun Indonesia tetap enggan menerima usulan Washington untuk mengadakan pembicaraan bilateral. Merasa gusar oleh sikap keras kepala yang ditunjukkan Belanda dan Indonesia, Presiden Kennedy pun mengutus Robert Kennedy, Jaksa Agung Amerika Serikat sekaligus adiknya yang termasuk orang kepercayaan terdekat Kennedy. Tugas yang diemban

Robert adalah untuk menjalankan sebuah “misi khusus” yang tujuannya adalah “mencegah pecahnya perang antara Indonesia dan Belanda karena masalah Irian Barat.” Sesaat sebelum keberangkatannya Washington telah mengisyaratkan kepada Belanda bahwa sekiranya Indonesia melancarkan suatu operasi militer besar-besaran di Irian Barat, Amerika tidak akan membantu Belanda. Setelah mengetahui sikap Amerika ini Australia yang sebelumnya membantu Belanda menjadi mengendur dan hal ini berakibat melemahnya posisi diplomatik Belanda. Sementara itu secara pribadi Jaksa Agung Robert Kennedy benar-benar ingin membantu kakaknya mencegah suatu konflik internasional yang cepat atau lambat akan melibatkan Amerika. Pada tanggal 11 Februari 1962 dia meninggalkan Washington untuk bertolak menuju Indonesia, dan dari Indonesia ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Belanda terutama untuk membujuk Belanda agar mau menerima kebijakan Amerika Serikat mengenai status Irian Barat.

Dalam pertemuan dengan Presiden Sukarno, Robert Kennedy mendesak agar soal pengalihan kekuasaan itu tidak lagi menjadi prasyarat negosiasi. Dia juga menekankan pentingnya menyelesaikan pertikaian itu secara permanen melalui perundingan, dan bukan melalui konflik militer. Dia kemudian meminta kepada Bung Karno untuk tidak terlalu menekankan hal-hal prosedural dalam masalah yang sangat penting seperti masalah status Irian Barat. Namun demikian Bung Karno tetap berpegang

pada pendiriannya menyangkut prasyarat bagi negosiasi, dan masih belum yakin dengan argumen Robert Kennedy.

Kedatangan Robert Kennedy di Indonesia bisa dikatakan berhasil dengan baik. Berkat kepiawaiannya dalam bernegosiasi, ia berhasil membujuk Bung Karno sehingga setuju untuk mengadakan pembicaraan diplomatik dengan Belanda di bawah pengawasan PBB, meski Bung Karno menuntut agar Indonesia diijinkan berpartisipasi dalam perumusan agenda negosiasi tersebut.

Setelah meninggalkan Indonesia. Jaksa Agung Robert Kennedy pergi ke Belanda untuk mendesak pemerintah Belanda supaya mau berunding dengan Indonesia menyangkut masalah Irian Barat.⁷² Namun, Menteri Luar Negeri Luns menolak permintaan Kennedy untuk menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Baginya penyerahan kuasa pemerintahan berarti penyerahan diri. Pada tanggal 26 Februari 1961, ia dilaporkan menolak untuk memberikan jaminan kepada Belanda tentang dukungan Amerika Serikat bila terjadi serangan Indonesia.⁷³ Tidak lama setelah Robert Kennedy meninggalkan Belanda, Luns menemuinya lagi di Paris dan mengatakan bahwa dia berubah pikiran. Luns telah memperlunak sikapnya mengenai masalah Irian Barat. Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas usaha A.S. untuk membantu

⁷² Selama kurun waktu inilah A.S. memanfaatkan pengaruhnya atas pemerintahan Belanda secara efektif, pada tanggal 30 Maret Menteri Luar Negeri A.S. Dean Acheson memberitahukan kepada menteri luar negeri Belanda di Washington bahwa departemen luar negeri A.S. terpaksa akan menghentikan alokasi ECA kepada Belanda, kalau pemerintah Belanda tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. (P.R.S. Mani, *Jejak Revolusi*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1989, hlm. 173).

⁷³ *Ibid.* Hilman Adil, hlm. 207.

menyelesaikan persoalan tersebut, sambil mengatakan kepada Kennedy bahwa pemerintahannya bersedia bernegosiasi dengan Indonesia khususnya bila ditengahi oleh suatu “pihak ketiga”.⁷⁴

B. Resolusi Penyelesaian Masalah Status Irian Barat

1. Resolusi Rencana Joseph Luns

Pada era demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih militan dan agresif. Khusus untuk pembebasan Irian Barat, berkat perjuangan Menlu Soebandrio dan Jenderal Nasution sebagai Kastaf AB, TNI berhasil bergerak menjadi kekuatan yang signifikan dengan perlengkapan militer Uni Soviet. Di Madiun dikirim pesawat-pesawat tempur MIG-21. Sementara di Desa Waru, Surabaya, didirikan pangkalan udara taktis yang siap menyatu dengan Angkatan Laut RI. Kekuatan udara ini siap menerobos angkasa untuk menghancurkan pertahanan Belanda di Irian Barat. Semua ini dilakukan dengan mengirim sekitar 2.000 personel pelatih oleh Uni Soviet dan berdirinya perwakilan di Jakarta yang dipimpin oleh Marsekal Chernobay. Sementara itu tentara Belanda dengan kekuatan 5.000 personel di Irian Barat, disertai AU dan AL mini mengalami kendala untuk mengalahkan Tentara Indonesia yang mendapat bantuan perlengkapan perang dari Uni Soviet.

Pada bulan Maret 1961, Menteri Luar Negeri Belanda, Luns melakukan pendekatan terhadap para peserta Konferensi Perdana Menteri

⁷⁴ *Ibid.* Baskara, hlm. 255-257.

Persemakmuran di London, untuk membicarakan dengan mereka masalah perwalian PBB untuk Irian Barat, yang mungkin juga meliputi kawasan-kawasan Australia. Ia juga berbicara dengan Menzies, yang menyarankan agar Luns membatalkan rencana itu. Rencana tersebut akan gagal dengan alasan; dari pembicaraan dengan Presiden Kennedy pada tanggal 25 Februari 1961, ia mendapat kesan bahwa dukungan A.S. untuk Belanda tidak lagi bisa diharapkan, dan setiap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersifat menentang titik pandang Indonesia tidak akan dapat dukungan dari negara-negara Asia-Afrika.⁷⁵

Peringatan ini tidak diacuhkan oleh Luns. Rencana Luns diajukan ke Majelis Umum PBB pada tanggal 26 September 1961. Rencana itu didasarkan pada Resolusi PBB 1960 tentang dekolonisasi, dan berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, pengakuan terhadap hak menentukan nasib sendiri dan pengalihan kedaulatan kepada penduduk Irian Barat, kedua, internasionalisasi kawasan Irian Barat, ketiga, mengutus komisi pencari fakta PBB di kawasan Irian Barat, dan melanjutkan bantuan keuangan Belanda sekitar 98 juta gulden per tahun.⁷⁶

Indonesia menentang rencana Luns berdasarkan pertimbangan bahwa masalah yang dipertaruhkan di Irian Barat bukanlah hak menentukan nasib sendiri, melainkan kesatuan nasional. Menerima prinsip penentuan nasib sendiri akan membawa akibat yang serius terhadap keberadaan Negara Indonesia. Jakarta menafsirkan langkah Den Haag ini sebagai upaya

⁷⁵ *Ibid.* Hilman Adil, hlm. 203.

⁷⁶ Hilman, *Op.cit.*, hlm. 204.

menyalahgunakan Resolusi PBB tentang dekolonisasi dengan menekankan prinsip hak menentukan nasib sendiri.

Belanda pun kemudian mencari jalan lain untuk tetap menguasai Irian Barat. Menlu Belanda Joseph Luns pada April 1961 membentuk Dewan Papua, yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh Irian Barat dan beberapa pejabat Belanda. Usul Dewan Papua yang lebih dikenal dengan *Luns Plan* atau Rencana Luns merupakan niat Luns meminta dukungan PBB, dengan mengacu pada Resolusi Dekolonisasi PBB Nomor 1514. Dengan pembentukan Dewan Papua. Garis kebijakan baru pemerintahan Nugini-Belanda, lima anggota dari Zuid-New-Guinea, untuk tiap *Onderafdeling* satu, mereka ini diangkat oleh gubernur dengan cara; onderafdeling Merauke dipilih sesudah dilakukan pemilihan, sedangkan dari Muyu, Boven-Digul dan dari Onderafdeling Asmat dipilih atas usul residen. Untuk *Onderafdeling* Merauke diadakan oleh dewan daerah, para anggotanya dipilih langsung dari distrik-distrik Merauke. Antara lain; Muting, Okaba, dan distrik Kaimana. Dewan daerah ini akan menjadi lembaga pemerintahan tertinggi di *Onderafdeling*.⁷⁷

Eksperimen Demokrasi Belanda mulai diterapkan di Belanda dengan konsekuen. Salah satu tujuan pembangunan ialah membangun demokrasi dalam masyarakat Irian Barat. Di daerah-daerah yang dianggap siap untuk dibentuk dewan-dewan daerah dari anggota yang dipilih dengan tujuan untuk dapat mengurus wilayahnya sendiri sampai pada kekuasaan

⁷⁷ *Ibid.* Pim Schoorl, hlm. 368.

Belanda Berakhir di Irian Barat, namun dalam pelaksanaannya pengawasan dari pusat tetap berjalan. Pemilihan Dewan daerah tetap dilaksanakan di Irian Barat walaupun perselisihan Jakarta dan Den Haag makin memanas, misalnya di Raja-Ampat dibentuk dewan daerah. Dewan ini berfungsi sampai penyerahan kekuasaan kepada PBB pada bulan Oktober 1962.

Pada November 1961 dilangsungkan pemilihan di ibu kota dan beberapa daerah di Raja Ampat, dengan mengadakan TPS keliling. Di ibu kota pemilihan pada tanggal 10 November dan berakhir pada 13 November, kemudian para panitia menghitung kotak suara yang sudah masuk dan mengumumkan pada tanggal 18 November 1961. Dalam pemilihan ini rakyat memberi respon positif dengan datang ke tempat pemilihan dan memberikan suaranya, walaupun itu peristiwa baru bagi mereka. Dalam pemilihan ini ada tiga orang Eropa yang mencalonkan diri namun hanya satu yang terpilih, ada tiga belas kursi yang jatuh kepada kelompok pemuka Raja Ampat, diantaranya kepala adat Arfan dan Majalibit, beberapa guru, para pengusaha swasta, serta tiga orang kepala distrik. Sehari setelah pengumuman hasil pemilihan orang-orang yang terpilih langsung dijemput untuk mengikuti pelantikan yang akan dilakukan oleh Gubernur P.J. Platteel.⁷⁸

Indonesia dan negara-negara sahabat Asia-Afrika menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda adalah sebagai upaya untuk tetap

⁷⁸ Pim Scoorl, *Op.cit.*, hlm. 533.

mempertahankan Irian Barat. Luns merancang pemilihan pemerintahan interen Papua, sebagai dekolonisasi. Namun Jakarta sadar, ini hanyalah suatu taktik memperpanjang kehadiran Belanda di Irian Barat.

Resolusi Dekolonisasi ini didasarkan pada *Independence for Colonial Countries and Peoples* (Kemerdekaan Negeri dan Rakyat Jajahan). Dengan *Luns Plan*, Menlu Belanda berniat menghapuskan penjajahan. Namun Indonesia pun akan kehilangan Irian Barat. Menlu Soebandrio atas permintaan Soekarno menghadiri sidang Majelis Umum PBB (September-November 1961) di New York. Saat itulah Luns berharap ada voting atas rancangan politik dekolonisasinya. Tugas khusus Soebandrio adalah menjelaskan kepada Majelis Umum (MU) PBB tentang kebenaran di balik Rencana Luns, sekaligus memaparkan posisi Indonesia atas Irian Barat sebagai wilayah RI pasca penjajahan.

Setelah tiga kali menyampaikan pidatonya di MU-PBB Soebandrio menolak melakukan voting untuk mengesahkan Rencana Luns dan Belanda tersebut. Di hadapan MU PBB, Soebandrio dengan tegas menandakan bahwa Rencana Luns hanyalah sebuah taktik licik untuk meneruskan pemerintahan kolonial Belanda di Irian Barat.⁷⁹ "*Hal ini jelas bertentangan dengan kepentingan dan keamanan nasional Indonesia,*" tegasnya⁸⁰

⁷⁹ Menurut Subandrio, bahwa rencana Luns melupakan sama sekali later belakang atau segala sumber konflik itu, dan secara tidak tepat memandangnya sebagai "mata-mata kasus dekolonisasi". Subandrio didukung oleh delegasi India, yang menyatakan bahwa tidak akan ada sebuah administrasi PBB di Irian Barat tanpa persetujuan Indonesia, yang menurutnya Indonesia memiliki kedaulatan atas Irian Barat. (*Ibid.* Hilman Adil, hlm. 204).

⁸⁰ Dewi Furtuna Anwar. Dkk. *Konflik Kekerasan Internal*, Jakarta, Yayasan Obor, 2005, hlm. 246.

Ada beberapa dasar pemerintah Belanda mengambil kebijakan seperti itu, antara lain: Pertama, menggunakan kedaulatan sebagai alat untuk penyelesaian terhormat atas perselisihan Belanda-RI. Ini didasarkan pada kesejahteraan rakyat Irian Barat, dan demi membangun semangat kerja sama antara kedua pihak. Kedua, menggunakan kebijakan ini seefektif mungkin sebagai senjata melawan Indonesia, khususnya di forum internasional. Soebandrio pun menutup protesnya dengan menggugat: "Bila Majelis menerima rancangan Resolusi Luns, berarti mengulangi penggunaan kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Ini akan melegitimasi hak Indonesia untuk menyingkirkan Belanda dari Irian Barat, atau akan terjadi perang antara kedua negara. Dalam situasi seperti itu Soebandrio berhasil "membuat rasa khawatir" Majelis Umum PBB dan Belanda. Forum Majelis Umum-PBB memahami inti dalam pidatonya, yang mana ada gugatan atas keberadaan Belanda di Irian Barat. Upaya Soebandrio inipun membuahkan hasil. Mayoritas Majelis Umum menolak voting. Dengan demikian rencana Luns mengalami kegagalan.

2. Resolusi Asia-Afrika

Sebagai tambahan rancangan Resolusi Belanda, diajukan dua rancangan resolusi yang lain. Sebuah rancangan resolusi disponsori oleh India, Bolivia, dan beberapa negeri Asia-Afrika, dan diajukan pada bulan November 1961, yang merekomendasikan perundingan bilateral antara

Belanda dan Indonesia. Resolusi ini secara langsung mendukung sikap Indonesia.⁸¹

3. Resolusi Brazzaville

Rancangan resolusi ketiga ini menawarkan jalan keluar yang bersifat kompromistis, diajukan oleh tiga belas negara Asia-Afrika termasuk Amerika Serikat, yang disebut “Resolusi Brazzaville”. Resolusi ini mendukung dibukanya kembali perundingan-perundingan bilateral “tanpa praduga untuk menghormati kemauan dan hak menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa.” Jika penyelesaian tidak tercapai hingga 1 Maret 1962, rancangan Resolusi itu merekomendasikan penunjukan sebuah Komisi PBB seperti yang tercantum di dalam rencana Luns.

Kendati Amerika memberikan suara untuk Resolusi Brazzaville, terlihat bahwa Amerika juga enggan mengambil langkah yang akan bertentangan dengan klaim Indonesia. Misalnya, kendati delegasi Amerika Serikat menyatakan bahwa rencana Luns itu imajinatif dan konstruktif, dan bahwa ia” tidak bisa melihat alasan syah mengapa hak menentukan nasib sendiri harus menolak penduduk New Guinea Barat,” ia tidak bisa memberikan rancangan Resolusi Belanda, karena rancangan itu gagal mengakui kepentingan Indonesia yang mendalam terhadap kawasan tersebut. Suara yang diberikan Amerika Serikat terhadap ketiga rancangan Resolusi ini mengisyaratkan sebuah perubahan kebijaksanaan mengenai sengketa Irian Barat; pada hakikatnya hal ini berarti bahwa sejak saat itu

⁸¹ *Ibid.* Hilman Adil, hlm. 204.

Belanda tidak bisa lagi mengharapkan dukungan Amerika Serikat, baik yang bersifat diplomasi maupun militer.⁸²

Amerika Serikat mewaspadaai perkembangan ini. Washington menyadari bahwa, harus mengambil prakarsa untuk mencapai sebuah penyelesaian, sebelum sengketa Irian Barat meledak menjadi sebuah perang lokal. Karena itu Amerika Serikat memutuskan untuk memainkan peranan yang lebih aktif, dan sampai pada kesimpulan untuk menawarkan prosedur untuk membuka kembali perundingan-perundingan antara Jakarta dan Den Haag. Washington menekan Pemerintah Belanda untuk melepaskan tuntutananya agar penduduk Irian Barat diberi hak untuk memutuskan bagi diri mereka sendiri, apakah mereka ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak.

Pada 1 Januari 1962, Perdana Menteri Belanda De Quay menyatakan di depan Parlemen, pemerintahnya siap berunding dengan Indonesia tanpa prasyarat tentang hak penduduk Irian Barat untuk menentukan nasibnya sendiri, asalkan Indonesia juga mau melepaskan prasyaratnya bahwa Irian Barat harus dilihat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Namun, Presiden Sukarno menjawab bahwa Indonesia hanya akan ambil bagian dalam perundingan jika perundingan itu meliputi pengalihan kawasan tersebut kepada Indonesia.⁸³

⁸² *Ibid.* Hilman Adil, hlm. 204-205.

⁸³ *Ibid.* Hilman Adil, hlm. 206.

C. Perjanjian New York 1962

Setelah serangkaian manuver diplomatis lebih jauh di antara semua pihak yang berkepentingan, akhirnya Jakarta dan Den Haag sepakat untuk berunding di bawah pengawasan PBB guna mencari solusi atas persoalan Irian Barat. Amerika Serikat juga khawatir bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik ini, maka Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua juga mengubah pendiriannya dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.⁸⁴ Untuk sekian kalinya perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di markas besar PBB. Dalam perundingan itu pihak Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman Van Rajen dan C.W.A. Scurkman. Negosiasi itu akan ditengahi oleh “pihak ketiga”, yakni Amerika Serikat. Perundingan diadakan di kota Middleburg, Virginia tidak jauh dari Washington. Amerika Serikat setuju untuk menjadi penengah dan menunjuk Ellsworth Bunker untuk duduk sebagai mediator. Bunker adalah mantan Duta Besar Amerika untuk Argentina, Italia dan India yang terkenal,⁸⁵ yang nantinya akan menjadi Duta Besar untuk Vietnam.

⁸⁴ http://wopedia.mobi/id/Operasi_Trikora. diakses pada tanggal 20 November 2010.

⁸⁵ *Ibid.* Hilman Adil, hlm. 214.

Tidak lama setelah dibuka, ternyata perundingan tersebut menemui jalan buntu.⁸⁶ Pada hari yang ketiga para delegasi berdebat mengenai berbagai masalah yang mereka anggap tidak dapat diperdamaikan. Indonesia menuntut, bahwa pengalihan pemerintahan atas wilayah tersebut kepada Indonesia menjadi syarat mendasar untuk pembicaraan lebih jauh. Belanda, sebaliknya, menekankan bahwa syarat untuk berunding tentang pengalihan pemerintahan adalah tercapainya kesepakatan yang memuaskan dalam penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Karena mempertemukan sikap yang saling bertentangan itu mustahil, para perwakilan Belanda dan Indonesia segera meninggalkan Middleburg. Pembicaraanpun kemudian ditangguhkan.

Menanggapi penangguhan tersebut, para pejabat di Washington merumuskan sebuah usulan dan berharap bahwa Belanda dan Indonesia dapat menerimanya sebagai landasan bagi dimulainya kembali pembicaraan diantara keduanya. Setelah serangkaian diskusi di Departemen Luar Negeri A.S dan Gedung Putih, pada tanggal 6 April 1962 Kementerian itu mengajukan sebuah usulan kompromis kepada Den Haag dan Jakarta.⁸⁷ Usulan yang kemudian dikenal sebagai formula Bunker, tersebut mengharapkan: 1) Suatu transfer Irian Barat kepada Dewan Keamanan PBB, yang setahun kemudian akan diikuti oleh 2) transfer wilayah tersebut kepada

⁸⁶ Serangkaian pembicaraan dilakukan di suatu tempat di dekat Washington sejak 12 Maret, antara delegasi Indonesia yang terdiri dari dua orang dan di pimpin oleh Adam Malik, Duta Besar Republik Indonesia di Moscow, dan delegasi Belanda yang dipimpin Dr. Van Royen, Duta Besar Belanda di Washington. Selama pembicaraan itu Indonesia terus melancarkan tekanannya dengan meningkatkan penyusupan pasukan ke Irian Barat melalui laut dan penerjunan udara. (Hilman Adil, *Loc.cit.*, hlm. 214).

⁸⁷ Rosihan Anwar, Sukarno, *Tentara, PKI*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 136.

Indonesia, 3) kemudian akan memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk memilih apakah hendak merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia.⁸⁸

Formula tersebut merupakan suatu langkah diplomatik yang cerdas. Secara langsung ia menjawab dua hambatan utama perundingan dengan suatu solusi yang langgeng. Dengan demikian tuntutan dasar Indonesia akan dipenuhi, yakni soal peralihan kekuasaan, namun pada saat yang sama keinginan kuat Belanda supaya rakyat Papua diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri juga terakomodasi. Meskipun demikian sebenarnya secara esensial formula Bunker lebih condong kepada Indonesia. Pertama, ia mengisyaratkan kendali administrasi yang pasti oleh Indonesia. Kedua, formula itu mengusulkan adanya penentuan pendapat rakyat Papua, tetapi hanya setelah wilayah tersebut berada di bawah pemerintahan Indonesia. Tidak mengherankan Indonesia menyambut gembira Formula Bunker. Pada tanggal 9 April 1962 Bung Karno menyatakan bahwa pemerintahannya secara prinsip menerima rencana Bunker. Penerimaan ini sangat penting, mengingat formula itu sebenarnya tidak sepenuhnya mendukung posisi Indonesia. Ia memang memberikan kendali atas wilayah tersebut kepada Indonesia. Namun Indonesia mesti menunggu setelah suatu periode pemerintahan oleh PBB. Bahkan setelah pemerintahan dialihkan kepada Indonesia, masih akan ada jajak pendapat di bawah pengawasan PBB, dimana rakyat Papua bebas untuk memilih apakah merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia. Meski begitu, secara prinsip Indonesia mendukung rencana Bunker. Belanda, sebaliknya,

⁸⁸ *Ibid ...*, *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*, hlm. 198.

menanggapi rencana tersebut dengan amarah. Setelah mempelajari ketetapan-ketetapannya, Menteri Luar Negeri Luns mengatakan bahwa pemerintahannya “terkejut dan sangat kecewa”. Pemerintah Belanda demikian kata Luns kepada Duta Besar Amerika Serikat John Rice, juga “sangat terluka” karena resolusi tersebut tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Den Haag. Pemerintah Amerika Serikat telah membeberkan rencana tersebut kepada Indonesia. Intinya, Belanda menolak untuk membuka kembali pembicaraan di Middleburg.

Seperti yang kita ketahui, suasana yang berkembang di antara para perumus kebijakan dalam pemerintahan Kennedy waktu itu adalah suasana mendukung posisi Indonesia dan menekan Belanda. Robert Komer menuduh Belanda “bermain api” karena menolak membuka kembali perundingan. Menurutnya penolakan terhadap rencana Bunker semata-mata bersumber pada keengganan untuk mengaku kalah kepada presiden Sukarno dan pada keraguan akan adanya “kesadaran baru” di pihak rakyat Irian Barat. Komer yang oleh banyak kalangan di gedung putih secara bergurau dijuluki “wakil pribadi Sukarno” kerana pendiriannya yang sangat pro-Indonesia mendesak Washington untuk memberitahu Den Haag mengenai kepentingan utama Presiden Kennedy dalam persoalan itu dan dukungannya yang penuh pada rencana Bunker. Lebih jauh, dia menyarankan supaya Amerika Serikat menekan Belanda yang disebutnya sebagai ”sekutu Amerika Serikat yang keras kepala”.

Beberapa hari kemudian, dalam sebuah surat yang dirancang Komer, Presiden Kennedy mengirim telegram kepada Menteri Luar Negeri Rusk yang tengah menghadiri pertemuan tingkat Menteri Dewan Atlantik Utara di Athena, Yunani, supaya menekan Luns agar mau membuka kembali perundingan dengan Indonesia. Sebagai bagian dari tekanan ini Presiden mengatakan bahwa dia akan mempublikasikan dokumen-dokumen berkaitan dengan upaya Bunker untuk menengahi dan menyelesaikan permasalahan, yang selama ini Luns sembunyikan dari publik maupun Parlemen Belanda. Presiden Kennedy juga memerintahkan Rusk untuk memberitahu Belanda bahwa bila pecah konfrontasi militer, Amerika Serikat tidak akan berada di pihak mereka. Ketika menerima surat itu Luns tidak tahu pasti bagaimana mesti menjawab desakan Presiden Kennedy. Sebagai tanggapan, Washington meminta pendapat Ellsworth Bunker mengenai rencana mereka untuk mempublikasikan upaya-upaya mediasinya, termasuk formula yang dirumuskannya. Bunker tidak keberatan. Pada tanggal 25 Mei 1962 rencana Bunker benar-benar dipublikasikan sebagai nota PBB No. 2600. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Mei, dengan berat hati Luns Menerima rencana Bunker sebagai landasan untuk membuka kembali perundingan dengan Indonesia.⁸⁹

Bung Karno mempertanyakan kesediaan Belanda yang tiba-tiba mau menerima rencana Bunker dan membuka kembali perundingan. “fajar telah menyingsing, tetapi matahari belum juga muncul di ufuk Timur,” ia berkata

⁸⁹ *Ibid.* Smith, hlm. 5.

kepada Duta Besar Jones penuh kiasan. Bung Karno menuntut jaminan lebih jauh bahwa Belanda benar-benar akan menerima rencana Bunker. Untuk menambah tekanan dari pihak Belanda, Bung Karno menggunakan kembali strategi perjuangannya, menyiratkan bahwa dia masih tetap berencana menyerang Belanda Di Irian Barat. Pada tanggal 5 Juli 1962, dia memberitahu Pejabat Sekretaris Jendral PBB U Thant bahwa sekiranya cara diplomasi gagal, Indonesia akan merebut Irian Barat dari Belanda dengan kekuatan bersenjata. Sekian tahun kemudian, ketika menceritakan kembali peristiwa itu Bung Karno mengatakan bahwa:

“Saya sekarang mesti menggunakan cara yang keras. Tidak ada jalan lain untuk membuat OLDEFO (Old Established Force, kekuatan-kekuatan mapan Dunia) menghormati Indonesia. Tidak ada lagi diskusi, mulai dari saat ini, kami akan menjawab dengan senjata ... lupakan saja itu perundingan. Kami menempuh cara militer sebagai cara penyelesaian yang terbaik. Dua kali pesawat U-2 terbang di atas Irian Barat, tetapi perintah saya adalah “jangan tembak”. Mereka selalu mengejek Sukarno sebagai tukang gertak. Baiklah, sekarang mereka lihat sendiri barisan bersenjata sedang mengepung Irian Barat dan di lautan kapal-kapal siap menyerang. Sementara itu sejumlah pasukan sedang bersiaga untuk bergerak menurut komando saya. Biarlah mulut mereka sendiri yang akan memberitakan bahwa Sukarno bukanlah tukang gertak, bahwa dia siap untuk maju ke medan perang”.⁹⁰

Sadar bahwa bung Karno tidak sekedar menggertak, pada tanggal 16 Juni 1962 perwakilan Belanda untuk PBB C.W.A. Schuman, menyatakan kepada U. Thant bahwa pemerintahnya “secara prinsip” menerima rencana Bunker. Namun demikian Indonesia tetap saja tidak yakin. Indonesia baru akan yakin jika Belanda mau menerima syarat bahwa rakyat Papua akan menentukan nasib sendiri setelah, dan mau buka

⁹⁰ *Ibid.* Baskara, hlm. 261-262.

sebelum, peralihan pemerintahan ke tangan Indonesia. Sementara itu Indonesia terus memperkuat kehadiran militernya di Irian Barat melalui sebuah operasi militer yang dinamakan Operasi Mandala, yang dipimpin oleh Mayor Jendral Soeharto kelak menjadi Presiden Indonesia. Satuan-satuan militer Indonesia mempersiapkan diri untuk merebut wilayah tersebut dengan kekuatan bersenjata.

Takut akan serangan Indonesia yang sebentar lagi dilancarkan, Washington memberikan tekanan kepada Den Haag maupun Indonesia untuk membuka kembali perundingan. Kedua belah pihak yang bertikaipun menanggapi dengan baik. Pada tanggal 12 Juli 1962 pembicaraan Middleburg kembali digelar, dengan Bunker sebagai penengahnya.

Seperti dalam perundingan pertama, para delegasi tersebut dengan segera menghadapi suatu hambatan yang besar. Sementara Belanda ingin memaksimalkan waktu selama periode peralihan guna memastikan bahwa rakyat Papua bebas untuk menentukan pilihan mereka, Indonesia menentang proposal ini. Menunjuk pada ketetapan rencana Bunker yang mengatur bahwa pemerintahan PBB akan berlangsung dalam kurun waktu satu atau dua tahun, Menteri Luar Negeri Subandrio meminta bahwa pemerintahan itu akan berakhir pada tanggal 1 Januari 1963. Sebagaimana dilaporkan New York Time, Menteri Indonesia tersebut menuntut bahwa selama periode pemerintahan peralihan yang singkat, PBB hanya akan memainkan peran simbolis. Lebih jauh, Subandrio mengusulkan supaya

militer Indonesia yang saat itu sudah berada di wilayah tersebut diperbolehkan tetap tinggal dan menjalankan tugas militer mereka selama periode peralihan pemerintahan kepada PBB. Ketika Belanda menolak tuntutan-tuntutan ini, Subandrio sekali lagi mengancam akan menarik diri dari perundingan dan kembali ke Indonesia.

Robert Kennedy dan John F. Kennedy mendesak Subandrio untuk tidak memutuskan keluar dari pembicaraan. Dalam sebuah pembicaraan dengan Menlu RI tersebut pada tanggal 20 Juli 1962, Robert mengingatkan bahwa perundingan Middleburg hampir mencapai kata akhir yang baik. Dia berharap bahwa tidak ada tindakan yang diambil yang akan menghalangi tercapainya penyelesaian yang damai dan abadi. Presiden Kennedy juga mendesak Subandrio untuk mencari solusi yang bermartabat dan memuaskan untuk permasalahan yang ada. Subandrio tidak dapat diyakinkan dan tetap meninggalkan Middleburg, tetapi menyangkal bahwa Indonesia yang menghentikan perundingan. Dia setuju untuk mengizinkan anggota-anggota delegasi Indonesia yang lain melanjutkan perundingan tersebut.

Sebelum meninggalkan Washington, Subandrio masih mau berpartisipasi sebentar dalam perundingan. Hingga tanggal 1 Agustus 1962, para delegasi telah menyetujui butir-butir “kesepakatan awal” untuk menyelesaikan perselisihan mengenai status Irian Barat. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a) Segera setelah Resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan, (pemerintah) Belanda akan mengalihkan pemerintahan kepada UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*, Otoritas eksklusif sementara PBB).
- b) Otoritas eksklusif sementara ini akan menentukan dimulainya proses peralihan pemerintahan kepada Indonesia sewaktu-waktu setelah Mei 1963.
- c) Pasukan Indonesia di Irian Barat akan berada di bawah kendali UNTEA
- d) UNTEA boleh mendayagunakan para pejabat Indonesia dan Belanda.
- e) Satu tahun sebelum penentuan pendapat rakyat (PEPERA), yang mesti dilaksanakan sebelum 1969, sekretaris Jendral (Sekjen) PBB akan menunjuk wakilnya dan staf untuk menasihati dan membantunya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- f) Bendera Indonesia boleh dikibarkan di samping bendera PBB mulai Januari 1963.⁹¹

Pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia secara resmi menerima kesepakatan awal ini, dan menandatangani sebagai hasil akhir pembicaraan New York.⁹² Kedua belah pihak setuju bahwa sebuah otoritas PBB akan berada di bawah UNTEA akan bertindak selaku pengembalian pemerintahan mulai 1 Oktober 1962, diikuti oleh peralihan

⁹¹ Ibid. <http://Wikipedia.Mobi/id>. Diakses tanggal 20 November 2010.

⁹² Perjanjian New York 15 Agustus 1962, dibuat atas desakan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah berselisihan antara Jakarta dan Den Haag atas status politik orang Papua. (Socratez Sofyan Yoman, *Pemusnahan Etnis Melanesia*, Yogyakarta, Galang Press, hlm. 113.

pemerintahan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Perjanjian itu juga menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Desember 1962, Indonesia diperbolehkan untuk mengibarkan benderanya di wilayah tersebut di samping bendera PBB. Tambahan pula, sebelum akhir 1969, suatu “penentuan pendapat rakyat yang bebas”, akan digelar bagi rayat Papua di bawah pengawasan PBB untuk mencari tahu apakah mereka memilih untuk merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia. Personil militer Indonesia yang telah berada di Irian Barat akan tetap berada di wilayah tersebut dan akan berada di bawah kendali PBB.⁹³

Perjanjian itu mampu menyelamatkan muka Belanda di dunia internasional, dan secara umum rancangan ini menguntungkan posisi Indonesia. Hal itu juga menjadi suatu kemenangan politis bagi Indonesia. Kesepakatan yang diperbolehkan mengibarkan bendera Indonesia di Irian Barat mulai 1 Januari 1963, misalnya, memenuhi janji yang pernah diucapkan Bung Karno kepada Rakyat Indonesia bahwa “sebelum ayam jago berkokok pada tahun baru 1963” Irian Barat akan “kembali” ke pangkuan ibu pertiwi. Dipilihnya tanggal 15 Agustus untuk menandatangani perjanjian itu juga memungkinkan presiden Indonesia untuk mengumumkan kemenangan diplomatis ini kepada rakyat pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1962. Lebih jauh tanggal peralihan pemerintahan atas wilayah Irian Barat kepada Indonesia

⁹³Setelah itu pemerintah Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jendral PBB yang akan meneruskannya kepada sidang Majelis Umum ke-24 PBB yang akan dibuka pada tanggal 16 September 1969 dan berlangsung selama tiga bulan. (*Ibid.* Hendoro Subroto hlm.166).

pada 1 Mei 1963 memenuhi tuntutan keras Indonesia waktu pemerintahan PBB sebagaimana diatur dalam rencana Bunker dipersingkat. Sekali lagi dengan memadukan strategi perjuangan dan diplomasi, Bung Karno dan rakyat Indonesia berhasil meraih kemenangan politik yang besar dalam usaha mereka untuk melawan sisa-sisa kekuasaan kolonial di Irian Barat.⁹⁴

Sedangkan Belanda merasa bahwa ia dipaksa menghinai sentimen nasionalis penduduk Irian Barat, yang membangkitkan nasionalisme penduduk Irian Barat adalah Belanda sendiri. Seperti yang dinyatakan perdana Menteri De Quai: “kami dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan kami, dan bertentangan dengan segala hal yang kami hormati.”⁹⁵ Belanda yang sejak awal mengharapkan dukungan dari Amerika Serikat sebagai sekutunya ternyata dalam perundingan ini tidak seperti yang diharapkan, Amerika Serikat justru mendukung keinginan Indonesia.

D. Pemerintahan Sementara UNTEA di Irian Barat

Pada 15 Agustus 1962, persetujuan antara Jakarta dan Den Haag tercapai yaitu perjanjian antara Belanda dan Indonesia mengenai status Irian Barat. Maka dibentuklah suatu badan pemerintahan sementara yang diberi nama UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*)

⁹⁴ Menurut Indonesia, sejarah integrasi Papua (dahulu Nedelands Nieuw Guinea-Irian Barat-Irian Jaya) sudah selesai. Dasarnya adalah *New York Agreement* 15 Agustus 1962, suatu kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan Amerika, yang berlanjut ke Pepera 1969 sampai Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 November 1969. (Frits Bernard Ramandey, *Mengadili Demokrasi dan Perjuangan Damai Rakyat Papua*, Jayapura, LPS-OTSUS Papua, 2008, hlm. 12).

⁹⁵ *Ibid.* Hilman Adil, hlm. 215.

yang dibentuk oleh PBB. Pada tanggal 1 Oktober pemerintahan UNTEA akan dimulai. Dalam pelaksanaan pemerintahan UNTEA berada di bawah kekuasaan sekretaris Jendral PBB dan dikepalai oleh seorang administrator PBB yang diangkat oleh sekretaris Jendral PBB dengan persetujuan pemerintah Belanda dan Indonesia.⁹⁶ Seorang administrator diberi tugas untuk menjalankan pemerintahan di Irian Barat untuk jangka waktu satu tahun⁹⁷ sesuai dengan petunjuk dari Sekretaris Jendral PBB. UNTEA mempunyai tugas pokok antara lain;

1. Menerima penyerahan pemerintahan atas Irian Barat dari pihak Belanda
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu (selama masa yang sudah ditentukan oleh PBB)
3. Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahan di Irian Barat, UNTEA wajib melaksanakan tugas-tugas antara lain: pertama, memelihara keamanan dan ketertiban umum; kedua, mengumumkan dan menerangkan secara luas ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Jakarta dan Den Haag; dan ketiga, memberitahukan kepada rakyat Irian Barat mengenai penyerahan

⁹⁶ Untuk pertama kali dalam sejarah, Sekretariat PBB bertanggung jawab sepenuhnya atas pemerintahan sebuah daerah. "saya merasa bahwa persetujuan ini merupakan preseden yang membuat sejarah," kata Sekretaris Jendral pada saat itu, U Thant yang berasal dari Burma. Juga membuat sejarah dalam arti bahwa dalam waktu singkat harus diadakan seperangkat pegawai pemerintah yang lengkap. Tugas ini jatuh diatas pundak wakil kepala cabinet U Thant, Jose Rolz-Bennett dari Guatemala. Ia juga menjabat administrator daerah itu sampai pada tanggal 15 November 1962 dan di lanjutkan oleh Djalal Abdoh dari Iran. (*Ibid.* Pim School, hlm. 553).

⁹⁷ *Ibid.* Socratez, hlm. 118

pemerintahan kepada pihak Indonesia dan mengenai ketentuan-ketentuan penentuan nasib sendiri sebagaimana telah ditetapkan dalam persetujuan.

98

Pemerintahan UNTEA walaupun bersifat sementara, namun mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan baru dari pemerintahan sebelumnya atau dengan kata lain UNTEA mempunyai wewenang untuk mengubah peraturan yang sudah ada dan mengubahnya menjadi sesuai dengan keinginan UNTEA. Misalnya saja pada masa pemerintahan Belanda para karyawan Indonesia tidak akan bekerja di sana namun setelah pemerintahan sementara ini terbentuk pegawai Indonesia dapat dengan mudah bekerja dalam dinas pemerintahan UNTEA. Namun jabatan-jabatan tertinggi seperti direktur departemen, residen dan kepala polisi semuanya harus dijabat oleh pejabat berkebangsaan lain. Tidak hanya itu UNTEA juga mempunyai wewenang mengeluarkan paspor bagi penduduk Irian Barat yang memintahnya. Semua biaya yang dikeluarkan selama masa pemerintahan UNTEA akan dipikul sama rata oleh pemerintahan Belanda dan Indonesia.

Pemerintah Den Haag berusaha menghimbau agar korps pegawainya sendiri sebanyak mungkin tetap bekerja, tetapi usaha ini tidak berhasil. Menurut sebuah laporan PBB tentang soal itu tiga perempat dari aparat pemerintah Belanda meninggalkan Irian Barat menggunakan kapal KPM sebelum penyerahan pemerintahan kepada PBB. Rolz-Bennett harus

⁹⁸ <http://reocities.com/capitolhill/senate/4931/main3.htm>. diakses pada tanggal 24 November 2010.

bertindak cepat menghadapi kekosongan pegawai. Ia mengambil pegawai dari mancanegara yang sebenarnya tidak tahu banyak mengenai wilayah Irian Barat.⁹⁹ Karena kurangnya pengetahuan para pegawai ini tentang permasalahan yang mereka hadapi maka dalam waktu kurang lebih satu tahun terjadi tiga kali pergantian *divisional commissioner* (kepala daerah) dua dari Inggris dan satunya lagi dari Yamaika, ditambah dengan calon kepala daerah dari Indonesia.

Pemerintahan UNTEA bersifat sementara, dan hanya akan berlangsung beberapa bulan. Oleh karena itu susunan organisasi dan tata kerjanya menggunakan susunan yang sudah ada kerja yang pernah digunakan oleh pemerintahan sebelumnya (*Nederland New Guinea*). Pemerintahan pada masa UNTEA dibagi dalam delapan departemen dan masing-masing dikepalai oleh seorang direktur. Adapun departemen yang dimaksud antara lain; *Department of cultural Affairs (including Education)*, *Department of economic Affairs*, *Department of Finance*, *Department of Public Works*, *Department of Social Affairs and*, *Departement of Transport and Power*.¹⁰⁰

Administrator dibantu oleh sebuah *Government Secretariat*. Hal ini sama seperti zaman Belanda, terdapat enam divisi yang dikepalai oleh *Divisional Commissioner/Resident*. Divisi dibagi lagi kedalam Sub-divisi

⁹⁹ ... Tenaga dari berbagai bangsa yang terbawa arus pasang surut politik internasional itu dipantai terpencil ini masih sempat mendapatkan sisa-sisa pegawai dari pemerintahan sebelumnya; tenaga lokal dan beberapa orang Belanda, diantaranya seorang referendaris, dua orang jawatan pekerjaan umum, seorang tenaga pertanian dan pemerintahan. (*Ibid.* Pim Schoorl, hlm. 555).

¹⁰⁰ John RG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta, Grasindo, 1993, hlm. 54-55.

dan district. Keenam divisi antara lain berada di Hollandia (Jayapura), Biak, Manokwari, Fak-fak, Merauke dan Pegunungan Jayawijaya (*Centra Highlands*).

Bidang keamanan dan ketertiban umum ada di bawah Pimpinan Mayor Jendral Said Uddin Khan dari Pakistan. Pasukan Indonesia digabungkan dengan pasukan PBB disamping kontingen dari negara lainnya. UNTEA memakai tenaga dari kepolisian bekas pemerintahan Belanda yang semuanya mayoritas penduduk asli Irian Barat, sedangkan untuk memperkuat angkatan kepolisian PBB menyiapkan suatu *Unaited Nasion Security* (UNSF) yang terdiri dari pasukan dari Pakistan, Angkatan Udara Amerika Serikat, inspektur polisi dari Filipina, tentara dari Kanada, dan Indonesia. Sedangkan pasukan yang sudah berada di wilayah Irian Barat ditempatkan di bawah kekuasaan Sekretaris Jendral PBB dan diperuntukkan sebagai pasukan keamanan di Irian Barat.¹⁰¹

Sejak 1 Oktober 1962 mulai berlangsung pemerintahan UNTEA di bawah pemimpin Administrator Jose Djalal Abdoh. Mulai pada saat itu juga bendera PBB berkibar berdampingan dengan bendera Belanda di Irian Barat sampai dengan tanggal 31 Desember 1962. Bendera Belanda diturunkan dan sebagai gantinya dikibarkan bendera Indonesia berdampingan dengan bendera PBB.

Secara pelan tetapi pasti Administrator UNTEA mengganti pegawai-pegawai dari Irian Barat yang sudah ada dengan menambah

¹⁰¹http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perjuangan_Bangsa_Indonesia_Merebut_Irian_Barat. Diakses pada tanggal 16 Nonember 2010.

pegawai dari 32 negara yang berbeda-beda, yang kebanyakan tidak mengerti bahasa Belanda maupun Indonesia. sebagai direktur, divisional commissioner, police commander, resident. Akan tetapi UNTEA masih tetap mempekerjakan beberapa orang dari Belanda dalam bidang ekonomi, keuangan, kesehatan dan pemerintahan dalam negeri. sedangkan penduduk Irian Barat yang telah lama bekerja dalam bidang administrasi dan teknis terus digunakan oleh UNTEA.

Faktor utama yang tidak memungkinkan pegawai Belanda bekerja seperti sebelumnya ialah bahwa persetujuan Belanda-Indonesia memberi tugas yang lebih bersifat politis kepada UNTEA. Tugas tersebut meliputi penyerahan secara luwes daerah tersebut kepada Indonesia, dan bersama dengan itu memberi penerangan kepada penduduk Papua tentang hak mereka dalam situasi yang baru dan melindungi hak rakyat Irian Barat.¹⁰²

Pemerintahan UNTEA juga mempersiapkan pembangunan Irian Barat untuk masa yang akan datang di bawa pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu tiap-tiap departemen divisi dibentuk pejabat-pejabat Indonesia sebagai deputy direktur dan deputy resident. Dengan dimasukkannya pejabat-pejabat Indonesia maka pejabat-pejabat Belanda yang sudah lama bekerja di sana meninggalkan Irian Barat. Hingga Maret 1963 praktis semua jabatan dalam pemerintahan UNTEA telah berada di tangan Bangsa Indonesia, kecuali jabatan-jabatan tertentu yang masih dipegang oleh

¹⁰² *Ibid.* Pim Schoorl, hlm. 553.

anggota PBB yang berkebangsaan lain hingga akhir masa UNTEA 30 April 1963.

Dengan banyaknya pegawai Indonesia yang bekerja di Irian Barat pada masa pemerintahan UNTEA, sebenarnya PBB telah secara tidak langsung mempersiapkan Irian Barat kelak akan menjadi bagian dari Bangsa Indonesia. Pelan tetapi pasti banyak sekali jabatan penting yang sebelumnya dikuasai oleh pegawai Belanda diambil alih oleh pejabat-pejabat Indonesia. Perwakilan pejabat Indonesia di Irian Barat dipimpin oleh Sudjarwo Tjondronegoro, SH. Sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh L.J. Goedharta. Keberhasilan pemerintahan sementara UNTEA ditandai antara lain oleh; terpeliharanya keamanan dan ketertiban, dipertahankannya stabilitas perekonomian dengan persediaan barang-barang pokok yang mencukupi, dijalankannya pembangunan proyek umum seperti; rumah sakit, dermaga, sekolah, pusat penelitian pertanian, penyimpanan air minum, gedung perwalikan rakyat, gedung pengadilan, perluasan jalan dan pembuatan landasan pesawat terbang. UNTEA benar-benar mempersiapkan wilayah tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Indonesia.¹⁰³

Pemerintahan sementara UNTEA dibentuk berdasarkan atas kerja sama diplomatik yang tergesa-gesa di bawah tekanan internasional, terutama Amerika Serikat, dan ancaman serangan militer Indonesia. Aturan dalam persetujuan inipun terkesan samar tentang apa yang

¹⁰³*Ibid.* Baharudin Lopa, hlm. 278.

seharusnya dirumuskan paling akurat. Dalam menentukan nasib sendiri rakyat Irian Barat. Persetujuan Jakarta dan Den Haag tidak disahkan dengan keputusan Dewan Keamanan, tetapi dilakukan dengan pemungutan suara dalam Sidang Umum PBB. Persetujuan ini mencenggangkan Uni Soviet dengan mudah menyetujui perjanjian itu, walaupun dalam kesempatan lain Uni Soviet termasuk negara yang selalu memberi protes keras, karena dalam keputusan ini telah melangkai Dewan Keamanan PBB. Mengambarkan situasi politik internasional dua blok yang berkuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet masih mencoba untuk mengambil hati Indonesia. Berbeda dengan negara Afrika maupun Asia lebih cenderung untuk tidak campur tangan masalah Irian Barat, tetapi kenapa Jakarta menginginkan Irian Barat? Sedangkan Belanda bersikap tidak tegas dan cenderung menerima resolusi PBB.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

DAMPAK PERSELISIHAN JAKARTA DAN DEN HAAG

Ketika Irian Barat masih tetap di kuasai oleh Den Haag (Belanda) dan usaha-usaha bilateral mengalami kegagalan, maka pemerintah Indonesia sejak tahun 1954 berturut-turut membawa masalah Irian Barat ke Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1957. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan dalam pidatonya, bahwa Indonesia akan menempuh “jalan lain” untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan Belanda, apabila sidang ke-12 sekali lagi tidak berhasil menyetujui resolusi tentang Irian.¹⁰⁴

Jakarta mulai jenuh dengan sikap Den Haag yang tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Maka Indonesia mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan masalah Irian Barat antara lain; memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tahun 1960, mempersiapkan peralatan militer Indonesia, Trikora 1961, pembentukan Komando Mandala pembebasan Irian Barat, dan perang antara Jakarta dan Den Haag di Irian Barat.

A. Pemutusan Hubungan Diplomatik

Konferensi Meja Bundar 1949, diadakan dengan tujuan untuk menyerahkan kedaulatan atas Hindia-Belanda kepada Indonesia Serikat. dalam konferensi Meja Bundar 1949, Indonesia berharap bahwa semua wilayah bekas jajahan Hindia-Belanda dapat diserahkan kepada Indonesia termasuk Irian Barat. Namun dalam penyerahan kedaulatan tersebut Belanda

¹⁰⁴ *Ibid.* Marwati Djoened, hlm. 331-332.

tidak memasukan Irian Barat dengan alasan Irian Barat sudah menjadi bagian dari kerajaan Belanda dan secara etnis, dan kepercayaan wilayah Irian Barat berbeda dengan penduduk Indonesia.

Pada bulan Desember 1950, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan piagam PBB pasal 73 e.¹⁰⁵ Hal ini menjadikan posisi Indonesia semakin sulit, karena Indonesia yang sebelumnya telah mengklaim Irian Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Dengan adanya keputusan PBB, maka Den Haag mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, namun Indonesia dengan tegas menolak dan mengambil sikap penentangan dan beberapa kali melakukan penyerangan di Irian Barat. Setelah Indonesia beberapa kali melakukan penyerangan masalah inipun mulai mendapat perhatian serius dari dunia internasional. Belanda mempercepat pembangunan dan program pendidikan di Irian Barat, serta mempersiapkan kemerdekaan atas Irian Barat.

Adanya percepatan persiapan kemerdekaan Irian Barat yang dilaksanakan oleh Belanda, memberikan gambaran yang kurang mengembirakan bagi Jakarta, sehingga sebagai kelanjutan konfrontasi, pada 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Propinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu yang berada di pulau Tidore,¹⁰⁶ dengan gubernur pertama Zainal Abidin Syah, dilantik pada tanggal 23 September 1956.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid.* Baharuddin Lopa, hlm. 82.

¹⁰⁶ Peresmian pembentukan propinsi Irian Barat dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1956. (Ginandjar Kartasasmita, dkk. *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, PT Tira Pustaka, hlm. 100).

Hubungan Jakarta dan Den Haag semakin tegang saat permasalahan ekonomi dijadikan alat konflik. Pada tahun 1957, Presiden Sukarno mengeluarkan undang-undang nomor 86 tahun 1957 yang memerintahkan dinasionalisasikannya semua perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia. Pengambil alihan perusahaan milik Belanda dilakukan oleh kaum buruh dan karyawan di bawah komando Jendral Nasution selaku penguasa perang pusat. Memutuskan untuk mengambil-alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah. Adapun perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan antara lain:¹⁰⁸

1. Perusahaan perkebunan
2. Nethernansche Handles Mattscapij
3. Perusahaan listrik
4. Perusahaan perminyakan
5. Rumah sakit CBZ yang kemudian berubah menjadi RSCM.

Selain menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia, Presiden Sukarno juga mengeluarkan kebijakan lain, seperti; melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda, melarang maskapai penerbangan Belanda melintas di wilayah Indonesia, dan melakukan aksi mogok buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda.

¹⁰⁷ <http://individu.wikipedia.org/wiki/trikora>. diakses pada tanggal 24 November 2010.

¹⁰⁸ <http://lukulo.blogspot.com/2008/01/pembebasan-Irian-barat>. diakses pada tanggal 24 November 2010.

Pendirian Indonesia sangat kuat dalam mempertahankan Irian Barat, tetapi dalam kenyataannya Den Haag masih tetap mempertahankan Irian Barat. Berulang kali masalah Irian Barat masuk dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB, namun tetap saja Den Haag bersikeras untuk mempertahankan Irian Barat dan tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Jakarta. Maka para politisi dan militer Indonesia memusatkan perhatian pada persoalan Irian Barat.

Jalur diplomasi yang ditempuh antara Jakarta dan Den Haag selalu saja mengalami kegagalan, maka Jakarta mulai hilang kesabarannya dengan sikap Den Haag yang keras kepala, akhirnya Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1960 secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah kerajaan Den Haag dan semua warga negara Den Haag yang bekerja di Indonesia di pulangkan ke Belanda.

Pada bulan September 1960 dalam Sidang Umum Majelis PBB Presiden Sukarno berpidato dan mengatakan bahwa:

“kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral ... Harapan lenyap, kesabaran hilang, bahkan toleransipun mencapai batasnya. Semua ini kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami”.¹⁰⁹

Kenyataan di atas semakin memperkuat alasan pemutusan hubungan dengan Belanda selain faktor permasalahan konferensi Meja Bundar 1949, yang tidak kunjung terpecahkan melalui berbagai bentuk

¹⁰⁹ *Ibid.* Marwati Djoened, hlm. 333.

kegiatan diplomasi dan terlihat bahwa Belanda secara umum tidak ingin melepaskan Irian Barat ke tangan Jakarta dengan alasan bahwa secara psikologis penguasaan atas Irian Barat merupakan perwujudan eksistensi Den Haag di kawasan Asia.

B. Persiapan Peralatan Militer

Dalam Sidang Umum PBB ke-12 pembahasan masalah Irian Barat kembali mengalami jalan buntu. Sejak saat itulah Indonesia menitikberatkan perjuangan pengembalian Irian Barat melalui cara sendiri.¹¹⁰ Bagi Indonesia selanjutnya permasalahan yang segera muncul adalah bagaimana memperoleh senjata untuk menghadapi kekuatan militer Belanda di Irian Barat. Belanda memiliki persenjataan lengkap termasuk sejumlah kapal perang. Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan-pendekatan dengan Washington dimulai sewaktu KSAD Nasution ikut dalam “Delegasi Nasakom.” Tanpa perhatian dengan cara-cara yang diakui “kurang diplomatis”, Nasution berterus terang bahwa ia ingin meminta bantuan peralatan perang dari Amerika Serikat. “ untuk mengimbangi Angkatan Laut dan Angkatan Udara Belanda di Irian Barat”.¹¹¹ Dalam permintaan ini Amerika Serikat menolak untuk memberikan bantuan persenjataan kepada Indonesia dengan alasan persenjataan yang hanya ada untuk sekutu Amerika Serikat.

¹¹⁰ Hendro Subroto, *Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 166.

¹¹¹ Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 59.

Pihak Indonesia karena tidak mendapat bantuan dari A.S maka terpaksa berpaling ke Moskow.¹¹² Walaupun terasa ada keengganan pada Staf Angkatan Darat.¹¹³ Dikalangan SUAD cukup matang memikirkan untuk pergi meminta bantuan ke Blok Timur, kerana pada saat itu kecurigaan terhadap komunis masih dominan, tetapi ini harus dilakukan demi keberhasilan perjuangan merebut kembali Irian Barat. Sebelum ada kerjasama ini pada bulan Mei 1957, ketua Presidium Soviet Tertinggi K.E. Voroshilov sempat mengunjungi Indonesia.¹¹⁴

Kebutuhan untuk melancarkan serangan guna merebut Irian Barat telah mendorong pihak tentara dan pemerintah Indonesia berpaling ke Uni Soviet,¹¹⁵ yang sedang bersaing dengan Amerika Serikat maupun Cina dan sedang berusaha meningkatkan pengaruhnya di Indonesia. Pada bulan Januari 1960, Khrushchev berkunjung Jakarta sebagai tamu resmi pemerintah Indonesia dan memberikan kredit pinjaman sebesar \$250 juta dan 200 tempat tidur untuk rumah sakit kepada Indonesia. Pada bulan Januari 1961 Nasution pergi ke Moskow dan memperoleh pinjaman sebesar 450 juta dolar untuk membeli

¹¹² Bambang Widjanarko, *Sewindu Bung Karno*, Jakarta, PT Gramedia, hlm. 38.

¹¹³ Antara Sukarno dan para pemimpin Angkatan Darat mencapai persetujuan yang bulat mengenai pentingnya kampanye Irian Barat. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai dua aspek, pertama, siapa di antara kedua negara adidaya yang akan mensuplai senjata, dan kedua strategi apa yang akan digunakan untuk memperoleh kembali Irian Barat. (*Ibid.* Hilman, hlm. 197).

¹¹⁴ *Ibid.* Hikayat, hlm. 60.

¹¹⁵ Dalam rangka persiapan suatu kekuatan militer untuk merebut Irian Barat, pemerintah Republik Indonesia mencari bantuan ke luar negeri. Pada mulanya diharapkan pembelian senjata di negara-negara Barat terutama Amerika Serikat, tetapi tidak berhasil. kemudian usaha pembelian senjata itu dilanjutkan ke negara-negara Blok komunis terutama Uni Soviet. (Hikayat, *Op.cit.*, hlm. 334).

persenjataan dari Uni Soviet.¹¹⁶ Kini, untuk pertama kalinya sejak revolusi, Angkatan bersenjata mulai bertambah besar, dan mencapai jumlah sekitar 300.000 prajurit pada tahun 1961 dan 330.000 pada akhir tahun 1962. Semakin banyak peralatan Indonesia berasal dari Uni Soviet termasuk pesawat-pesawat tempur modern dan pesawat-pesawat pembom jarak jauh untuk Angkatan Udara serta kapal-kapal baru untuk Angkatan Laut. Sebagian besar peralatan baru itu jatuh ke tangan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Angkatan-angkatan yang dipandang Sukarno lebih kooperatif daripada Angkatan Darat. Akan tetapi, perang Papua masih tetap berupa kegiatan militer yang tingkatnya rendah.¹¹⁷

Pada kesempatan lain sewaktu Presiden Sukarno singgah di Moskow dalam kunjungannya ke negara-negara Eropa Timur, pihak Uni Soviet berjanji akan menambah bantuan senjata dan peralatan perang.

Uni Soviet menjanjikan untuk memberikan peralatan berat seperti; 20 pesawat pembom berjangkauan jauh TU-16, yang setengah lusinnya dilengkapi MIK-21 dan mempunyai kemampuan misil antar-pesawat. Dengan demikian Indonesia termasuk negara non-blok pertama yang dijanjikan pesawat perang yang sangat canggih oleh Uni Soviet. Uni Soviet mengharapkan Indonesia akan mampu menandingi kekuatan tempur Belanda,¹¹⁸ terutama kekuatan armada Belanda di Pasifik.

¹¹⁶Namun, demikian kesepakatan Januari 1961 itu meningkatkan jumlah keseluruhan bantuan Blok Soviet kepada Indonesia menjadi hampir \$275 juta dalam bentuk bantuan militer dan \$10 juta dalam wujud bantuan ekonomi. (*Ibid.* Baskara, hlm. 266).

¹¹⁷*Ibid.* M.C. Ricklefs, hlm. 531.

¹¹⁸Sebelumnya pada tanggal 6 April 1958 Indonesia membeli persenjataan dari Polandia, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Realisasi kontak pembelian senjata dan Uni Soviet, seluruhnya tiba

Di satu pihak Amerika Serikat menjadi kesal dan kuatir dengan sikap Indonesia yang meminta dan memperoleh perlengkapan militer dari Uni Soviet, walaupun ini merupakan konsekuensi politik yang sudah harus diperhitungkan pada waktu menolak permintaan bantuan militer Indonesia. Di pihak lain Uni Soviet senang karena dapat membantu peralatan militer kepada Indonesia, karena itu berarti secara politis Indonesia sudah dapat diperhitungkan masuk dalam kubu pengaruhnya.

Dugaan Uni Soviet ini ternyata agak meleset karena mulai Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Non-Blok di Beograd pada tanggal 1-6 September 1961, hingga meletusnya pemberontakan G. 30. S pada tahun 1965, Indonesia berangsur-angsur lebih mengikatkan diri ke Peking dari pada ke Moskow.¹¹⁹ Hal ini antara lain dapat dipantau dari peristiwa yang timbul pada parade 1 Mei 1965 di Moskow. Waktu itu Indonesia diundang dan Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Ia duduk disamping Suslov, tokoh ideologi Marxisme-Lenisme, ditengah-tengah duduk Menteri pertahanan Malinovsky kemudian pada deret depan tengah duduk L. I. Breshnev, sekretaris pertama komite Jendral Partai Komunis Uni Soviet.¹²⁰

di Indonesia pada tahun 1961, sehingga Indonesia menjadi negara terkuat di Kawasan Asia Tenggara. (*Ibid.* Hendro Subroto, hlm. 166).

¹¹⁹ Kejadian sebelumnya yang memberi kesan bahwa Indoonesia sedang beralih dari kebijaksanaan pro-Uni Soviet muncul dalam Konferensi Ekonomi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Cairo. Delegasi Indonesia menentang keikutsertaan Uni Soviet, berdasarkan pertimbangan bahwa Uni Soviet bukan negara Asia atau Afrika. Sikap ini tentulah tidak dapat diambil tanpa persetujuan para penguasa tertinggi di Jakarta. (*Ibid.* hilman Adil, hlm. 188).

¹²⁰ *Ibid.* Hikayat, hlm. 60-61.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kekhawatiran Amerika beralasan karena semua peralatan militer Indonesia berasal dari Uni Soviet. Pada bulan April 1961, Robert Kennedy dan Mc George Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu Presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung usulan ini, dengan pertimbangan iklim Perang Dingin saat itu dan khawatir Indonesia akan menjadi Komunis.

Persiapan-persiapan yang dilakukan Jakarta bukan saja pada kekuatan militer, namun juga dalam bidang diplomatik maupun Ekonomi. Dalam usaha diplomatik, Indonesia mendekati negara-negara seperti: India, Pakistan, Australia, Thailand, Selandia Baru, Jerman, Britania Raya, dan Perancis, dengan tujuan agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Jakarta dan Den Haag.

Jelas bahwa kekecewaan Jakarta terhadap Den Haag atas Irian Barat yang tidak kunjung diserahkan kedaulatan atas wilayah tersebut kepada Jakarta. Dengan tegas pula Jakarta mengambil langkah serius menyelesaikan masalah Irian Barat melalui perang.

C. Trikora

Perbedaan paham antara Jakarta dan Den Haag mencapai puncaknya pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pemutusan hubungan ini dilakukan karena Indonesia yang sejak awal mengklaim seluruh wilayah bekas jajahan Hindia-Belanda, termasuk Irian Barat sebagai bagian wilayah

Indonesia, namun demikian pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu propinsi kerajaan Belanda. Pihak parlemen Belanda beralasan bahwa Irian Barat tidak diserahkan kepada Indonesia, karena Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai simbol kekuatan Belanda di wilayah Asia Tenggara, walaupun masyarakat Belanda sendiri tidak menghendaki Irian Barat, karena tidak efektif untuk mengelola Irian Barat. Banyak pegawai dan pengusaha Belanda yang tidak tertarik pada Irian Barat dengan alasan wilayah tersebut masih tertutup dan untuk membangun wilayah Irian Barat membutuhkan biaya yang cukup besar.

Adanya pemutusan hubungan oleh Jakarta terhadap Den Haag tidak membuat Belanda menyerah dalam mempertahankan dan mengusahakan kemerdekaan Irian Barat. Namun Belanda membuka peluang untuk pemilihan umum guna memilih perwakilan rakyat Papua dalam pemerintahan. Mulai dari tanggal 9 Januari 1961, di 15 distrik. Hasilnya adalah terpilih 26 wakil, 23 orang Papua dan 1 Wanita. Dewan Papua ini dilantik oleh gubernur Plattel pada tanggal 1 April 1961, dan mulai menjabat pada tanggal 5 April 1961. Pelantikan dihadiri oleh wakil-wakil Australia, Britania Raya, Perancis, Belanda dan Selandia Baru. Amerika Serikat diundang tetapi menolak untuk hadir.¹²¹ Den Haag berusaha mendirikan negara Irian Barat dengan dukungan penduduk Irian Barat, dengan jalan memberikan peluang untuk mengadakan pemilihan umum dan pembentukan dewan Irian Barat.

¹²¹ <http://individu/wikipedia.org> Trikora. diakses pada tanggal 29 September 2010.

Sikap Den Haag yang tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui jalur diplomasi, telah menggerakkan pemerintah Indonesia mencari jalur lain untuk mewujudkan keinginannya yaitu merebut Irian Barat melalui jalur perang. Bujukan Amerika agar masalah Irian Barat diselesaikan secara damai tidak berhasil mengambil hati Indonesia.

Untuk menghadapi Belanda di Irian Barat pemerintah Indonesia pada tanggal 12 April 1961 melalui Menteri Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Darat memberitahukan kepada Gabungan Kepala Staf (GKS) bahwa Presiden selaku panglima tertinggi telah menyusun rencana operasi gabungan Irian Barat. Maka dibentuklah Dewan Pertahanan Nasional guna merumuskan cara yang paling tepat dalam menggabungkan seluruh potensi agar Irian Barat masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Indonesia.

Pada tanggal 14 Desember 1961 Dewan keamanan Pertahanan Nasional menetapkan Tri Komando Rakyat sebagai sikap yang tegas dan cepat untuk mengerahkan segala daya maupun dana agar dapat merebut Irian Barat sekaligus menanggapi pembentukan Dewan Papua oleh Belanda. Adapun isi Tri Komando Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengerahkan kekuatan guna membubarkan Dewan Daerah yang telah dibentuk oleh Belanda untuk rakyat Papua.
- 2) Pengibaran Sang Saka Merah-Putih di Irian Barat.
- 3) Persiapan mobilisasi nasional untuk merebut kedaulatan atas wilayah tersebut dari tangan Belanda.¹²²

¹²² *Ibid.* Baskara, hlm. 255.

Pengumuman Trikora itu menciptakan suasana krisis diantara para pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang merasa takut bahwa konflik militer langsung antara Den Haag dan Jakarta hanyalah masalah waktu. Mereka berusaha keras mencegah terjadinya konflik itu dan mendesak kedua belah pihak untuk mencari jalan damai.

Tri Komando Rakyat yang dikeluarkan oleh Presiden, secara langsung mengajak rakyat untuk sama-sama berjuang melawan Belanda untuk mobilisasi umum dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengagalkan usaha pembentukan Negara Irian Barat, dan Trikora juga ditunjukan kepada semua angkatan bersenjata agar bersiap-siap membebaskan Irian Barat melalui jalur perang. Walaupun pada saat itu perang belum terjadi, namun setiap saat kemungkinan untuk terjadi pertempuran antara Jakarta dan Den Haag terbuka.

Sebagai kelanjutan dari Trikora pada tanggal 1 Januari 1962 Angkatan Laut Republik Indonesia mengadakan patroli rutin di perairan Arafura dengan menggunakan kapal motor torpedo boat antara lain: Macan Tutul, Harimau dan Macan Kumbang. Dalam patroli ini dipimpin oleh Kapten Wiratno. Masing-masing kapal dilengkapi dengan kaliber 20 mm dan 40 mm.

D. Pembentukan Operasi Mandala

Untuk melaksanakan Trikora pada tanggal 2 Januari 1962 dikeluarkan keputusan Presiden selaku Panglima Tertinggi pembebasan Irian Barat No. 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala pembebasan Irian Barat.¹²³

Selaku Panglima Mandala ditunjuk Brigadir Jendral Soeharto dan Komando Mandala bermarkas di Makasar.¹²⁴ Pada tanggal 13 Januari 1962 Brigadir Jendral Soeharto dilantik menjadi Panglima Mandala dan di naikan pangkatnya menjadi Mayor Jendral. Selain itu Mayjen Soeharto merangkap sebagai Deputi Kasad wilayah Indonesia bagian Timur. Susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat sebagai berikut:

1. Panglima besar Komando Tertinggi : Presiden Sukarno
2. Wakil panglima besar : Jendral A. H. Nasution
3. Kepala staf : Mayor Jendral Achmad Yani

Sedangkan susunan Komando Mandala adalah:

1. Panglima : Mayor Jendral Soeharto
2. Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subuno
3. Wakil Panglima II : Letkol Udara Leo Wattimena
4. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir.¹²⁵
 - Staf Gabungan I : Kol. Udara Sudarmo
 - Staf Gabungan II : Kol. Amir Mahmud
 - Staf Gabungan III : Kol. Sunggoro
 - Staf Gabungan IV : Kol. Munadi

¹²³ Marwati Djoened, *Op. cit.*, hlm. 335.

¹²⁴ *Ibid.* Baharuddin Lopa, hlm. 89.

¹²⁵ *Ibid.* Marwati Djoened, hlm. 337.

- Staf Gabungan V : Letkol. Laut Suwadji
setjonegoro¹²⁶

Tugas Komando Mandala adalah merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer untuk mengabungkan Irian Barat dengan Republik Indonesia.

Reaksi Belanda dengan adanya Komando Mandala adalah Belanda mengirim kapal Induk “Karel doorman” dilengkapi dengan formasi kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam, kemudian di berangkatkan ke daerah Pasifik dalam usaha mempertahankan kolonialismenya di Irian Barat.¹²⁷

Sebelumnya Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine) telah menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Irian Barat, dan sampai tahun 1950, unsur-unsur pertahanan Papua Barat terdiri dari: (1) Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda), (2) Korps Mariniers (3) Marine Luchtvaartdienst. Keadaan ini berubah sejak tahun 1958, di mana kekuatan militer Belanda terus bertambah dengan kesatuan dari Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat Belanda) dan Marine Luchtvaartdienst. Selain itu, batalyon infantri 6 Angkatan Darat merupakan bagian dari Resimen Infantri Oranje Gelderland yang terdiri dari 3 Batalyon yang di tempatkan di Sorong, Fakfak, Merauke, Kaimana, dan Teminabuan. Belanda memperkuat militernya setelah adanya aktivitas penyusupan pasukan Indonesia di perairan Irian Barat setelah dan sebelum adanya Trikora.

¹²⁶ ... *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*, Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Jakarta, 1986, hlm. 145-146

¹²⁷ *Ibid.* Baharuddin Lopa, hlm. 76.

Untuk mensukseskan Trikomando di Irian Barat, sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 1962, Indonesia melakukan penyusupan pasukan ke seluruh wilayah Irian Barat, selain pasukan terdapat pula para sukarelawan. Dengan bantuan dari Angkatan Darat mereka diterjunkan di beberapa daerah di Irian Barat. Antara lain: Fak-Fak, Kaimana, Sorong, Teminabuan dan Merauke.¹²⁸ Meski mendapatkan perlawanan keras dari tentara Belanda, namun pengiriman pasukan tetap dilaksanakan.¹²⁹

Indonesia di bawah pimpinan Maiyen Soeharno melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan pasukan. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman di Irian Barat menggunakan pesawat angkut Indonesia, namun operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut C-47 Dakota yang berkapasitas 18 penerjun.¹³⁰ Para penerjun tersebut dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune milik Belanda.¹³¹

Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Patimura Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan. Saat persiapan keberangkatan Komando pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan disebuah perkebunan teh, selain itu juga disampaikan

¹²⁸<http://lukulo.blogspot.com/2008/01/pembebasan-Irian-Barat>.diakses pada tanggal 24 November 2010.

¹²⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Laut_Aru. diakses pada tanggal 24 November 2010.

¹³⁰ Muhammad Yamin, *Perjuangan Irian Barat atas Dasar Proklamasi*, Jakarta, NV Nusantara, 1986, hlm. 67.

¹³¹ Muhamad Yamin, *Loc.cit.*, hlm. 67.

mengenai kode dan cara-cara serta lokasi yang akan di tuju. Pada pukul 03:30 WIT, pesawat Hercules yang dikemudikan oleh Mayor Udara T. Z Abidin terbang menuju daerah Teminabuan. Mulai fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.¹³² Dalam waktu tidak lebih dari satu menit proses pendaratan delapanpuluh satu penerjun selesai diterjunkan dan pesawat Herculespun meninggalkan daerah Teminabuan.

TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia¹³³. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000. prajurit disiapkan dalam operasi tersebut.

Pengiriman pasukan di wilayah Irian Barat sukses walupun mendapat perlawanan keras dari tentara Belanda, namun ada beberapa wilayah strategis dapat direbut dan dikuasai. Melihat kenyataan itu maka, Belanda bersedia untuk berunding di lain pihak Belanda juga mendapat tekanan dari Amerika Serikat, yang sejak awal takut kehilangan pengaruhnya di Indonesia, karena melihat kebutuhan militer Indonesia condong ke Uni Soviet dan sewaktu-waktu dapat terjadi perang pengaruh antara Uni Soviet dan Amerika. Amerika Serikat mulai berusaha menandingi pengaruh Uni Soviet di Indonesia dengan mengupayakan perundingan masalah Irian Barat.¹³⁴

¹³² William. H & Soeri, *Op.cit.*, hlm. 391.

¹³³ Hendro Subroto, *Para Komando*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 169-186. Aksi operasi ini terus berlanjut setelah diadakannya PEPERA.

¹³⁴ *Ibid.* Ricklef, hlm. 535.

Campur tangan Amerika Serikat dapat pula dipandang sebagai pengakuan Amerika Serikat atas usaha Indonesia meminta janji Belanda dalam Konferensi Meja Bundar 1949, yang akan menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat satu tahun setelah penyerahan kedaulatan Indonesia. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa Amerika Serikat ingin menunjukkan kekuasaannya untuk menghadang laju pengaruh Uni Soviet di kawasan Asia.

Kegiatan Indonesia untuk aksi militernya terlihat dalam beberapa urutan yang menjadi bahan acuan Komando Mandala diadakan di Jakarta pada bulan November 1962 antara lain sebagai berikut:

1. Pangkalan-pangkalan Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang berdekatan dengan Irian Barat, dipersiapkan untuk pengepungan kekuatan militer Belanda.
2. Kesatuan-kesatuan tempur Angkatan Udara Mandala dan armada-armada dari Angkatan Laut Mandala diasingkan dipangkalan-pangkalan terdepan.
3. Kesatuan-kesatuan Angkatan Darat berangsur-angsur dipersiapkan di barisan depan.
4. Pengintai-pengintai diperhebat.
5. Komando Pertahanan Udara Gabungan menyiapkan radar-radar dan menempatkan kubu-kubu meriam penangkis serangan udara.
6. Taks-Forse Angkatan Udara Mandala dalam pase ini dari Kesatuan tempur Senopati, Kesatuan Tempur Bima Sakti, Kesatuan Tempur Baladewa.

Sedangkan Angkatan Laut Mandala terdiri dari AT (Angkatan Tugas) II dan AT 13.¹³⁵

E. Pertempuran di Irian Barat

Dalam pelaksanaan Trikora kesatuan MTB ALRI telah memulai melakukan operasi-operasi rutin sekaligus mengadakan inspeksi ke garis depan untuk meninjau lebih dekat medan terdepan di daerah perbatasan untuk menentukan rencana-rencana selanjutnya. Dalam kesatuan diikuti oleh pejabat-pejabat dari Markas Besar Angkatan Laut, yaitu Komodor Yos Sudarso Deputi KSAL, Kolonel Sudomo Kepala Direktorat Operasi MBAL serta pejabat-pejabat lainnya dari Angkatan Darat, yaitu Ass.II KASAD dan perwira-perwira staf lainnya. Tugas dari kesatuan MTB adalah mengadakan infiltrasi ke daratan Irian Barat. Dalam kesempatan yang sama Belanda juga mengadakan patroli baik lewat udara maupun laut di perairan yang sama.¹³⁶

Pertempuran Jakarta dan Indonesia di Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika tiga kapal milik Indonesia yaitu; KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 04-49 LS dan 135-02 BT. Menjelang pukul 21:00 WIT, Kolonel Marsyid melihat tanda diradar bahwa di depan lintasan tiga kapal Indonesia, terdapat dua kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri.¹³⁷ Tanda itu tidak bergerak yang artinya kapal tersebut sedang berhenti. Tiga kapal Indonesia melanjutkan perjalanan patroli dan tiba-tiba suarah pesawat jenis

¹³⁵ *Ibid.* Baharuddin Lopa, hlm. 120.

¹³⁶ *Ibid.* Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat, hlm. 176.

¹³⁷ *Ibid.* Ricklefs, hlm. 534.

Neptune milik Belanda mendekat kapal Indonesia dan memberikan peringatan dengan bom yang digantungkan pada parasut.

Mengetahui keadaan yang sangat berbahaya karena serangan mendadak dari Belanda Komodor Yos Sudarso yang berada di RI Macan Tutul mengambil alih pimpinan dan segera memberikan perintah untuk memberikan serangan balasan. Pertempuran Belanda dan Indonesia tidak seimbang, pihak Belanda menggunakan penyerangan melalui udara maupun laut dengan posisi yang baik serta peralatan perang yang lengkap. Sedangkan Indonesia pada saat itu hanya mengandalkan serangan laut. Untuk keselamatan kapal Indonesia lainnya Yos Sudarso memerintahkan agar RI Macan Tutul mengadakan manuver.¹³⁸

Kapal Indonesia KRI Macan Tutul terjadi kontak senjata yang tidak seimbang dengan Belanda, sehingga kapal dan awaknya tenggelam dan menewaskan Kapten Wiratno dan Komodor Yosudarso yang berada di dalam kapal tersebut. Komodor Yos Sudarso menyampaikan pesan terakhirnya dengan mengucapkan “kobarkan semangat pertempuran!”¹³⁹ Peristiwa Pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962 merupakan pelajaran bagi pasukan tempur Indonesia, karena penyerangan dari Belanda secara tiba-tiba dan kapal Indonesia belum siap untuk memberikan perlawanan kepada kapal Belanda, sedangkan Belanda sudah siap untuk melakukan penyerangan terhadap kapal Indonesia dengan semua peralatan militer pada saat itu,

¹³⁸ *Ibid.* Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat, hlm. 177.

¹³⁹ *Ibid.* Rosihan Anwar, hlm. 103.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sedangkan Indonesia hanya bisa memberikan serangan balasan untuk melindungi diri dari serangan Belanda.

Saat pertempuran 15 Januari 1962 di kepulauan Laut Aru berakibat semakin tinggi tingkat ketegangan politik antara Jakarta dan Den Haag, dan bahkan dunia. Belanda menyiarkan perang di Laut Arafura melalui Komando Angkatan Laut Belanda di Irian Barat yang disiarkan di Den Haag pada hari Senin malam. Ia mengatakan bahwa “kapal-kapal perang Indonesia yang dengan kecepatan tinggi sedang menuju ke Pantai Irian Barat telah melepaskan tembakan kepada kapal-kapal Belanda. Dalam pertempuran yang kemudian terjadi, sebuah kapal cepat torpedo (MTB) Indonesia terbakar dan kapal-kapal Belanda berhasil menangkap awak kapalnya yang mencoba menyelamatkan diri dalam sebuah sekoci pendarat. Jumlah orang Indonesia yang tertangkap itu dua kali lebih besar dari pada jumlah awak kapal yang normal diperlukan bagi sebuah kapal cepat torpedo. Jumlah awak kapal yang normal bagi kapal tersebut adalah 20 sampai 30 orang tetapi agaknya MTB-2 Indonesia itu mengangkut 70 sampai 90 orang. Hal ini menunjukkan pihak Indonesia sedang berusaha melakukan pendaratan di pantai Irian Barat.”¹⁴⁰ Demikian keterangan dari Komando Angkatan Laut Belanda.

Sedangkan Radio Australia menyiarkan bahwa Belanda menawan 50 prajurit Indonesia dalam pertempuran di Laut Aru. Siapa yang pertama kali melepaskan tembakan? Belanda atau Indonesia? Kantor berita tersebut menyiarkan bahwa “kapal-kapal perang Belanda mulai menembak formasi

¹⁴⁰ Rosihan. Rosihan Anwar, *Loc.cit.*, hlm. 103.

kapal-kapal perusak Indonesia di perairan teritorial Belanda yang sedang bergerak ke arah pantai Selatan Irian Barat.”¹⁴¹

ketegangan bertambah dan kedua pihak berlomba memperkuat dan mengirimkan pasukannya ke daerah perbatasan karena memungkinkan setiap saat bisa terjadi perang terbuka yang lebih besar. Setelah peristiwa di Laut Aru Indonesia tidak begitu saja menyerah. Indonesia justru mengirim pasukannya dengan menyusup ke seluruh wilayah Irian Barat baik melalui darat maupun laut.

Sebelum maupun sesudah Trikora operasi penyusupan ke wilayah Irian Barat dalam rangka melumpukan kekuatan Belanda terus dilakukan oleh Indonesia, baik melalui jalur laut maupun udara. Pada tanggal 17 Mei 1962 pasukan Indonesia diterjunkan di Sorong dan Kaimana dan berhasil menguasai kedua wilayah tersebut, tanpa mendapatkan perlawanan, sedangkan penerjun di bawah pimpinan Letnan Udara II Manuhua yang di terjunkan sebanyak 39 orang dengan menggunakan pesawat Dokota di Tanibuan mengalami kegagalan, karena salah sasaran. Para prajurit tersebut diterjunkan tepat diatas atap tentara Belanda sehingga terjadi kontak senjata antara tentara Indonesia dan Belanda.¹⁴² Situasi semakin tegang Amerika dan Inggris mendesak Jakarta dan Den Haag untuk duduk bersama dan berunding lagi. Amerika Serikat melalui Bunker menyampaikan konsepnya untuk menyelesaikan masalah antara Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat pada tanggal 26 Mei 1962. Intinya penyerahan administrasi

¹⁴¹ Rosihan Anwar, *Loc.cit.*, hlm. 103.

¹⁴² *Ibid.* Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat, hlm.183-184.

pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia melalui badan pemerintahan PBB serta menjamin adanya kesempatan menentukan pendapat bagi rakyat Irian Barat¹⁴³ Pada tanggal 14 Agustus 1962 operasi penerjunan pasukan dalam jumlah yang sangat besar dilaksanakan di beberapa wilayah di Irian Barat. Antara lain Sorong, Fak-fak dan Kaimana.¹⁴⁴

Pada tanggal 4 Juni 1962 dengan daerah sasaran Merauke dengan menggunakan tiga pesawat Hercules yang memuat pasukan terdiri dari 55 pasukan khusus dan 160 dari Batalyon di bawah pimpinan Mayor Jendral Benny Murdani. Melakukan penerjunan di Merauke namun, dalam penerjunan ini terjadi kontak senjata dengan tentara Belanda. Dengan adanya kontak senjata yang terjadi maka Belanda menambah pasukan dari dua kompi menjadi dua batalyon.¹⁴⁵

Selanjutnya operasi paling besar terjadi pada bulan Juli 1962, yang dikenal dengan operasi Jayawijaya dengan sasaran Sorong, Kaimana, Kotabaru (Jayapura) dan Fak-fak. Operasi pertama terjadi pada tanggal 19 Juli 1962. Tentara Indonesia merebut keunggulan udara dan laut dengan cara membombardir dan menembak dari udara oleh AULA dan pasukan-pasukan serta pemburuan bebas oleh ALLA, kedua, pada tanggal 20 Juli 1962 dengan cara memberikan serangan vertikal oleh kesatuan tugas I dan II horizontal oleh angkatan tugas Amphibi ATA-17, ketiga, pada tanggal 20 Juli 1962 dengan sasaran merebut Kotabaru dengan kesatuan tempur Gatotkaca, dan ketiga,

¹⁴³ Api Perjuangan Irian Barat, *Op.cit.*, hlm. 188.

¹⁴⁴ *Op.cit.*, hlm. 182.

¹⁴⁵ *Ibid.* Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat, hlm. 186.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

operasi dengan sasaran yang sama diperkuat oleh kesatuan tempur divisi Lesmono untuk menempatkan kekuasaan di Korabaru.¹⁴⁶

Situasi yang semakin tegang membuat warga Eropa di Irian Barat mulai panik, karena sewaktu-waktu perang antara Indonesia bisa saja terjadi. Pada bulan Juli 1962 dengan adanya ancaman konflik bersenjata, para wanita dan anak-anak Eropa di evakuasi. Pada 10 Agustus 1962, masih diadakan sidang dewan daerah, pada hari yang sama di Irian Barat diadakan latihan menghadapi bahaya. Delapan hari kemudian, tanggal 18 Agustus 1962 pukul 09:30 diadakan gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Dalam situasi yang semakin panas Belanda tetap melanjutkan pembangunan baru kantor dewan daerah.¹⁴⁷

Situasi politik di Irian Barat semakin tidak menentu. Tidak lama kemudian datang wakil-wakil UNTEA dan para perwira Indonesia. Sementara itu pasukan Indonesia yang sebelumnya sudah mendarat di Misool harus ditarik kembali. Walaupun antara Jakarta dan Den Haag telah sepakat untuk menghentikan tembak-menembak, namun di beberapa daerah masih saja jatuh korban dalam pertempuran antara militer Indonesia dan Belanda terutama di Raja Ampat.¹⁴⁸ Banyak penduduk asli Papua yang merasa terganggu dengan aktivitas militer Indonesia dan Belanda. Belanda melaporkan situasi ini kepada PBB tetapi PBB tidak menenggapinya.

Keberadaan UNTEA di Irian Barat memberikan kemudahan bagi Indonesia untuk mewujudkan keinginannya. sejak pemerintahan baru tersebut

¹⁴⁶ *Op.cit.*, hlm. 191.

¹⁴⁷ *Ibid.* Pim, hlm. 542.

¹⁴⁸ *Op.cit.*, Pim, hlm. 543.

berkuasa di Irian Barat. Bendera Merah Putih dengan mudah di kibarkan dan Bendera Irian Barat yang sebelumnya berdampingan dengan bendera Belanda diturunkan, Indonesia juga dengan mudah masuk dan menguasai wilayah-wilayah yang strategis di Irian Barat.

Dengan diberikannya keleluasaan ini, tanpa mendapat protes di berbagai tempat muncul pernyataan kesetiaan kepada Indonesia, dan menuntut bahwa pada 1 Januari 1963 UNTEA harus dibubarkan. Dalam aksinya para demonstran melakukan pembakaran rumah dan melempari batu ke kantor dan rumah-rumah orang Belanda.¹⁴⁹ Diantara para demonstran terdapat penduduk asli Papua, mereka ini adalah keturunan orang Indonesia yang sudah lama menetap di Irian Barat.¹⁵⁰ Bagi Indonesia kampanye di Irian Barat sangat penting untuk mendapatkan perhatian dunia dan pengakuan atas wilayah Indonesia.¹⁵¹ Berdasarkan persetujuan Jakarta dan Den Haag penyerahan Irian Barat akan dilakukan melalui dua tahap, namun dalam prakteknya di lapangan tidak berjalan sesuai dengan yang disepakati.

Pada masa pemerintahan UNTEA seharusnya situasi semakin membaik tetapi justru keadaan di Irian Barat semakin tegang di mana-mana ada kekerasan dan intimidasi terhadap warga Belanda maupun penduduk asli Irian Barat yang pro Belanda. Awal pemerintahan UNTEA beberapa

¹⁴⁹ "Papua sampai awal tahun 1960 tergolong kawasan yang relatif sangat aman di region Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya wilayah Irian Barat menjadi ajang Perebutan yang memakan banyak korban jiwa. (Sendius Wonda, *Tenggelamnya Rumpun Melanesia*, Yogyakarta, Galangpress, 2007, hlm. 1).

¹⁵⁰ Pim, *Op.cit.*, hlm:561.

¹⁵¹ Untuk mengawasi kampanye di Irian Barat maka Sukarno membentuk Komando Operasi Tertinggi (KOTI). Sukarno menjadi Panglima dengan wakil Nasution dan Mayor Jendral Yani menjadi kepala stafnya. Perang tersebut berada di bawah Komando Mandala yang diketuai oleh Mayor Jendral Soeharto. Sukarno bertindak untuk mengurangi kekuasaan Nasution dikalangan militer. (*Ibid*, M.C. Ricklef, hlm. 533).

peristiwa yang menyimpang dari persetujuan adalah penggantian bendera yang menurut persetujuan harus terlaksana pada 1 Januari 1963 tetapi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Belanda, bendera Belanda dan Irian Barat diganti dengan bendera Merah Putih di seluruh daerah. Penduduk asli Irian Barat terlibat namun mereka ini berada di bawah ancaman dan intimidasi sehingga pada masa ini merupakan masa yang kelam dan semua penduduk Irian Barat tidak ada yang berani berbicara mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Pada akhir September 1962 Indonesia mengirim pesawat-pesawat terbangnya di wilayah Kaimana yang berisi radio dan peralatan perang yang ditunjukkan untuk tentara Indonesia di Irian Barat. Namun peralatan perang ini jatuh di perkemahan tentara Belanda. Pihak Letnan Belanda menolak untuk menyerahkan kepada Indonesia, begitu juga Indonesia tidak mau mengakui jikalau itu milik mereka. Terjadi perdebatan yang sengit diantara mereka di kantor pemerintahan dan hasilnya barang-barang milik Indonesia dapat diserahkan kembali.¹⁵²

Kampanye Indonesia di Irian Barat dilaksanakan dalam situasi yang darurat di bawah pimpinan Mayjen Soeharto. Di seluruh wilayah Irian Barat tersebar prajurit-prajurit Indonesia. Banyak dari mereka belum mengetahui dengan baik situasi dan kondisi wilayah Irian Barat, mereka diterjunkan begitu saja di atas hutan belantara dan beberapa mayat prajurit Indonesia masih ditemukan bergantung di pohon-pohon. Kebanyakan dari para

¹⁵² Pim, *Ibid*, hlm. 565-556.

prajurit ini tidak mengetahui tujuan mereka diterbangkan dan misi ini sangat rahasia, mereka tidak diberitahu bahwa akan di terjunkan untuk berperang di Irian Barat, mereka hanya diberitahu bahwa keberangkatan mereka hanya untuk latihan. Banyak dari mereka bukannya disambut dengan baik oleh penduduk Irian Barat namun mereka juga menghadapi penduduk asli yang pro-Belanda dan menolak kehadiran para prajurit Indonesia.

Situasi kampanye di Irian Barat berjalan dalam situasi tegang, baik bagi penduduk asli maupun Belanda, karena hampir seluruh wilayah telah di kuasai oleh prajurit dan orang-orang Jakarta maupun penduduk Irian Barat yang pro-Jakarta. Keberadaan PBB dan dukungan dari Amerika Serikat membuat Jakarta bebas untuk melakukan kampanye, sedangkan Den Haag makin tertekan dengan situasi politik yang terjadi. Baku tembak diantara tentara Indonesia dan Belanda terus terjadi sampai pada penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Jakarta 1 Januari 1963.

Ketika perekonomian Indonesia terperosok kedalam hiper-inflasi yang permanen dan bangsa Indonesia hanyut dalam radikalisme, dan ketika pihak militer menjadi semakin tergantung kepada Uni Soviet dan PKI berkembang dengan pesat, maka Amerika Serikat menjadi semakin cemas akan kehilangan pengaruhnya di Indonesia. Pihak Amerika kini mendesak supaya Den Haag mau berunding dengan Indonesia mengenai Status Irian Barat. Pihak Den Haag juga menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kedaulatan atas Irian Barat kemungkinan mahal dan mengakibatkan terjadinya perang yang berlarut-larut, maka Den Haag

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bersedia untuk berunding dengan Indonesia. Presiden Sukarno selaku panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia mengeluarkan surat penghentian perang dengan Belanda. (lihat lampiran 4 dan 5)

Akhirnya sesuai dengan persetujuan New York, pada tanggal 1 Mei 1963 dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia di kota Baru atau Hollandia (Jayapura). Dengan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, maka pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 1 Mei 1963, Komando Mandala juga dibubarkan. Operasi terakhir yang dilaksanakan oleh komando Mandala adalah Operasi Wisnumurti untuk menyelenggarakan penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia.¹⁵³

Pada tanggal 23 Maret 1963, lima orang putra Irian Barat, antara lain; J. Dimara, Lucas Roemkore, A.B. Kurubuy dan Herman Wajoi, mengunjungi Presiden Sukarno di Jakarta untuk menyerahkan piagam Kotabaru dan pernyataan setia kepada Republik Indonesia dari para pimpinan dan tokoh-tokoh Irian Barat. Pada kesempatan yang sama Presiden Sukarno menyerahkan bendera Merah Putih kepada kelima orang tersebut.¹⁵⁴

¹⁵³ Setelah tercapainya persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, Irian Barat diserahkan kepada Indonesia oleh Belanda, melalui perantaraan PBB. Selanjutnya garis imajiner Sabang sampai Merauke menjadi konkret sejak tanggal 1 Mei 1963. (Hendro Subroto, *Ibid*, hlm. 166).

¹⁵⁴ Ginandjar Kartasasmita, *dkk*, *Ibid*, hlm. 230.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

KESIMPULAN

Irian Barat atau yang lebih dikenal dengan Papua adalah salah satu pulau bagian dari Indonesia. Secara administratif Papua terdiri atas propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. Sebelum Belanda menguasai Papua, Papua Bagian Barat dan Selatan berada di bawah kekuasaan kesultanan Tidore pada periode 1453-1890. Belanda secara resmi menguasai tanah Papua sejak Traktat London pada tahun 1824 dan mendirikan benteng *Fort du Bus* di Teluk Triton pada tanggal 24 Agustus 1828.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, wilayah Irian Barat tidak mendapatkan perhatian secara khusus seperti halnya Pulau Jawa. Secara ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya semuanya berpusat di pulau Jawa. Sedangkan Papua karena medan yang sulit untuk di jangkau tidak pernah diperhatikan, yang ada hanya kegiatan kemanusiaan, misalnya pekabaran injil.

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Irian Barat menjadi begitu penting bagi Belanda terutama untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara. Sementara itu bagi Indonesia semua wilayah bekas Hindia-Belanda adalah wilayahnya, termasuk Irian Barat, dan oleh karena itu Irian Barat harus direbut dari kekuasaan kolonial Belanda.

Kepentingan yang berbeda antara Belanda dan Indonesia menjadi latar belakang perselisihan keduanya. Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan atas Hindia-Belanda pada tahun 1949 dalam Konferensi Meja Bundar. Indonesia berharap bahwa dalam penyerahan kedaulatan Irian Barat juga termasuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

didalamnya, namun Belanda mempunyai kepentingan lain atas wilayah itu, dan tidak memasukkan dalam penyerahan tersebut. Tampak jelas bahwa mereka sedang menghadapi konflik yang sangat sulit diatasi. Dalam penyerahan kedaulatan, Belanda tidak memasukkan Irian Barat, yang telah didudukinya sejak tahun 1824 dengan alasan penduduk Irian Barat berbeda dengan penduduk Indonesia baik secara etnik, religi, dan sosial budaya. Maka Belanda menolak untuk memasukan wilayah itu. Tetapi, setelah Konferensi Meja Bundar 1949 munculah bukti-bukti adanya kepentingan tersembunyi di balik perselisihan antara kedua negara itu. Kepentingan Belanda di Irian Barat antara lain: pertama, Belanda ingin tetap mempunyai pengaruh di Pasifik dengan cara mempertahankan wilayah jajahannya; kedua, Belanda ingin menjadikan wilayah Irian Barat sebagai tempat penampungan orang-orang Indonesia keturunan Belanda atau Indo-Eropa; ketiga, Belanda ingin mengembalikan kekuasaan kolonialismenya di Indonesia; keempat, Belanda ingin menjadikan wilayah Irian Barat sebagai tempat untuk meneruskan tindakan subversifnya dengan tujuan untuk menghalangi revolusi Indonesia; kelima, Belanda ingin membendung perkembangan komunis di Irian Barat terutama lagi wilayah Asia Tenggara; keenam, Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai simbol status Belanda sebagai negara yang masih mampu memiliki jajahan; ketujuh, untuk menggali sumber-sumber alam yang besar potensinya di wilayah tersebut. Dari pihak Indonesia kepentingannya adalah, menghapus penjajahan, kepentingan ekonomi Indonesia ingin agar kekayaan alam di Irian Barat tidak jatuh ke tangan Belanda, dan Indonesia menganggap Irian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Barat termasuk dalam Hindia-Belanda dan merupakan bagian dari Indonesia yang harus diserahkan.

Baik Belanda maupun Indonesia sama-sama berpegang pada pernyataan masing-masing dan merasa paling berhak dan benar untuk memiliki Irian Barat. Indonesia sejak tahun 1950. Baik Belanda dan Indonesia berusaha membawa masalah status Irian Barat ke PBB. Karena negosiasi internal yang terjadi antara Belanda dan Indonesia tidak pernah berhasil maka, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke tingkat internasional, dengan harapan PBB bisa membujuk Belanda agar mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, tetapi usaha Indonesia tidak pernah berhasil.

Masalah status Irian Barat makin berkembang dan kedua pihak yang berselisih tidak bisa untuk didamaikan lagi, sebab dari pihak Indonesia mulai mempersiapkan penyelesaian melalui jalur perang dengan membeli peralatan perang dari Uni Soviet, demikian juga Belanda memperkuat pertahanannya di perairan Irian Barat dengan mendatangkan kapal induk dan menambah pasukan di Irian Barat. Dengan demikian masalah Irian Barat mulai mendapat perhatian serius di tingkat internasional terutama PBB, Amerika Serikat, Australia dan negara-negara Asia-Afrika.

Masalah perselisihan Belanda dan Indonesia mengenai Irian Barat pemerintahan Dwight D. Eseenhower memiliki kebijakan yang lebih mendukung Belanda karena Belanda merupakan sekutu Amerika. Namun, sejak tahun 1961 pada masa pemerintahan John F. Kennedy, kebijakan Amerika Serikat semula bersikap netral, tetapi kemudian berubah menjadi pendukung Indonesia atas Irian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Barat. Ada beberapa sebab yang mengubah sikap Amerika yaitu; pertama; adanya permintaan bantuan peralatan militer Indonesia kepada Uni Soviet. Amerika takut apabila komunis berkembang di Indonesia. Kedua; persaingan pengaruh antara Amerika dan Uni Soviet di Indonesia. Ketiga; Amerika takut apabila konflik Belanda dan Indonesia mengenai status Irian Barat berkembang menjadi perang lokal. Dan terakhir Amerika Serikat juga tidak lepas dari kepentingan ekonomi Amerika.

Proses penyelesaian perselisihan Indonesia dan Belanda harus segera dilaksanakan, karena jika tidak bisa berkembang menjadi perang. Amerika dalam beberapa kesempatan mendesak Belanda maupun Indonesia untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dengan jalur diplomasi. Namun baik Belanda maupun Indonesia tetap pada pendiriannya masing-masing. Karena keduanya sulit untuk didamaikan, maka pada tanggal 1 Desember 1961 penasehat keamanan nasional Presiden Kennedy, Mc George Bundy, menyatakan dukungannya kepada Indonesia. Ia mengatakan bahwa apabila Amerika tidak mendukung Indonesia pihak komunis yang akan diuntungkan. Pernyataannya mengubah pandangan Amerika terhadap permasalahan Indonesia dan Belanda yang semula bersikap netral dan tidak mau ikut campur berubah menjadi negara yang dengan aktif berusaha mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat.

Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengutus adiknya Robert Kennedy pada tahun 1962, dengan tujuan untuk membujuk Presiden Sukarno, agar pengalihan kekuasaan tidak lagi menjadi prasyarat negosiasi. Dia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menekankan pentingnya penyelesaian masalah Irian Barat melalui perundingan, akan tetapi bujukan ini tidak mempengaruhi Sukarno, ia tetap berpegang pada pendiriannya yang menyangkut prasyarat bagi negosiasi. Dalam kunjungannya ini Robert Kennedy juga pergi ke Belanda untuk mendesak pemerintahan Belanda supaya mau berunding dengan Indonesia menyangkut masalah status Irian Barat. Namun menteri Luar Negeri Luns menolak desakan Robert Kennedy, maka Amerika memberikan ancaman kepada Belanda bahwa apabila terjadi perang antara Belanda dan Indonesia, maka Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan kepada Belanda sekutunya.

Ketakutan yang sama juga muncul dari Australia, karena secara geografis negara ini terletak berdekatan dengan Asia Tenggara. Australia memberikan dukungan dan simpati kepada Indonesia saat Indonesia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan juga memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, namun sikap ini berubah. Perkembangan PKI di Indonesia memberikan pertimbangan tersendiri bagi Australia untuk memberikan dukungan kepada Indonesia. Australia akhirnya memilih untuk mendukung Belanda. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pengalihan dukungan; pertama, Australia takut apabila pengaruh komunis masuk ke wilayah Australia; dan kedua untuk menjaga keamanan dalam negeri terutama terhadap kemungkinan serangan dari luar.

Ada beberapa resolusi mengenai penyelesaian status Irian Barat, antara lain: pertama, resolusi rencana Luns kelanjutan dari rencana ini mempersiapkan Irian Barat untuk merdeka, dengan membentuk dewan daerah dan mempersiapkan segala hal mulai dari bendera, dan lagu kebangsaan Irian Barat; kedua, resolusi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Asia-Afrika sebuah rancangan yang di sponsori oleh India, Bolivia dan beberapa negara Asia-Afrika; dan ketiga, resolusi Branzzaville. Resolusi ini mendukung dibukanya kembali perundingan-perundingan bilateral tanpa praduga untuk menghormati kemauan dan hak menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa. Semua resolusi di atas tidak pernah ada hasilnya, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Situasi semakin tegang. Atas desakan Amerika, PBB, Australia, dan negara-negara Asia-Afrika, Jakarta dan Den Haag sepakat untuk berunding lagi, di bawah pengawasan PBB. Dari persetujuan itu tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang sebelumnya mendukung kemerdekaan Papua juga mengubah pendiriannya dan mendukung Indonesia atas desakan Amerika Serikat. Persetujuan New York ini lebih dikenal dengan rencana Bunker. Inti dari rencana Bunker adalah peralihan kekuasaan atas Irian Barat kepada Dewan Keamanan PBB, yang setahun kemudian akan diikuti oleh penyerahan wilayah tersebut kepada Indonesia, yang selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk memilih apakah hendak merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia. Baik Indonesia maupun Belanda menerima rencana Bunker.

Dari hasil perjanjian New York dibentuklah suatu badan pemerintahan sementara yang diberi nama UNTEA. Secara resmi UNTEA aktif pada tanggal 1 Oktober 1962. Tugas pokok dari pemerintahan sementara ini adalah menerima penyerahan pemerintahan atas Irian Barat dari pihak Belanda, menyelenggarakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintahan yang stabil di sana selama suatu masa tertentu, dan kemudian menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.

Perundingan Indonesia dan Belanda tidak pernah memberikan hasil yang memuaskan bagi Belanda maupun Indonesia. Sebagai dampaknya Indonesia mulai jenuh dengan sikap Belanda yang tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Maka Indonesia mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan masalah Irian Barat antara lain; memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tahun 1960, mempersiapkan peralatan militer Indonesia, mengeluarkan Trikora 1961, dan pembentukan Komando Mandala pembebasan Irian Barat. Sedangkan Belanda memperkuat pertahanannya di Irian Barat dengan menambah pasukan, mengirim kapal induk dan penambahan pesawat tempur Belanda di Irian Barat.

Situasi yang semakin tegang membuat warga Eropa di Irian Barat mulai panik, karena sewaktu-waktu perang antara Indonesia bisa saja terjadi. Pada bulan Juli 1962 dengan adanya ancaman konflik bersenjata, para wanita dan anak-anak Eropa di evakuasi.

Perang Belanda dan Indonesia pecah pada tanggal 15 Januari 1962, antara pasukan Indonesia dengan Belanda di perairan Arafura. Dalam pertempuran itu, KRI Macan Tutul bersama awaknya tenggelam dan menewaskan Kapten Wiratno dan Komodor Yosudarso.

Indonesia melakukan serangan ke wilayah Irian Barat dalam rangka melumpukan kekuatan Belanda terus dilakukan, baik melalui jalur laut maupun

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

udara. Selanjutnya operasi paling besar terjadi pada bulan Juli 1962, yang dikenal dengan operasi Jayawijaya dengan sasaran Sorong, Kaimana, Kotabaru (Jayapura) dan Fak-fak. Operasi pertama, terjadi pada tanggal 19 Juli 1962. Tentara Indonesia merebut keunggulan udara dan laut dengan cara membom dan menembak dari udara; kedua, pada tanggal 20 Juli 1962 dengan cara memberikan serangan vertikal oleh kesatuan tugas I dan II horizontal oleh Angkatan tugas Amphibi ATA-17; ketiga, pada tanggal 20 Juli 1962 dengan sasaran merebut Kotabaru dengan kesatuan tempur Gatotkaca; dan keempat, operasi dengan sasaran yang sama diperkuat oleh kesatuan tempur divisi Lesmono untuk menempatkan kekuasaan di Korabaru.

Situasi politik di Irian Barat semakin tidak menentu. Tidak lama kemudian datang wakil-wakil UNTEA dan para perwira Indonesia. Sementara itu pasukan Indonesia yang sebelumnya sudah mendarat di Misool harus ditarik kembali. Walaupun antara Jakarta dan Den Haag telah sepakat untuk menghentikan tembak-menembak, namun di beberapa daerah masih saja jatuh korban dalam pertempuran antara militer Indonesia dan Belanda, terutama di Raja Ampat.

Keberadaan UNTEA di Irian Barat memberikan kemudahan bagi Indonesia untuk mewujudkan keinginannya. Sejak pemerintahan baru tersebut berkuasa di Irian Barat Bendera Merah Putih dengan mudah dikibarkan dan Bendera Irian Barat yang sebelumnya berdampingan dengan bendera Belanda diturunkan, Indonesia juga dengan mudah masuk, menguasai wilayah-wilayah strategis di Irian Barat dan melaksanakan kampanye di Irian Barat. Kampanye Indonesia di Irian Barat dilaksanakan dalam situasi yang darurat di bawah

pinpinan Mayjen Soeharto. Saat kampanye seluruh wilayah Irian Barat tersebar prajurit-prajurit Indonesia.

Sesuai dengan persetujuan New York, pada tanggal 1 Mei 1963 dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia di kota Baru atau Hollandia (Jayapura). Dengan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, maka pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 1 Mei 1963, Komando Mandala juga dibubarkan.

Pada tanggal 23 Maret 1963, lima orang putera Irian Barat, antara lain; J. Dimara, Lucas Roemkorem, A.B. Kurubuy dan Herman Wajoi, mengunjungi Presiden Sukarno di Jakarta untuk menyerahkan Piagam Kotabaru dan pernyataan setia kepada Republik Indonesia dari para pimpinan dan tokoh-tokoh Irian Barat. Pada kesempatan yang sama Presiden Sukarno menyerahkan bendera Merah Putih kepada kelima orang tersebut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa, S.H. 1962. *Djalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*. Jakarta: Daya Upaja.
- Bambang Widjanarko. *Sewindu Bung Karno*. Jakarta: PT Gramedia.
- Baskara T Warday. 2008. *Indonesia Melawan Amerika*. Yogyakarta: Galangpress.
- _____. 2008. *Bung Karno Menggugat*. Yogyakarta: Galangpress.
- Dahm, Bernhard. 1966. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Dewi Fortuna Anwar, dkk. 2005, *Konflik Kekerasan Internal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- George, Margaret. 1986. (Terjemahan) *Australia dan revolusi Indonesia*. Jakarta: PT Pantja Simpati.
- Giebels, Lambert. 2001. *Soekarno biografi 1901-1950*. Jakarta: Grasindo.
- Ginandjar Kartasasmita, dkk. 1984. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*. Jakarta: PT Tira Pustaka.
- Hadi Soebadio. 2002. *Keterlibatan Australia dalam pemberontakan PRRI/Permesta*, Jakarta: TP Gramedia.
- Hendro Subroto. 2009. *Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*. Jakarta: Kompas.
- Hidayat Mukmin. 1991. *TNI Dalam Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hilman Adil. 1993. *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan.
- John Pantara. 1983. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Irian Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- John RG. Djopari. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo.
- Kuegler Sabine. 2006. *Jungle Child Rinduku pada Rimba Papua*. Jakarta: Erlangga
- Mani. 1989. *Jejak Revolusi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moejanto, G. 2003. *Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Muhamad Yamin. 1956. *Perjuangan Irian Barat atas Dasar Proklamasi, cetakan kedua*. Jakarta: NV. Nusantara.
- Muridan S. Widjojo, dkk. 2009. *Papua Road Map*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ramandey, Frits Bernard. 2008. *Mengadili Demokrasi dan Perjuangan Damai Rakyat Papua*. Jayapura: LPS-OTSUS Papua.
- Richard Chauvel, dkk. 2005. *Indonesia – Australia Tantangan dan Kesempatan Dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit.
- Ricklfs M.C. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Rob Agus Supriaji. 1979. *Seri Pembinaan Pengajaran Sejarah*. Yogyakarta: IKIP Sanata Dharma. Seri VIII Juli No.1.
- Rosihan Anwar. 2006. *Sukarno “Tentara, PKI”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Schoorl Pim. 2001. *Belanda Di Irian Jaya*. Jakarta: Garba Budaya.
- Sendius Wonda. 2007. *Tenggelamnya Rumpun Melanesia*. Yogyakarta: Galangpress.
- _____ 2009. *Jeritan Bangsa Rakyat Papua Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Siboro. J. 1989. *Sejarah Australia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Smit, C. 1986. *Dekolonisasi Indonesia*. Jakarta: Daya Sarana.
- Soratez Sofyan Yoman. 2007. *Pemusnahan Etnis Melanesia*. Yogyakarta: Galangpress.
- Totok, dkk. 2010. *Bung Karno Masalah Pertahanan – Keamanan*. Jakarta: Grasindo.

..... 1986. *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat.

Wiharyanto. A.K. 2003. *Sejarah Kerja Sama Asia Tenggara*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Internet:

<http://sejarah-indonesia.co.cc/home/daftar-isi/demokrasi-terpimpin/perjuangan-pembebasan-irian-barat>.

<http://www.tempo.co.id/harian/fokus/23/2,1,5,id.html>.

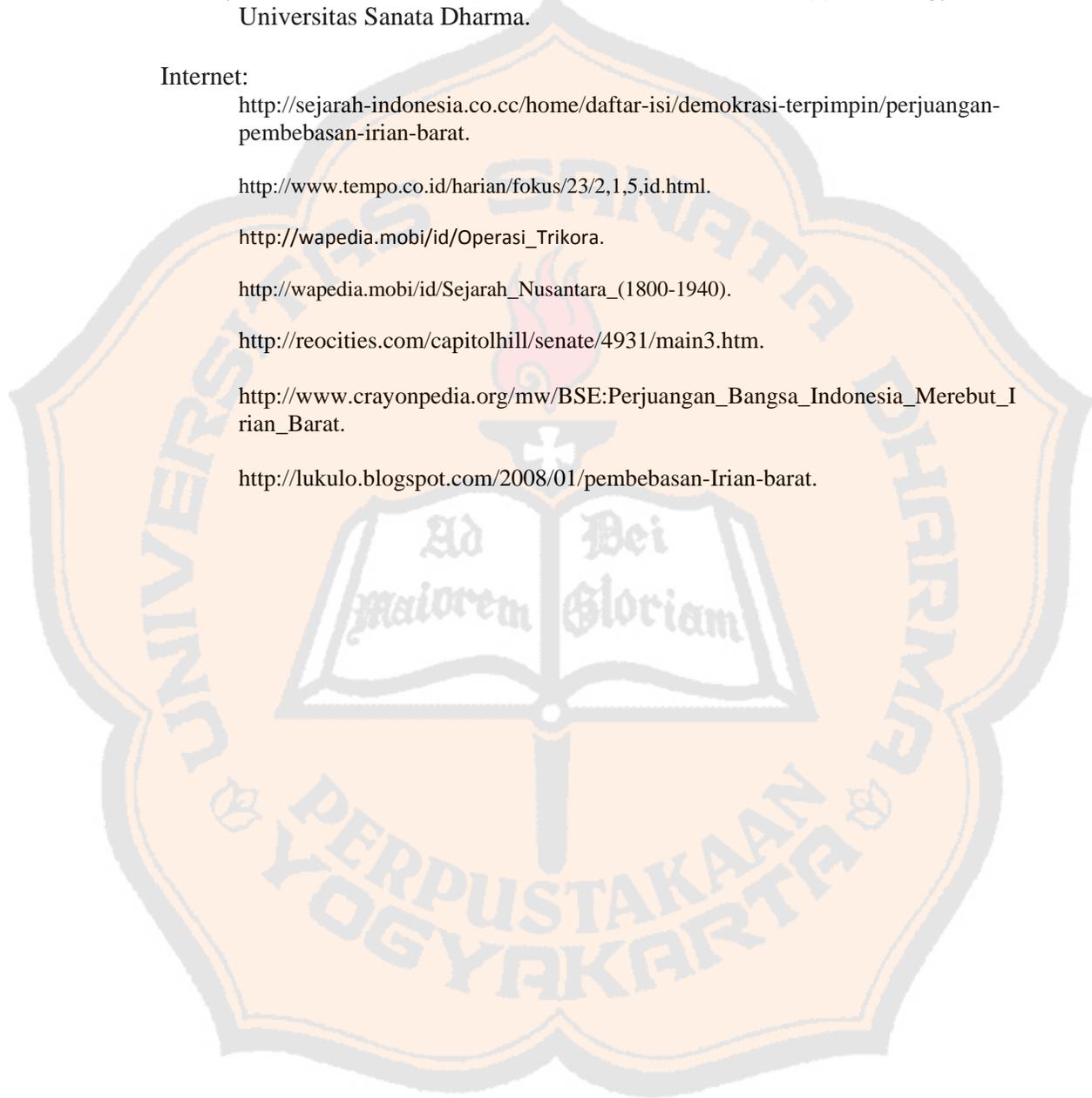
http://wapedia.mobi/id/Operasi_Trikora.

[http://wapedia.mobi/id/Sejarah_Nusantara_\(1800-1940\)](http://wapedia.mobi/id/Sejarah_Nusantara_(1800-1940)).

<http://reocities.com/capitolhill/senate/4931/main3.htm>.

http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perjuangan_Bangsa_Indonesia_Merebut_Irian_Barat.

<http://lukulo.blogspot.com/2008/01/pembebasan-Irian-barat>.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN 1

SILABUS

Nama Sekolah : SMA Santo Mikael Warak
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas/ Semester : XII / I (satu)
 Standar Kompetensi : Menjelaskan proses perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat 1961-1963.
 Alokasi Waktu : 1 X 45 Menit

Kompetensi Dasar	Materi Pokok/ Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Alokasi Waktu	Sumber dan Media	Penilaian
❖ Menjelaskan bentuk-bentuk diplomasi Jakarta dan Den Haag atas Irian Barat.	❖ Diplomasi Jakarta dan Den Haag (1961-1963) ❖ Perkembangan perselisihan Jakarta dan Den Haag.	❖ Siswa mencari bentuk-bentuk diplomasi antara Jakarta dan Den Haag dari buku dan mendiskusikannya dengan teman sebangku. ❖ Secara kelompok siswa dapat berdiskusi dan mempresentasikan perselisihan Jakarta dan Den Haag.	❖ Siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk diplomasi antara Jakarta dan Den Haag. ❖ Siswa mampu menjelaskan perkembangan perselisihan Jakarta dan Den Haag.	1 X 45 menit	Sumber ❖ Smit, C. 1986. Dekolonisasi Indonesia. Jakarta. Daya sarana. ❖ Baskara T Wardaya, SJ. 2008. <i>Indonesia Melawan Amerika</i> . Yogyakarta: Galangpress. ❖ Baharuddin Lopa, S.H. 1962. <i>Djalannya Revolusi Indonesia</i>	Instrument/alat: ❖ Portofolio Bentuk: makalah Alat: skala nilai ❖ Unjuk Kerja Bentuk: presentasi Alat: skala nilai.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perbedaan kepentingan menjadi penyebab perselisihan Jakarta dan Den Haag 	<p>Haa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Secara kelompok siswa diskusi dan mempresentasikan di depan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Siswa mampu menjelaskan kepentingan Jakarta dan Den Haag atas Irian Barat. 		<p><i>Membebaskan Irian Barat.</i> Jakarta: Daya Upaja.</p> <p>Media</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Computer dan viewer/ program power point ❖ Papan tulis. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sikap <u>Bentuk</u>: observasi guru <u>Alat</u>: skala sikap. ❖ Tertulis <u>Bentuk</u>: essay dan pilihan ganda <u>Alat</u>: tes
--	--	--	--	--	--	---

Yogyakarta, 27 Januari 2011
 SMA Santo Mikael Warak
 Bidang Studi Pendidikan Sejarah

Sintike Bahabol
 NM: 041314021

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN 2

RPP

(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

Nama Sekolah : SMA Santo Mikael

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/Semester : XII IPS/ I (satu)

Tahun Ajaran : 2011/2012

Alokasi Waktu : I X 45 Menit

Standar Kompetensi : Menjelaskan proses perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat 1961-1963.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan bentuk-bentuk diplomasi Jakarta dan Den Haag atas Irian Barat.

❖ Indikator:

- Siswa mampu menjelaskan proses diplomasi Jakarta dan Den Haag (1961-1963).
- Siswa mampu menjelaskan resolusi penyelesaian masalah Irian Barat.
- Siswa mampu menjelaskan perjanjian New York sebagai akhir dari perselisihan Jakarta dan Den Haag.
- Siswa mampu menjelaskan pemerintahan UNTEA di Irian Barat sebagai kebijakan yang tepat bagi Jakarta dan Den Haag.

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan proses diplomasi Jakarta dan Den Haag (1961-1963).
2. Siswa dapat menjelaskan resolusi penyelesaian masalah status Irian Barat.
3. Siswa dapat menjelaskan isi perjanjian New York dan dampaknya bagi Jakarta dan Belanda.
4. Siswa dapat menganalisis dan menjelaskan bahwa UNTEA sebagai cara terbaik untuk meredam perang antara Jakarta dan Den Haag (1961-1963).

B. MATERI PEMBELAJARAN

1. Proses Diplomasi Jakarta dan Den Haag (1961-1963).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Resolusi penyelesaian masalah status Irian Barat.
3. Perjanjian New York.
4. Pemerintahan sementara UNTEA.

C. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

- ❖ Pendekatan : cooperative Learning
- ❖ Metode : ceramah, diskusi kelompok dengan mencari pasangan, dan tanya jawab

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

JENIS KEGIATAN/ PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
1. PENDAHULUAN a) Guru memberikan apersepsi gambaran secara umum tentang materi yang akan dibahas dan tanya jawab mengenai proses perselisihan Jakarta dan Den Haag b) Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini c) Guru memberikan petunjuk langkah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan siswa, yaitu dengan membentuk kelompok.	10 menit
2. KEGIATAN INTI a) Pembentuk kelompok dalam satu kelompok terdiri atas 5 siswa. b) Guru membagikan kartu yang berisikan soal, yang harus dibahas dalam kelompok. c) Siswa yang telah mendapatkan kartu yang berisi soal masuk dalam kelompok dan mendiskusikanya. d) Setelah selesai diskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan dilanjutkan dengan Tanya jawab e) Guru mengklarifikasi atas hasil diskusi, memberikan penguatan dan memberikan penegasan poin-poin penting dari pembahasan.	30 menit (membentuk kelompok dan diskusi)
3. PENUTUP a) Guru meninjau kembali dan memberikan kesimpulan terhadap keseluruhan materi yang baru saja dipelajari. b) Guru memberikan informasi mengenai materi yang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya, agar siswa bisa mempersiapkannya. c) Guru memberikan refleksi kepada siswa dari materi yang sudah dibahas.	5 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

a. Sumber belajar

1. Pim Schoorl. 2001. *Belanda Di Irian Jaya*. Jakarta: Garba Budaya
2. Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
3. Muridan S. Widjojo, dkk. 2009. *Papua Road Map*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
4. Hilman Adil. 1993. *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan.

b. Media belajar

1. Komputer (program powerpoint)
2. Papan tulis

F. PENILAIAN

❖ Fortofolio

- a. Bentuk: makalah
- b. Alat: skala nilai

❖ Untuk kerja

- a. Bentuk: presentasi kelompok
- b. Alat: skala nilai

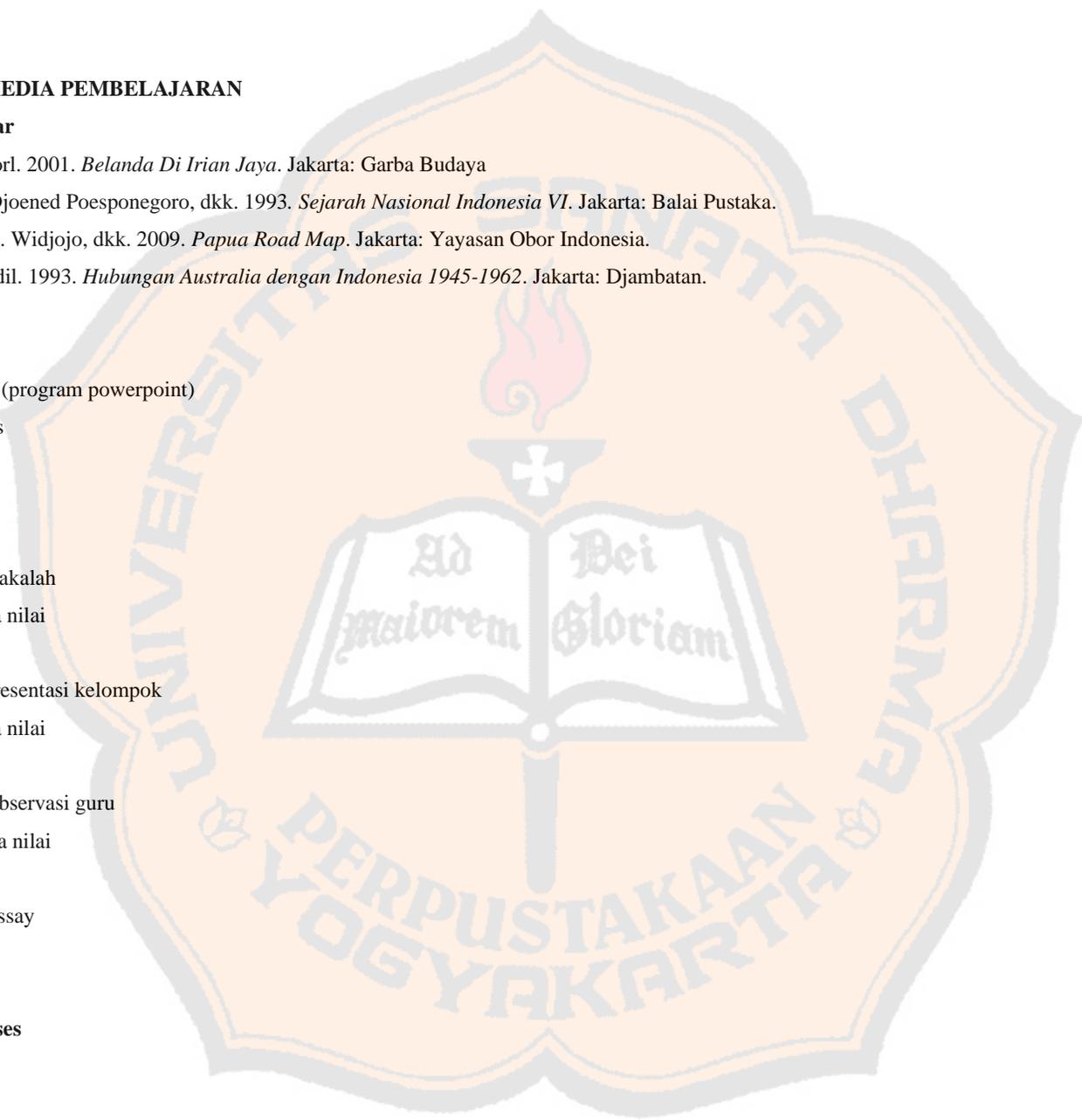
❖ Sikap

- a. Bentuk : observasi guru
- b. Alat: skala nilai

❖ Tertulis

- a. Bentuk : essay
- b. Alat : tes

* Penilaian Proses



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Presentasi (Performance)

<i>Nama</i>	<i>Keaktifan</i>	<i>Keantusiasan</i>	<i>Kerjasama</i>	<i>Penampilan</i>	<i>Jumlah</i>

Skor Total

$$1. \text{Skor} \frac{\text{-----}}{20} \times 100\%$$

Keterangan :

- o Skor 1: Tidak antusias, pasif, kurang kooperatif dan tidak serius
- o Skor 2: Tidak antusias, pasif, kurang kooperatif tetapi serius
- o Skor 3: Tidak antusias, pasif, tetapi kooperatif, dan serius
- o Skor 4: Antusias, kooperatif, dan serius
- o Skor 5: Sangat antusias, kooperatif, serius dan aktif

2. Pengamatan

Lembar observasi terlampir

Skor penilaian Proses : pengamatan (60%) + Performance (40%)

* Penilaian Produk

1. Makalah : isi pembahasan makalah dari tiap kelompok
2. Portopolio

Nilai akhir : skor penilaian produk (40%) + skor penilaian

Tambahan: Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 75% atau lebih, dan memberi program perbaikan atau remedi (tugas) untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 75%

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

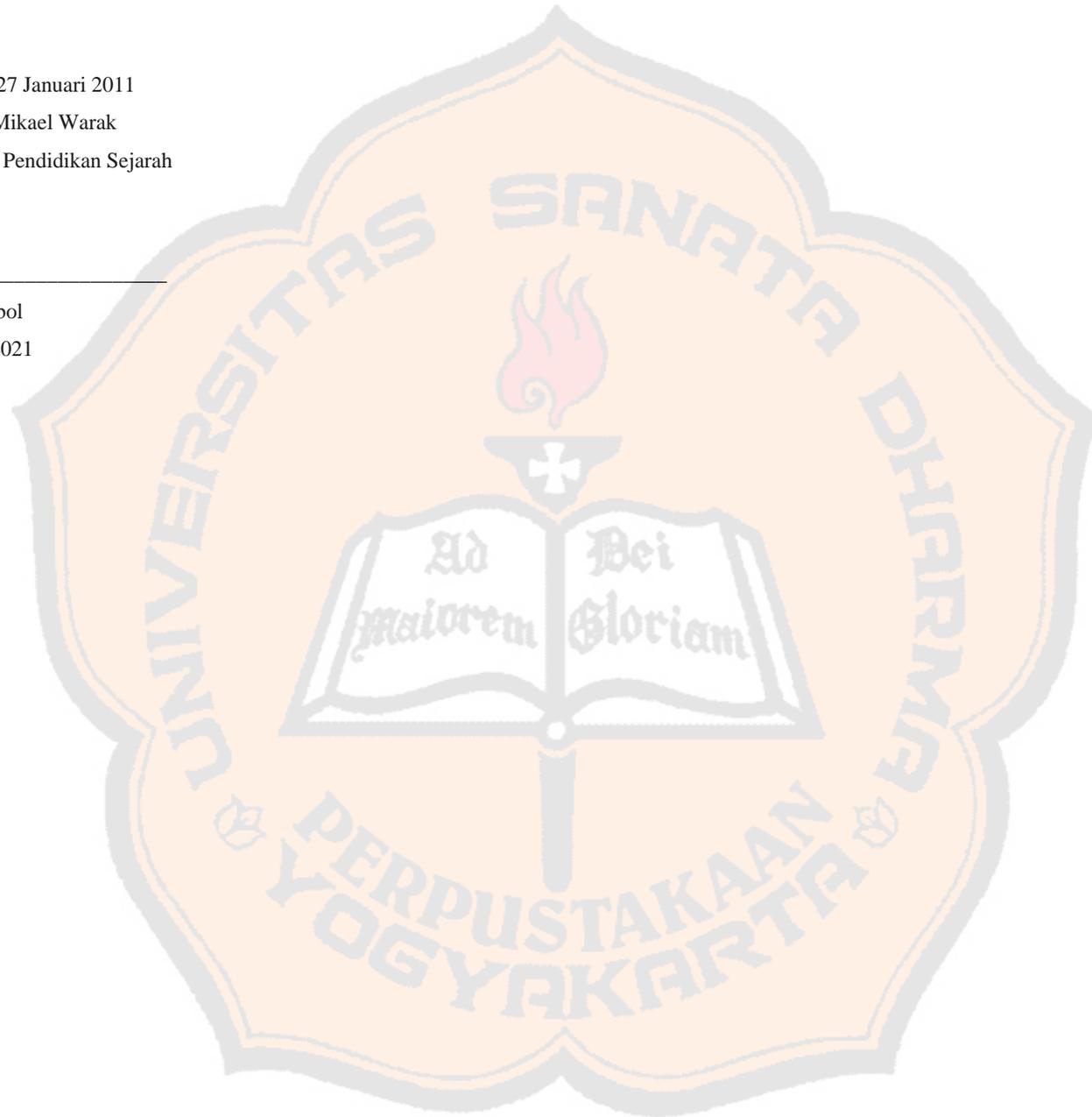
Yogyakarta, 27 Januari 2011

SMA Santo Mikael Warak

Bidang Studi Pendidikan Sejarah

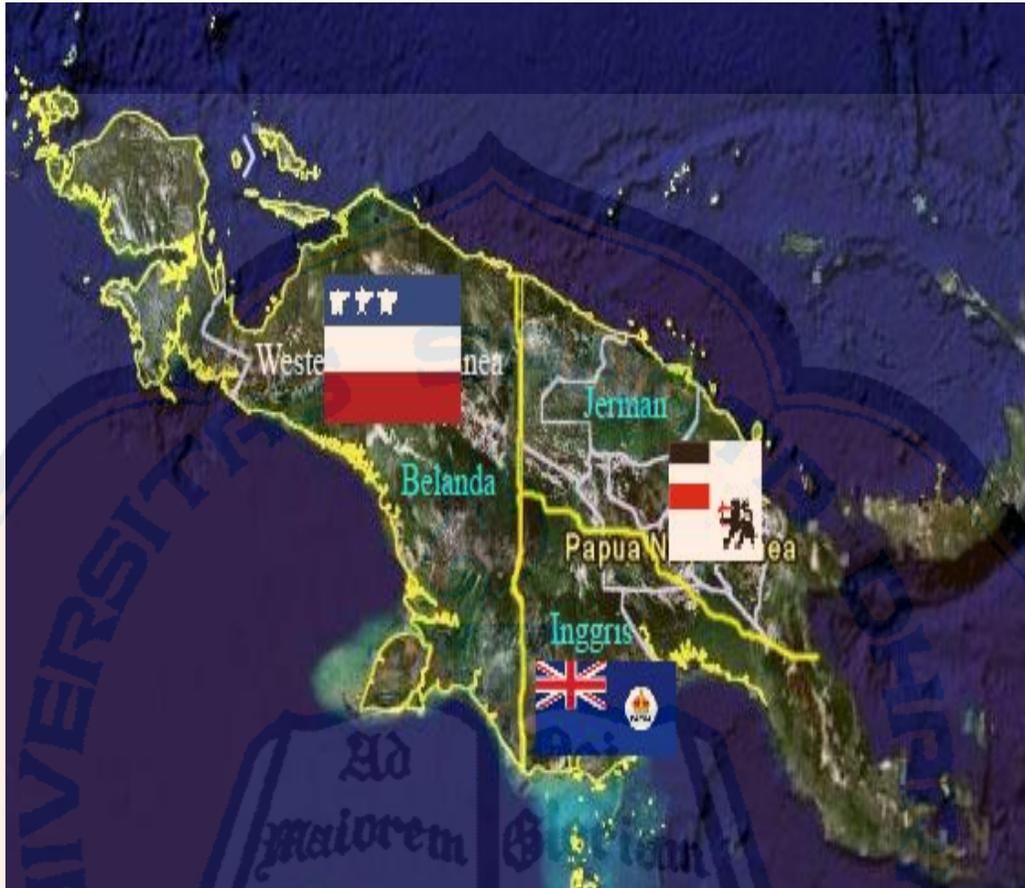
Sintike Bahabol

NM : 041314021



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN 3



Gambar Peta: Pembagian wilayah Irian Barat antara Belanda, Jerman dan Inggris.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**KOMANDO MANDALA
PEMBEBASAN IRIAN BARAT**

PERINTAH

I. Mengingat perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat tgl. 16 Agustus 1962 tentang :

PENGHENTIAN PERMUSUHAN BELANDA—INDONESIA

II. Diperintahkan kepada :

Seluruh pasukan yang termasuk slagorde Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, yang berada di Daratan Irian Barat.

Untuk :

a. Menaati dan melaksanakan dengan penuh Keinsjafan dan tanggungjawab perintah dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, tentang Penghentian Permusuhan Belanda—Indonesia.

b. Mengadakan Kontak dengan Perwira-Perwira penindjau P.B.B. terdekat yang disertai Perwira-Perwira penghubung dari pihak Indonesia jaitu;

1. Brigadier Djenderal Achmad Wiranatakusuma.
2. Kolonel Udara I. Dewanta.
3. Letnan Kolonel Pelaut Nizam Zachman.

III. Perbekalan akan segera diterdjunkan dari udara oleh Pesawat P.B.B., didaerah Droppings Zone baru setelah ada hubungan.

IV. Selesai.

Dikeluarkan di : Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat
Pada tanggal : 25 Agustus 1962

S. Nanto

95

MEMAETO
Majelis Djendral TERA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

P E R I N T A H

**Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik
Indonesia, Panglima Besar Komando Tertinggi
Pembebasan Irian Barat**

tentang

**PENGHENTIAN PERMUSUHAN
BELANDA — INDONESIA**

I. Berdasarkan persetujuan Republik Indonesia dan Belanda yang ditanda-tangani di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 djam 21.00 GMT permusuhan dihentikan pada tanggal 18 Agustus 1962 djam 00.01 GMT atau tanggal 18 Agustus 1962 djam 09.31 waktu Irian Barat;

II. P E R I N T A H :

1. Hentikan tembak-menembak dan permusuhan mulai tanggal 18 Agustus 1962 djam 09.31 waktu Irian Barat;
2. Adakan konsolidasi kedalam dan tetap waspada ;
3. Siapkan diri untuk menerima perintah lebih lanjut untuk tugas-tugas baru di Irian Barat;

III Dengan ini disertakan kutipan perintah Belanda kepada pasukannya.

IV. S E L E S A I.

DJAKARTA, 16 AGUSTUS 1962
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI APRI
PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI
PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Kepada
SEMUA GERILJAWAN INDONESIA
di DARATAN IRIAN BARAT

Dacharno -